

ISSN : 2089-4333 (Print)

# JURNAL AKUNTANSI

JURNAL AKUNTANSI

Volume 6 No 2 Desember 2020

ISSN : 2089-4333 (Print)

**PENGARUH KEPEMILIKAN NPWP, PEMERIKSAAN PAJAK, PENERIMAN PAJAK, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK**

*Rita J. D. Atarwaman*

**PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR), INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL SYSTEM (ISPO), DAN RETURN ON INVESTMENT (ROI) TERHADAP HARGA SAHAM PERUSAHAAN PADA SEKTOR PERKEBUNAN YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2014–2018**

*Yustus Sangur*

**PENGARUH GOOD PUBLIC GOVERNANCE DAN PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KUALITAS INFORMASI LAPORAN KEUANGAN DI PEMERINTAHAN KOTA AMBON**

*Retno Widia Astuti*

**PENGARUH PENILAIAN TINDAKAN SUPERVISI DAN PENGALAMAN KERJA DENGAN PENDEKATAN DYADIC TERHADAP KEPUASAN KERJA AUDITOR (STUDI EMPIRIS PADA BPK, INSPEKTORAT KOTA DAN PROVINSI MALUKU)**

*Chistina Sososutiksno, Yuyun Yuniarti Layn*

**IIMPLEMENTASI PERMENDAGRI NO.113 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

*Hartina Husein, Safaat Warandi*



Penerbit

**Jurusan Akuntansi**

**Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pattimura**

Jl. Ir. M. Putuhena Kampus Poka Ambon

Email : [jurnalakuntansi@yahoo.com](mailto:jurnalakuntansi@yahoo.com)

Website : [ojs3.unpatti.ac.id/index.php/jak](http://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/jak)



Jurnal  
Akuntansi

Vol. 6

No. 2

Halaman  
1-98

Desember 2020

ISSN  
2089-4333

---

# Jurnal Akuntansi

---

[ojs3.unpatti.ac.id/index.php/jak](https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/jak)

**Rita J. D. Atarwaman**

Pengaruh Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, Penerimaan Pajak,  
Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

**Yustus Sangur**

Pengaruh *Corporate Social Responsibility (CSR)*, *Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO)*, Dan *Return On Investment (ROI)*  
Terhadap Harga Saham Perusahaan Pada  
Sektor Perkebunan yang Terdaftar  
di BEI Periode 2014 – 2018

**Retno Widia Astuti**

Pengaruh *Good Public Governance* dan Pengendalian Internal  
Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan  
di Pemerintahan Kota Ambon

**Christina Sososutiksno, Yuyun Yuniarti Layn**

Pengaruh Penilaian Tindakan Supervisi dan Pengalaman Kerja dengan  
Pendekatan Dyadic Terhadap Kepuasan Kerja Auditor  
(Studi Empiris Pada Bpk, Inspektorat Kota  
Dan Provinsi Maluku)

**Hartina Husein, Safaat Warandi**

Implementasi Permendagri No.113 Tahun 2014  
tentang Pengelolaan Keuangan Desa

<b>Jurnal Akuntansi</b>	<b>Vol. 6</b>	<b>No 2</b>	<b>Halaman 1-98</b>	<b>Ambon Desember 2020</b>	<b>ISSN 2089 - 4333</b>
-----------------------------	---------------	-------------	-------------------------	------------------------------------	-----------------------------

(Journal of Accounting)  
Volume 6, Nomor 2, Desember 2020

Journal of Accounting, ISSN: 2089 – 4333 (Print) is also known as jurnal akuntansi is dedicated to explore and disseminate the latest issues and developments of accounting research to academicians and professional communities, practitioners, students and other interested parties through the publication. JAK publishes articles on accounting research in a wide range of topics about financial accounting, management accounting, public sector, taxation, banking and finance, accounting and information systems, capital markets, corporate management, international accounting, social and environmental accounting, Islamic accounting and accounting education.

Chairman  
Head of Accounting and Business Department  
*Pattimura University*

Editor in-Chief:  
Jeffry Gasperz

Reviewers  
Christina Sososutiksno  
*Pattimura University*  
Paul Usmany  
*Pattimura University*  
Ferry H Basuki  
*Pattimura University*

Editorial Secretary  
Rita J. D. Atarwaman

**Correspondence:**

Department of Accounting  
Faculty of Economics, Pattimura University  
Jl.Ir.M. Putuhena Kampus Poka Ambon 97234  
Email : jurnalakuntansi@yahoo.com  
Website : ojs3.unpatti.ac.id/index.php/jak  
Co-published twice a year (June and December) by:  
Laboratory of Financial Accounting and Business Development(LP2AKB)  
Department of Accounting, Faculty of Economic and Business

---

# Jurnal Akuntansi

---

[ojs3.unpatti.ac.id/index.php/jak](https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/jak)

ISSN: 2089 – 4333

- Pengaruh Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, Penerimaan Pajak,  
Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak  
**Rita J. D. Atarwaman** **1**
- Pengaruh *Corporate Social Responsibility (CSR)*, *Indonesian Sustainable Palm  
Oil System (ISPO)*, Dan *Return On Investment (ROI)*  
Terhadap Harga Saham Perusahaan Pada  
Sektor Perkebunan yang Terdaftar  
di BEI Periode 2014 – 2018  
**Yustus Sangur** **18**
- Pengaruh *Good Public Governance* dan Pengendalian Internal  
Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan  
di Pemerintahan Kota Ambon  
**Retno Widia Astuti** **39**
- Pengaruh Penilaian Tindakan Supervisi dan Pengalaman Kerja dengan  
Pendekatan Dyadic Terhadap Kepuasan Kerja Auditor  
(Studi Empiris Pada Bpk, Inspektorat Kota  
Dan Provinsi Maluku)  
**Chistina Sososutiksno, Yuyun Yuniarti Layn** **52**
- Implementasi Permendagri No.113 Tahun 2014  
tentang Pengelolaan Keuangan Desa  
**Hartina Husein, Safaat Warandi** **72**

---

# Jurnal Akuntansi

---

ojs3.unpatti.ac.id/index.php/jak

ISSN: 2089 – 4333

## Pedoman Penulisan

Artikel yang dikirim ke JAK harus mengikuti pedoman berikut:

a. Artikel secara sistematis meliputi:

*Abstract*, isinya mencakup masalah riset, tujuan, metode, temuan dan kontribusi. Abstrak harus terdiri dari 150-400 kata dan diikuti dengan sedikitnya 4 kata kunci

*Pendahuluan*, cakupannya adalah motivasi riset, latar belakang, pertanyaan penelitian dan tujuan riset.

*Telaah Literatur dan Perumusan Hipotesis* (jika ada) untuk menjelaskan rerangka teori yang digunakan sebagai basis logis dalam mengembangkan hipotesis atau proposisi dan model riset

*Metode*, menggambarkan pemilihan dan pengumpulan data, pengukuran variable dan definisi operasional serta metode analisis data.

*Hasil dan Pembahasan*, memberikan temuan penelitian

*Kesimpulan, Implikasi, Keterbatasan dan Saran*, meliputi ringkasan temuan, implikasi dan usulan bagi riset masa datang.

*Daftar Pustaka semua referensi*, yang dirujuuk dalam penelitian dinyatakan dalam artikel

*Appendiks*, memuat tabel, gambar dan instrumen riset

b. Naskah diketik dengan ukuran kertas A4 jarak 1 spasi menggunakan huruf Bookman Old Style (11 size) sebanyak 20-25 halaman

c. Jarak Margin diatur dengan jarak margin atas 1,5 inch (1.5”), dan bawah, kiri, dan kanan 1 inch (1”)

d. Tiap gambar dan tabel harus diberi nomor dan label

e. Sitasi dalam naskah mengikuti contoh berikut:

a. Satu sumber sitasi dengan satu penulis (Roychowdhury, 2009)

b. Satu sumber sitasi dengan dua penulis (Healy dan Wahlen, 2010)

c. Satu sumber sitasi dengan tiga penulis (Hofstede et al., 2005)

d. Dua sumber sitasi dengan penulis yang berbeda (Ball, 2011; Brown, 2015)

e. Dua sumber sitasi dengan satu penulis (Basu, 1990,2005)

- f. Dua sumber sitasi dengan satu penulis terpublikasi pada tahun yang sama (Stubben, 2005a,2005b)
- g. Sumber sitasi berupa institusi harus dinyatakan menggunakan akronim dari nama institusi (IAPI, 2005).

Artikel disertai dengan CV, alamat korespondensi dan surat pernyataan bahwa artikel tidak dikirimkan atau telah dipublikasikan

# **Pengaruh Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, Penerimaan Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak**

Rita J. D. Atarwaman

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi, Universitas  
Pattimura*

*\*(rita.atarwaman72@gmail.com)*

---

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak dalam meningkatkan Penerimaan Pajak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif Kuantitatif. Lokasi penelitian dan Responden pada penelitian ini adalah kantor dan pegawai dengan sampel 82 pegawai pada lima seksi yang bertanggung jawab yaitu Seksi Pelayanan Pajak, Seksi Pemeriksaan Pajak, Seksi Penagihan Pajak, Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan (bagi wajib pajak yang belum mengetahui), dan di Seksi Pengawasan dan Konsultasi (bagi wajib pajak yang sudah mengetahui) pada KPP pratama di wilayah Ambon.

Penerimaan Pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat. Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak menjadi sektor yang memiliki potensi dalam menyumbang Penerimaan Pajak. Hasil penelitian menunjukkan pengaruh Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak menunjukkan hasil yang positif terhadap Penerimaan Pajak. Dengan nilai signifikan masing-masing variabel Kepemilikan NPWP sebesar (0,187), Pemeriksaan Pajak sebesar (0,015), Penagihan Pajak (0,040), dan Kesadaran Wajib Pajak sebesar (0,005). Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Satria Pamber (2016).

**Kata Kunci:** Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak.

## **ABSTRACT**

*This study aims to analyze the effect of NPWP ownership obligation, tax audit, tax collection, and taxpayer awareness in increasing tax revenue. This study uses a descriptive quantitative research method. Research locations and respondents in this study are offices and employees with a sample of 82 employees in the five responsible sections, namely the Tax Service Section, the Tax Audit Section, the Tax Collection Section, the Extensification and Counseling Section (for taxpayers who don't know yet), and the Section Supervision and Consultation (for taxpayers who already know) at KPP Pratama in Ambon area.*

*Tax revenue is a source of revenue that can be obtained continuously and can be developed optimally according to government needs and conditions of*

*society. NPWP ownership, tax audit, tax collection and taxpayer awareness are sectors that have the potential to contribute to tax revenue. The results showed the effect of NPWP Ownership, Tax Audit, Tax Billing, and Taxpayer Awareness showing positive results on Tax Revenues. With a significant value of each variable of NPWP Ownership of (0.187), Tax Audit of (0.015), Tax Collection (0.040), and Taxpayer Awareness of (0.005). This research supports research conducted by Satria Pamber (2016).*

**Keywords:** *Obligation of NPWP Ownership, Tax Audit, Tax Billing, Taxpayer Awareness and Tax Receipts.*

---

## 1. PENDAHULUAN

Sebagai negara yang berkembang Indonesia memiliki berbagai macam potensi untuk menjadi negara yang lebih maju. Akan tetapi pada kenyataannya Indonesia tidak sepenuhnya memanfaatkan berbagai potensi tersebut. Hal ini dikarenakan pajak merupakan potensi penerimaan terbesar dalam negeri karena pajak merupakan penerimaan langsung yang segera bisa diolah guna untuk pembiayaan berbagai macam keperluan negara (Listyaningtyas, 2012).

Untuk lebih memaksimalkan penerimaan pajak, pemerintah telah mengambil langkah-langkah kebijakan agar dapat memancing kesadaran masyarakat untuk mau membayar pajak.

Pada tahun 2008 pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan kebijakan berupa sunset policy. Kebijakan sunset policy ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak sehingga dana pajak yang dirasakan dapat lebih luas bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Semua wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan sistem self assessment, wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai wajib pajak dan sekaligus untuk mendapatkan NPWP.

Titik tolak penelitian maupun pemeriksaan pajak adalah pemberitahuan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak dalam Surat Pemberitahuan Pajak. Surat Pemberitahuan Pajak ini disampaikan wajib pajak pada setiap akhir tahun pajak. Pada saat penerimaan SPT Tahunan ini petugas pajak akan melakukan penelitian kelengkapan formal dan penulisan pada kolom-kolom yang terdapat pada SPT tersebut. Apabila SPT yang disampaikan telah lengkap maka akan diberikan tanda terima SPT Tahunan kepada wajib pajak dan selanjutnya SPT akan direkam, namun apabila SPT belum lengkap dan/atau terdapat kesalahan dalam penulisan maka SPT akan dikembalikan kepada wajib pajak untuk dilengkapi dan/atau diperbaiki (Purba, 2012:2).

Selain pemeriksaan pajak, ada juga kebijakan yang dilakukan dalam usaha untuk mengoptimalkan penerimaan pajak yaitu dengan melakukan penagihan pajak secara lebih aktif kepada setiap wajib pajak yang menunggak pembayaran pajaknya (Ginting, 2006:12). Penagihan pajak dilakukan karena masih banyaknya wajib pajak terdaftar yang tidak melunasi hutang pajaknya sehingga diperlukan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat dan memaksa.

Ketepatan penyampaian pelaporan SPT WP dapat dipengaruhi beberapa faktor, di antaranya adalah kesadaran wajib pajak. Kesadaran



wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak (Muliari, 2010:24).

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengklaim telah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017 secara efektif, efisien, kredibel, dan berkesinambungan. Klaim itu memang bukan tanpa alasan lantaran indikator makroekonomi berjalan positif di tengah ketidakpastian ekonomi di sepanjang tahun lalu. Salah satunya realisasi pendapatan dan belanja negara belum mencapai target yang ditetapkan dalam postur APBNP 2017. Realisasi pendapatan negara baru mencapai Rp1.655,8 triliun atau 95,4 persen dari APBNP sebesar Rp1.736,1 triliun, terdiri atas realisasi penerimaan perpajakan sebesar Rp1.339,8 triliun atau 91,0 persen dari APBNP, dan PNPB sebesar Rp308,4 triliun. Dalam kurun waktu 13 tahun terakhir pula, pemerintah baru dua kali berhasil mencapai proyeksi penerimaan pajak yang ditetapkan di APBN maupun APBNP. Penerimaan pajak terbaik terjadi pada 2008 dengan capaian kenaikan cukup signifikan di zaman Darmin Nasution ketika menjabat Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Ekonom Institute for Economic and Development Finance (Indef) Bhima Yudhistira menilai upaya meningkatkan penerimaan pajak dalam negeri cukup berat meskipun pemerintah melakukan berbagai reformasi perpajakan. Bahkan program pengampunan pajak yang diluncurkan nyatanya belum mampu mendongkrak penerimaan negara sesuai ekspektasi awal. Sementara itu, Ani menambahkan, data dari otoritas

pajak negara menjadi modal bagi pemerintah untuk mengejar target penerimaan pajak. Data ini diperoleh dari program pengampunan pajak serta kebijakan Pertukaran Informasi Secara Otomatis (AeOI) yang berjalan mulai pertengahan 2018.(Medcom.id)

## **2. TELAAH LITERATUR DAN PERUMUSAN HIPOTESIS**

### **2.1. Telaah Literatur Dan Perumus-an Hipotesis**

#### **2.1.1. Theory of Planned Behavior**

Pada Theory of Planned Behavior ini menjelaskan bahwa perilaku individu muncul karena adanya niat berperilaku. Sedangkan munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor (Mustikari, oleh Susi Rusdiati, 2016), yaitu : 1). Behavioral Beliefs 2). Normative Beliefs 3). Control Beliefs.

#### **2.1.2. Dasar Dasar Perpajakan**

##### **1. Defensi Pajak**

Menurut Prof. Dr. Soemitro, SH dalam buku Mardiasmo (2011:1) adalah sebagai berikut: "Pajak adalah iuran kepada Indivkas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dilaksanakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum."

#### **2.1.3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)**

Menurut (Mardiasmo, 2009:23) Nomor pokok wajib pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

#### **2.1.4. Pemeriksaan Pajak**

Pengertian pemeriksaan pajak menurut (Mardiasmo, 2009:50) adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah data dan

atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

#### **2.1.5. Penagihan Pajak**

Menurut (Diana Sari, 2013:264) penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur dan memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa. Pelaksanaan penagihan pajak yang tegas, konsisten dan konsekuen diharapkan akan dapat membawa pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar hutangnya.

#### **2.1.6. Kesadaran Wajib Pajak**

Menurut (Muliari, 2010:69) Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan.

#### **2.1.7. Penerimaan Pajak**

Menurut (John Hutagaol, 2007:325) adalah: "Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat."

1. Sumber Penerimaan Pajak
  - a. Pajak Penghasilan
  - b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
  - c. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
  - d. Bea Meterai

### **2.1. Pengembangan Hipotesis**

#### **2.2.1. Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP terhadap Penerimaan Pajak.**

Pemberian NPWP dilakukan dengan pemberian Surat Keterangan Terdaftar. Surat tersebut menginformasikan pemenuhan kewajiban perpajakan setiap wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitian petugas Seksi Tata Usaha Perpajakan, kewajiban perpajakan tersebut diisi dan harus dilaksanakan oleh setiap wajib pajak. Pengisian kewajiban perpajakan harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga pelaksanaan atas kewajiban perpajakan oleh setiap wajib pajak dapat mengamankan penerimaan pajak.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Setiawan (2007), Wiranata Saragih (2017) dan Budi Sutrisno, Rina Arifati dan Rita Andini (2016), yang membuktikan dan menyatakan Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) memiliki pengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak. Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H1 : Kewajiban Kepemilikan NPWP berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak.

#### **2.2.2. Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak**

Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wiranata Saragih (2017) dan Budi Sutrisno, Rina Arifati dan Rita Andini (2016), menyatakan

bahwa Pemeriksaan Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak. Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H2: Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak

### 2.2.3. Pengaruh Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Penagihan Pajak dilakukan karena masih banyaknya wajib pajak terdaftar yang tidak melunasi hutang pajaknya sehingga diperlukan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat dan memaksa. Maka dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, pemerintah mengeluarkan Undang – Undang nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Budi Sutrisno, Rina Arifati dan Rita Andini (2016), menyatakan bahwa Penagihan Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak. Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H3: Penagihan Pajak

berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak.

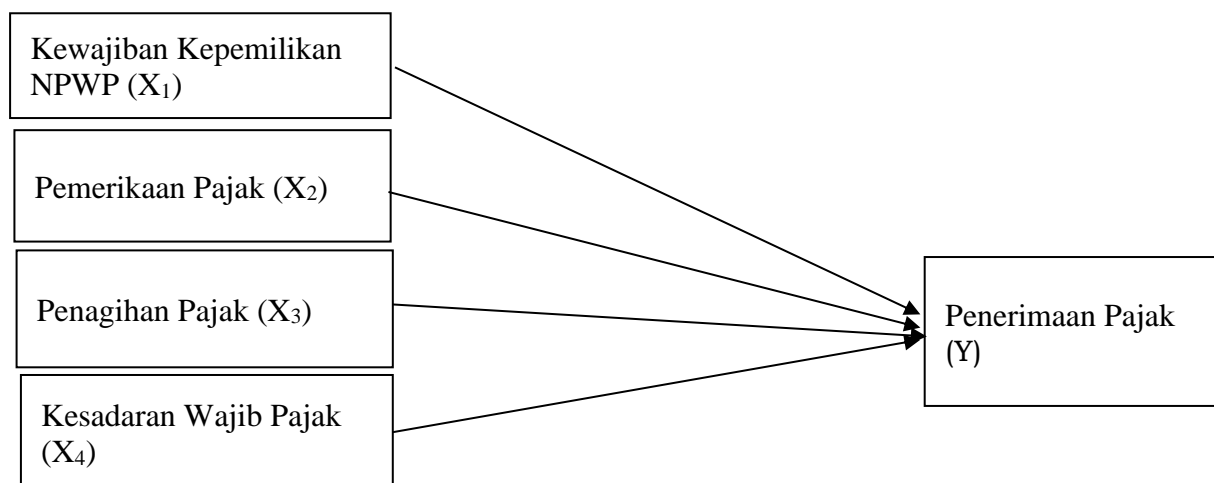
### 2.2.4. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak berada pada suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Kesadaran wajib pajak akan perpajakan adalah rasa yang timbul dari dalam diri Wajib Pajak atas kewajibannya membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan. Dengan kesadaran pajak yang tinggi, kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pajaknya dapat meningkat.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Budi Sutrisno, Rina Arifati dan Rita Andini (2016) dan Savira Warlina, Syamsuul Bahri Arifin (2016) menyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak. Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H4: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak.

### 2.2.5. Model Penelitian



### 3. METODE PENELITIAN

#### 3.1 Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

1. Populasi  
Populasi dalam penelitian ini dilakukan pada KPP Pratama di Wilayah Ambon, yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah petugas pajak (fiskus) yang berada di KPP Pratama di Wilayah Ambon.
2. Sampel  
Sampel adalah sebagian populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi. Sampel dalam penelitian ini dilakukan pada Pegawai Pajak (fiskus) pada KPP Pratama di Wilayah Ambon.
3. Teknik Pengambilan Sampel  
Pengambilan sampel dalam penelitian menggunakan teknik Purposive Sampling. Purposive Sampling adalah Teknik pengambilan sampel

dengan melihat dan menentukan ciri-ciri atau karakteristik ataupun kriteria sampel yang ingin di teliti.

#### 3.2 Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini adalah data primer yang berasal dari sumber data asli atau data pertama

#### 3.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini dilakukan metode pendekatan deskriptif analitis yaitu suatu metode yang berusaha mengumpulkan dan menganalisis sehingga dapat memberikan gambaran objek yang diteliti. Adapun teknik pengumpulan data yang akan dilakukan oleh peneliti adalah kuesioner.

#### 3.4 Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional Variabel

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang bertindak apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.

**Tabel 3.4 Variabel Penelitian dan Operasional Variabel**

Variabel	Defenisi	Indikator	Skala
Variabel Independen : Kewajiban Kepemilikan NPWP (X <sub>1</sub> )	Menurut (Mardiasmo, 2009:23) NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.	1. NPWP dapat memudahkan Wajib Pajak dalam melaksanakan administrasi perpajakan. 2. NPWP dapat memberikan informasi tentang identitas Wajib Pajak yang sebenarnya.. 3. NPWP merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan rekening koran di Bank – Bank. 4. NPWP merupakan salah satu syarat ketika akan melakukan pengurusan Surat Izin Usaha Pedagangan (SIUP) bagi Wajib Pajak yang ingin membuka usaha.	Likert 1-5

Variabel	Defenisi	Indikator	Skala
		5. NPWP dapat menjaga ketertiban dalam hal pembayaran pajak. 6. NPWP diterbitkan jika Wajib Pajak telah memenuhi persyaratan objektif dan subjektifnya. 7. Penghapusan NPWP dilakukan jika WP tidak memenuhi syarat objektif dan subjektifnya, penghentian atau penggabungan usaha, dan Wajib Pajak (Bentuk usaha tetap) BUT sudah tidak melakukan kegiatan usaha di Indonesia. 8. Wajib Pajak yang sengaja tidak mendaftarkan diri akan dikenakan sanksi pidana paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun, Wajib pajak juga dikenakan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.	
Variabel Independen : Pemeriksaan Pajak (X <sub>2</sub> )	Menurut (Mardiasmo,2009:50) Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan.	1. Dengan adanya pemeriksaan, dapat mendorong wajib pajak untuk menghitung dengan benar besar pajak yang harus dibayarkan. 2. Pemeriksaan pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 3. Dengan adanya pemeriksaan, dapat mendorong wajib pajak untuk menyampaikan SPT tepat waktu. 4. Apabila ada wajib pajak yang terlambat menyampaikan SPT, maka harus dilakukan pemeriksaan. 5. Apabila ada wajib pajak yang kurang bayar maka harus dilakukan pemeriksaan. 6. Apabila ada wajib pajak yang kurang bayar maka harus dilakukan pemeriksaan.	Likert 1-5

Variabel	Defenisi	Indikator	Skala
		7. Dengan Adanya pemeriksaan dapat mengantisipasi adanya kecurangan pajak. 8. Kecurangan pajak dapat diatasi dengan dilakukannya pemeriksaan.	
Variabel Independen : Penagihan Pajak (X <sub>3</sub> )	Menurut Diana Sari (2013: 264) Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur dan memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa.	1. Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis diterbitkan untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. 2. Penagihan Seketika dan Sekaligus dilakukan tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa Pajak dan Tahun Pajak. 3. Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa. 4. Surat Paksa diterbitkan apabila penanggung pajak tidak dapat melunasi utang pajaknya. 5. Pelaksanaan Surat Paksa tidak dapat dilanjutkan dengan penyitaan sebelum lewat waktu 2 kali 24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan. 6. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dilakukan apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dalam jangka waktu yang telah ditentukan. 7. Penyitaan tambahan dilakukan apabila barang yang disita nilainya tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak. 8. Pencabutan sita dilaksanakan apabila penanggung pajak telah melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak.	Likert 1-5
Variabel Independen : Kesadaran Pajak	Menurut (Muliari, 2010, hal 69) Kesadaran Wajib Pajak adalah suatu	1. Masyarakat mendaftarkan sebagai wajib pajak berdasarkan kemauan sendiri.	Likert 1-5

Variabel	Defenisi	Indikator	Skala
Wajib Pajak (X <sub>4</sub> )	kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Adanya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai peraturan yang berlaku</li> <li>3. Dengan adanya tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap kinerja aparat pajak dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak.</li> <li>4. Dengan adanya pemahaman yang disosialisasikan kepada masyarakat melalui kampanye sadar akan pajak seperti seminar dapat meningkatkan kesadaran dalam membayar pajak</li> <li>5. Kesadaran timbul dari manusia dikarenakan adanya rasa tanggung jawab sebagai warga Negara</li> </ol>	
Variabel Dependen : Penerimaan Pajak (Y)	Menurut John Hutagaol (2007:325) adalah: "Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat."	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peran penerimaan pajak sangat penting bagi kemandirian pembangunan Negara.</li> <li>2. Sumber utama penerimaan Negara salah satunya berasal dari Pajak.</li> <li>3. Peningkatan penerimaan pajak memegang peranan strategis karena akan meningkatkan kemandirian pembiayaan pemerintah.</li> <li>4. Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar Negara.</li> <li>5. Dengan adanya kewajiban kepemilikan NPWP, Pemeriksaan dan Penagihan pajak, penerimaan pajak semakin meningkat. Kerjasama antara fiskus dan wajib pajak diperlukan.</li> <li>6. Kerjasama antara fiskus dan wajib pajak diperlukan dalam meningkatkan penerimaan pajak dimasa depan.</li> </ol>	Likert 1-5

Sumber : Variabel Penelitian

### 3.5 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis statistic dengan menggunakan SPSS 22.0. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda (Multiple Regression Analysis).

### 3.6 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen ( $X_1, X_2, X_3, X_4$ ) dengan variabel dependen (Y). Berdasarkan hubungan antara variabel kewajiban kepemilikan NPWP ( $X_1$ ), pemeriksaan pajak ( $X_2$ ), penagihan pajak ( $X_3$ ), kesadaran wajib pajak ( $X_4$ ), dan penerimaan pajak (Y), maka akan digunakan model analisa

regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

### 3.7 Uji Hipotesis

#### 1. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t disebut juga uji signifikansi individual. Uji ini menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen

Uji F (uji simultan) adalah untuk melihat apakah variabel independen secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Uji Deskriptif

**Tabel 4.1 Hasil Uji Deskriptif Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kewajiban Kepemilikan NPWP	82	21	40	35.18	4.071
Pemeriksaan Pajak	82	24	40	32.44	4.403
Penagihan Pajak	82	24	40	33.44	3.614
Kesadaran Wajib Pajak	82	13	25	20.55	2.842
Penerimaan Pajak	82	23	30	27.27	2.639
Valid N (listwise)	82				

Berdasarkan penjelasan Tabel 4.1, maka dapat dilihat Hasil Uji Deskriptif sebagai berikut:

- a. Kewajiban Kepemilikan NPWP ( $X_1$ ) memiliki nilai maksimum 40, nilai minimum 21, nilai rata-rata 35,18, dan standar deviasi 4,071 dengan sampel sebanyak 82
- b. Pemeriksaan Pajak ( $X_2$ ) memiliki nilai maksimum 40, nilai minimum 24, nilai rata-rata 32,44, dan standar

deviasi 4,403 dengan sampel sebanyak 82

- c. Penagihan Pajak ( $X_3$ ) memiliki nilai maksimum 40, nilai minimum 24, nilai rata-rata 33,44, dan standar deviasi 3,614 dengan sampel sebanyak 82
- d. Kesadaran Wajib Pajak ( $X_4$ ) memiliki nilai maksimum 25, nilai minimum 13, nilai rata-rata 20,55, dan standar deviasi 28,42 dengan sampel sebanyak 82



- e. Penerimaan Pajak (Y) memiliki nilai maksimum 30, nilai minimum 23, nilai rata-rata 27,27, dan standar deviasi 2,639 dengan sampel sebanyak 82

dilakukan dengan bantuan SPSS 25 dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas Kewajiban Kepemilikan NPWP ( $X_1$ ), Pemeriksaan Pajak ( $X_2$ ), Penagihan Pajak ( $X_3$ ), dan Kesadaran Wajib Pajak ( $X_4$ ) terhadap variabel terikat yaitu Penerimaan Pajak (Y).

#### 4.2 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda

**Tabel 4.2 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	15.662	2.818		5.557	.000
Kewajiban Kepemilikan NPWP	.103	.078	.159	1.731	.187
Pemeriksaan Pajak	.201	.081	.336	2.487	.015
Penagihan Pajak	.051	.084	.070	2.608	.040
Kesadaran Wajib Pajak	.154	.112	.166	1.969	.005

Sumber: Data diolah 2020

Berdasarkan tabel 4.2 maka persamaan analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini adalah:

$$Y = 15,662 + 1,731X_1 + 2,487X_2 + 2,608X_3 + 1,969X_4 + e$$

Berdasarkan persamaan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut

- Konstanta (a) = 15,662 ini menunjukkan harga *constant*, dimana jika variabel Kewajiban Kepemilikan NPWP ( $X_1$ ), Pemeriksaan Pajak ( $X_2$ ), Penagihan Pajak ( $X_3$ ), dan Kesadaran Wajib Pajak ( $X_4$ ), maka Penerimaan Pajak (Y) = 15,662.
- Kewajiban Kepemilikan NPWP ( $X_1$ ) = 1,731 ini berarti bahwa Kewajiban Kepemilikan NPWP ( $X_1$ ) berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak, dengan

- kata lain jika Kewajiban Kepemilikan NPWP ( $X_1$ ) ditingkatkan sebesar satu-satuan, maka nilai Penerimaan Pajak (Y) akan meningkat sebesar 1,731. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara variabel Kewajiban Kepemilikan NPWP dengan Penerimaan Pajak, semakin tinggi nilai Kewajiban Kepemilikan NPWP maka akan semakin meningkatkan nilai Penerimaan Pajak.
- Pemeriksaan Pajak ( $X_2$ ) = 2,487 ini berarti bahwa variabel Pemeriksaan Pajak ( $X_2$ ) berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak, dengan kata lain jika Pemeriksaan Pajak ( $X_2$ ) ditingkatkan sebesar satu-satuan, maka nilai

Penerimaan Pajak (Y) akan meningkat sebesar 2,487. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara variabel Pemeriksaan Pajak dengan Penerimaan Pajak, semakin tinggi nilai Pemeriksaan Pajak maka akan semakin meningkatkan nilai Penerimaan Pajak.

- d. Penagihan Pajak ( $X_3$ ) = 2,608 ini berarti bahwa variabel Penagihan Pajak ( $X_3$ ) berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak, dengan kata lain jika Penagihan Pajak ( $X_3$ ) ditingkatkan sebesar satu-satuan, maka nilai Penerimaan Pajak (Y) akan meningkat sebesar 2,608. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara variabel Penagihan Pajak dengan Penerimaan Pajak,

semakin tinggi nilai Penagihan Pajak maka akan semakin meningkatkan nilai Penerimaan Pajak

- e. Kesadaran Wajib Pajak ( $X_4$ ) = 1,969 ini berarti bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak ( $X_4$ ) berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak, dengan kata lain jika Kesadaran Wajib Pajak ( $X_4$ ) ditingkatkan sebesar satu-satuan, maka nilai Penerimaan Pajak (Y) akan meningkat sebesar 1,969. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara variabel Kesadaran Wajib Pajak dengan Penerimaan Pajak, semakin tinggi nilai Kesadaran Wajib Pajak maka akan semakin meningkatkan nilai Penerimaan Pajak.

### 4.3 Uji Hipotesis

**Tabel 4.3 Hasil Uji Signifikan Parsial (Uji-t)**

Model	Unstandardized Coefficients	Std. Error	Standardized Coefficients	t	Sig.
1 (Constant)	15.662	2.818		5.557	.000
KewajibanKepemilikanNPWP	.103	.078	.159	1.731	.187
PemeriksaanPajak	.201	.081	.336	2.487	.015
PenagihanPajak	.051	.084	.070	2.608	.040
KesadaranWajibPajak	.154	.112	.166	1.969	.005

Berdasarkan Table 4.3 dapat dilihat bahwa:

- a. Kewajiban Kepemilikan NPWP ( $X_1$ )  
 Nilai  $t_{hitung}$  variabel Independen Kewajiban Kepemilikan NPWP 1,731 dan nilai  $t_{tabel}$  1,66462 maka  $t_{hitung} < t_{tabel}$  ( $1,731 > 1,66462$ ) sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Kewajiban

Kepemilikan NPWP berpengaruh dan tidak signifikan ( $0,187 > 0,05$ ) secara parsial terhadap Penerimaan Pajak. Dengan demikian, Hipotesis I ditolak

- b. Pemeriksaan Pajak ( $X_2$ )  
 Nilai  $t_{hitung}$  variabel Pemeriksaan Pajak 2.487 dan nilai  $t_{tabel}$  1,66462 maka  $t_{hitung} < t_{tabel}$  ( $2.487 > 1,66462$ )

sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Pemeriksaan Pajak berpengaruh dan signifikan ( $0,015 < 0,05$ ) secara parsial terhadap Penerimaan Pajak. Dengan demikian, Hipotesis II diterima.

c. Penagihan Pajak ( $X_3$ )

Nilai  $t_{hitung}$  variabel Penagihan Pajak 2.608 dan nilai  $t_{tabel}$  1,66462 maka  $t_{hitung} < t_{tabel}$  ( $2.608 > 1,66462$ ) sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Penagihan Pajak berpengaruh dan signifikan ( $0,040 < 0,05$ ) secara parsial terhadap Penerimaan Pajak.

Dengan demikian, Hipotesis III diterima.

d. Kesadaran Wajib Pajak ( $X_4$ )

Nilai  $t_{hitung}$  variabel Kesadaran Wajib Pajak 1,969 dan nilai  $t_{tabel}$  1,66462 maka  $t_{hitung} < t_{tabel}$  ( $1,969 > 1,66462$ ) sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh dan signifikan ( $0,05 < 0,05$ ) secara parsial terhadap Penerimaan Pajak. Dengan demikian, Hipotesis IV diterima.

**4.4. Uji Signifikan Simultan (Uji-f)**

**Tabel 4.4 Hasil Uji Signifikan Simultan (Uji-f) ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	153.760	4	38.440	7.213	.000 <sup>b</sup>
	Residual	410.337	77	5.329		
	Total	564.098	81			

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

b. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Kewajiban Kepemilikan NPWP, Penagihan Pajak, Pemeriksaan Pajak

Pada table 4.4 dapat dilihat bahwa hasil perolehan  $f_{hitung}$  pada kolom F yakni sebesar 7,213 dengan tingkat signifikan = 0,000. Sedangkan  $f_{tabel}$  pada tingkat kepercayaan 95% ( $\alpha=0,05$ ) adalah 2,49. Dengan demikian Kewajiban Kepemilikan NPWP, dan Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, dan kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak. Oleh karena kedua perhitungan yaitu  $f_{hitung} >$

$f_{tabel}$  dan tingkat sig.  $0,000 > 0,05$  menunjukkan bahwa pengaruh variabel bebas (Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak) secara serempak atau simultan adalah signifikan terhadap variabel terikat Penerimaan Pajak

**4.5. Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R Square)**

**Tabel 4.5 Hasil Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R Square)**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	R Square Change
1	.522 <sup>a</sup>	.273	.235	2.308	.273

Berdasarkan table 4.5 dapat dilihat bahwa:

1.  $R = 0,522$  berarti hubungan antar variabel Kewajiban Kepemilikan NPWP ( $X_1$ ), Pemeriksaan Pajak ( $X_2$ ), Penagihan Pajak ( $X_3$ ), dan Kesadaran Wajib Pajak ( $X_4$ ), terhadap Penerimaan Pajak ( $Y$ ) sebesar 52,2%.
2. Nilai Koefisien Determinasi (*Adjusted R Square*) sebesar 0,235. Hasil ini berarti bahwa ada kontribusi sebesar 23,5% dari Kewajiban Kepemilikan NPWP ( $X_1$ ), Pemeriksaan Pajak ( $X_2$ ), Penagihan Pajak ( $X_3$ ), dan Kesadaran Wajib Pajak ( $X_4$ ), terhadap Penerimaan Pajak ( $Y$ )

#### 4.6. Pembahasan

##### 4.6.1. Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak

Hasil analisis diketahui secara statistik nilai  $t_{hitung}$  variabel Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP sebesar 1,731 sedangkan besarnya nilai  $t_{tabel}$  dengan tingkat keyakinan 95% atau ( $\alpha : 0,05$ ) adalah 1,66462 karena  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka HI ditolak, yang berarti penerapan Kewajiban Kepemilikan NPWP tidak mempunyai pengaruh terhadap Penerimaan Pajak.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya NPWP merupakan suatu sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. NPWP juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam membayar pajak dan pengawasan administrasi perpajakan. Sehingga bagi wajib pajak yang telah memiliki NPWP diharuskan membayar pajak terutang.

##### 4.6.2. Pengaruh Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak

Hasil analisis diketahui secara statistik nilai  $t_{hitung}$  variabel Pengaruh

Pemeriksaan Pajak sebesar 2,487 sedangkan besarnya nilai  $t_{tabel}$  dengan tingkat keyakinan 95% atau ( $\alpha : 0,05$ ) adalah 1,66462 karena  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka HII diterima, yang berarti penerapan Pemeriksaan Pajak mempunyai pengaruh terhadap Penerimaan Pajak. Semakin banyak Pemeriksa Pajak melakukan pemeriksaan pajak maka Penerimaan Pajak akan semakin meningkat.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya maka Pemeriksaan Pajak menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan.

##### 4.6.3. Pengaruh Penagihan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak

Hasil analisis diketahui secara statistik nilai  $t_{hitung}$  variabel Pengaruh Penagihan Pajak sebesar 2,608 sedangkan besarnya nilai  $t_{tabel}$  dengan tingkat keyakinan 95% atau ( $\alpha : 0,05$ ) adalah 1,66462 karena  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka HIII diterima, yang berarti penerapan Penagihan Pajak mempunyai pengaruh terhadap Penerimaan Pajak. Semakin Penagihan Pajak itu dilakukan maka Penerimaan Pajak semakin meningkat.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya maka Penerimaan Pajak bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

##### 4.6.4. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak

Hasil analisis diketahui secara statistik nilai  $t_{hitung}$  variabel Pengaruh

Kesadaran Wajib Pajak sebesar 1,969 sedangkan besarnya nilai  $t_{tabel}$  dengan tingkat keyakinan 95% atau ( $\alpha : 0,05$ ) adalah 1,66462 karena  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka HVI diterima, yang berarti penerapan Kesadaran Wajib Pajak mempunyai pengaruh terhadap Penerimaan Pajak. Semakin banyak Kesadaran Wajib Pajak itu dilakukan maka Penerimaan Pajak semakin meningkat.

Sesuai tugas dan fungsinya maka Kesadaran Wajib Pajak sebagai pembiayaan negara dan kesadaran membayar pajak sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Maka masyarakat sebagai wajib pajak aktif harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara yang selalu menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan Negara.

## **5. KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN KETERBATASAN PENELITIAN**

### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan untuk menguji Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak. Responden penelitian ini berjumlah 82 orang pegawai pajak (fiskus) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di wilayah Ambon. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan proses pengujian yang telah dilakukan terhadap permasalahan dengan menggunakan model regresi berganda, maka pengujian dapat menarik kesimpulan bahwa Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak sedangkan Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak.

### **5.2. Keterbatasan Penelitian**

1. Jumlah sampel yang diteliti terbatas pada pegawai KPP Pratama Ambon pada bagian ke bagian Seksi Pelayanan Pajak sebanyak 17 pegawai, Seksi Pemeriksaan Pajak sebanyak 20 pegawai, Seksi Penagihan Pajak sebanyak 7 pegawai, Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan (bagi wajib pajak yang belum mengetahui) sebanyak 10 pegawai, dan di Seksi Pengawasan dan Konsultasi (bagi wajib pajak yang sudah mengetahui) sebanyak 28 pegawai
2. Variabel Independen hanya meliputi Kewajiban Kepemilikan NPWP ( $X_1$ ), Pemeriksaan Pajak ( $X_2$ ), Penagihan Pajak ( $X_3$ ), dan Kesadaran Wajib Pajak ( $X_4$ ) dalam mempengaruhi Variabel dependen yaitu Penerimaan Pajak ( $Y$ ).

### **5.3 Implikasi**

Model teoritis yang dikembangkan dan diuji dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman kita tentang Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak yang mempengaruhi Penerimaan Pajak. Hasil penelitian ini memiliki beberapa implikasi penting bagi masyarakat khususnya wajib pajak dan petugas pajak (fiskus).

Proses dari Penerimaan Pajak disarankan kepada KPP Pratama Ambon agar lebih giat lagi dalam mensosialisasikan perpajakan melalui iklan atau artikel-artikel yang mudah dipahami untuk menjelaskan sistem perpajakan bagi wajib pajak agar menjadi wajib pajak yang aktif dan berguna bagi proses pendapatan negara dan tidak terjadi tunggakan

atau hutang pajak dari wajib pajak tersebut.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, Rika. 2007. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi di kawasan Sidoarjo Barat tidak Mengisi Sendiri SPT Tahunannya. *Universitas Kristen Petra : Fakultas Ekonomi Bisnis*.
- Budi, Rina, dan Rita Andini. 2016. "Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Semarang), *Journal Of Accounting, Volume 2 No.2*
- Casavera. 2009. "Perpajakan", Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Diana Sari. 2013. Konsep Dasar Perpajakan. PT Refika Aditama.
- Foukhone. 2007. "Optimalisasi Penerimaan Pajak Melalui Pembenahan Sistem Administrasi Pajak".
- Ghozali, Imam. 2007, Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Ginting, Riskon. 2006. "Pengaruh Pemberian Surat Penagihan terhadap Pembayaran Tunggal Pajak Penghasilan". *Jurnal Ekonomi & Bisnis, Vol.5, No.1*.
- Hutagaol, Jhon. 2007. Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak, *Jurnal Akuntansi, Vol. 6(2): h :186-193*.
- Manik Asri. 2009. Pengaruh Kualitas Pelayanan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar. *Skripsi Jurusan Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Udayana*.
- Mardiasmo. 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana *Good Governance. Jurnal Akuntansi Pemerintahan, 2: 1. (1-17)*.
- Mardiasmo. 2009, "Perpajakan", Edisi Revisi, Andi, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2011 .Perpajakan Edisi Revisi 2011 .Yogyakarta:Penerbit Andi.
- Muliari, N.K. dan Setiawan P.E. 2010. Pengaruh Persepsi tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Fakultas Ekonomi Universitas Udayana*
- Pamber, Satria. 2016. "Pengaruh Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan)".
- Saragih, Wiranata. 2017. " Pengaruh Kepemilikan NPWP dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan (Study Kasus Pada KPP Ptarama Majalaya 2011-2015), *E-jurnal Akuntansi Universitas Komputer Indonesia 2017*.
- Savira Warlina, Syamsul Bahri Arifin, S.E, M.Ak<sup>2</sup>. (2016). " Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak ( Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat). *Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis Vol, 16No. 1, ISSN : 1693-7597*.

- Setiawan, Deddy Arief. 2007. "Analisis Hubungan antara Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Surat Setoran Pajak dengan Penerimaan Pajak (Studi kasus pada KPP Jakarta Palmerah)", Media Riset Akuntansi, Auditing dan Informasi, Vol.7, No.1.
- Siti Kurnia Rahayu. 2010, PERPAJAKAN INDONESIA: Konsep dan Aspek Formal, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suandy, Early. 2008. "Perpajakan", Salemba Empat, Jakarta.
- Sugiyono. 2009. "Metode Penelitian Bisnis", Cetakan ke-13, Alfabeta cv, Bandung.
- Sukirman. 2011. "Pengaruh Manajemen Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak", Analisis Manajemen, Vol.5, No.1.
- Sumarsan, Thomas. 2010. "Perpajakan Indonesia (Pedoman Perpajakan yang Lengkap Berdasarkan Undang-undang Terbaru)", Indeks, Jakarta.
- Sri, Y. Pudyatmoko, 2009, Pengantar Hukum Pajak, Penerbit Andi Edisi Terbaru, Yogyakarta.
- Susi Rudiati. 2016. Pengaruh pemahaman akuntansi dan ketentuan perpajakan serta transparansi dalam pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Universitas Muhammadiyah.
- Tansuria, Billy Ivan. 2010. "Pokok-pokok Ketentuan Umum Perpajakan (KUP)", Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Waluyo. 2009, "Perpajakan Indonesia", Salemba Empat, Jakarta.
- Waluyo. 2011. Perpajakan Indonesia Edisi 10 Buku 1. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- <https://timdata.wordpress.com/2014/05/19/format-penulisan-npwp/>, artikel tersebut diakses tanggal 19 Mei 2014, pada pukul 11:12 AM
- <https://www.medcom.id/ekonomi/analisa-ekonomi/3NOEae0k-penerimaan-pajak-masih-jadi-pr-pemerintah/>, artikel tersebut diakses tanggal 03 Januari 2018 pada pukul 18:41

# **Pengaruh *Corporate Social Responsibility (CSR)*, *Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO)*, Dan *Return On Investment (ROI)* Terhadap Harga Saham Perusahaan Pada Sektor Perkebunan yang Terdaftar di BEI Periode 2014 – 2018**

Yustus Sangur

*Program Studi Ekonomi Pasca Sarjana, Universitas Pattimura*

---

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan menguji secara empiris pengaruh *Corporate Social Responsibility (CSR)*, *Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO)*. *Return On Investment (ROI)* terhadap Harga Saham Perusahaan Pada Sektor Perkebunan yang Terdaftar di BEI Periode 2014 – 2018.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan dan laporan keberlanjutan. Jumlah sampel penelitian sebanyak 65 sampel. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dilanjutkan uji asumsi klasik. Pengujian hipotesis menggunakan teknik analisis regresi berganda.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang diukur dengan GRI (*Global Reporting Initiative*) dalam pengungkapan CSR berpengaruh signifikan terhadap harga saham. (2) *Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO)* yang diukur dengan prinsip dan kriteria Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 11 Tahun 2015 tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. (3) *Return On Investment (ROI)* tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham.

**Kata Kunci:** *Corporate Social Responsibility (CSR)*, *Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO)*, *Return On Investment (ROI)*, dan Harga Saham.

## **ABSTRACT**

*This study aims to test empirically the effect of Corporate Social Responsibility (CSR), the Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO). Return On Investment (ROI) to Company Stock Prices in the Estate Sector Listed on the IDX for the 2014 - 2018 Period.*

*This study uses secondary data obtained from annual reports and sustainability reports. The number of research samples was 65 samples. The data analysis used was descriptive analysis followed by the classical assumption test. Hypothesis testing uses multiple regression analysis techniques.*

*The research results show that (1) Corporate Social Responsibility (CSR) as measured by the GRI (Global Reporting Initiative) in CSR disclosure has a significant effect on stock prices. (2) Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO) as measured by the principles and criteria of the Regulation of the Minister of Agriculture of the Republic of Indonesia No. 11 of 2015 has no*



*significant effect on stock prices. (3) Return on investment (ROI) has no significant effect on stock prices.*

**Keywords:** *Corporate Social Responsibility (CSR), Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO), Return On Investment (ROI), and Stock Prices.*

---

## 1. PENDAHULUAN

Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas unggulan yang memberikan kontribusi penting pada pembangunan ekonomi Indonesia, khususnya pada pengembangan Agroindustri. Sejak 2006 Indonesia telah menjadi produsen minyak sawit terbesar di dunia. Bersama dengan Malaysia, Indonesia menguasai hampir 90% produksi minyak sawit dunia (Hanafi Sofyan dalam Hilmi, 2017).

Namun, Pada tahun 2018 menjadi tahun yang sulit bagi industri minyak kelapa sawit akibat penurunan harga di pasar internasional yang berdampak pada kinerja keuangan yang menurun pada awal tahun 2018 (Chiew Sin Cheok Presiden Komisaris PT Astra Agro Lestari Tbk dalam Annual Report AALI 2018:18).

Sejalan dengan kemampuan perusahaan menghasilkan laba, pergerakan harga saham menjadi indikator keberhasilan perusahaan dalam pengelolaan sumber dayanya artinya semakin tinggi harga saham, maka semakin tinggi pula nilai perusahaan tersebut dan sebaliknya (Jogiyanto dalam Ningsih, 2016).

Trend penurunan harga saham Perusahaan Kelapa Sawit mulai menurun sejak bulan April tahun 2017 hingga tahun 2018. Trend penurunan harga saham Perusahaan Kelapa Sawit ini diduga sebagai akibat dari Renewable Energy Directives II (RED II) atau resolusi sawit dan pelanggaran biodiesel berbasis sawit yang dikeluarkan oleh Parlemen Uni Eropa pada bulan April 2017, karena dinilai masih menciptakan banyak masalah terutama masalah deforestasi

(Nugraha & Saturi, 2017)<sup>9</sup>. Data menunjukkan bahwa terdapat kaitan antara kelapa sawit dan tingkat deforestasi tertinggi yang berujung pada kehancuran hutan, lahan gambut (peatlands) dan lahan basah (wetlands) serta menghasilkan emisi gas rumah kaca secara terus-menerus (Siaran Pers. 2019).

Kinerja keuangan perusahaan kelapa sawit yang menurun memberikan signal buruk bagi investor tentang kemampuan perusahaan menghasilkan laba, sehingga perlu dianalisa menggunakan rasio keuangan. Return On Investment (ROI) merupakan salah satu rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur efektivitas operasi perusahaan dalam menghasilkan laba menggunakan aktivasinya. Munawir dalam Isyani (2015: 21) menjelaskan Return On Investment (ROI) sebagai salah satu kegunaan yang prinsipil ialah sifatnya yang menyeluruh. Apabila perusahaan sudah menjalankan praktik akuntansi dengan baik maka manajemen dengan menggunakan teknik analisis Return On Investment (ROI) dapat mengukur efisiensi penggunaan modal kerja, efisiensi produk dan efisiensi penjualan.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah : Apakah ada pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Harga Saham Perusahaan Pada Sektor Perkebunan yang Terdaftar di BEI Periode 2014 – 2018 ?, Apakah ada pengaruh Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO), terhadap Harga Saham Perusahaan Pada Sektor Perkebunan yang Terdaftar di BEI Periode 2014 – 2018 ?, Apakah ada pengaruh Return On Investment (ROI)

terhadap Harga Saham Perusahaan Pada Sektor Perkebunan yang Terdaftar di BEI Periode 2014 – 2018 ?

## 2. TELAHAH LITERATUR DAN PERUMUSAN

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam Solihin (2018: 181) bahwa: “Kinerja perusahaan dapat diukur dengan menganalisa dan mengevaluasi laporan keuangan. Informasi posisi keuangan dan kinerja keuangan di masa lalu seringkali digunakan sebagai dasar untuk memprediksi posisi keuangan dan kinerja di masa depan dan hal-hal lain yang langsung menarik perhatian pemakai seperti dividen, upah, pergerakan harga sekuritas dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi komitmennya”.

Konsep kinerja keuangan menurut Indriyo Gitosudarmo dan Basri dalam Kurniawati (2012: 11) adalah rangkaian aktivitas keuangan pada suatu periode tertentu yang dilaporkan dalam laporan keuangan diantaranya laporan laba rugi dan neraca. Menurut Irhan Fahmi dalam Kurniawati (2012: 11) kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar.

Pada penelitian ini untuk mengukur Kinerja keuangan maka menggunakan harga saham sebagai proxynya. Harga saham yang dimaksudkan yaitu harga saham saat penutupan (closing price) setiap bulannya pada setiap perusahaan sektor perkebunan kelapa sawit yang diteliti.

Menurut Mulyadi (2001:440) dalam Permadi (2013:3) adalah “merupakan perbandingan laba dengan investasi yang digunakan untuk menghasilkan laba”. Sedangkan menurut Simamora (2002:280), “Return on Investment atau yang juga disebut dengan tingkat imbalan atas

investasi adalah laba operasi bersih dibagi investasi dalam aset yang digunakan untuk meraup laba bersih”.

Analisis Du Pont menggabungkan rasio-rasio aktivitas dan profit margin, dan menunjukkan bagaimana rasio-rasio tersebut berinteraksi untuk menentukan profitabilitas aktiva-aktiva yang dimiliki perusahaan. Jika rasio perputaran dikalikan dengan margin laba penjualan, hasilnya adalah tingkat pengembalian aktiva (ROA) atau sering disebut juga tingkat pengembalian investasi (ROI) (Sawir, 2005:28). Return On Investment (ROI) metode Du Pont adalah satu bentuk dari rasio profitabilitas yang dimaksudkan untuk dapat mengukur kemampuan perusahaan dengan keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktiva yang digunakan untuk operasinya perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Besarnya Return On Investment (ROI) dipengaruhi oleh dua faktor :

1. Tingkat perputaran aktiva yang digunakan untuk operasi.
2. Profit Margin, yaitu besarnya keuntungan operasi yang dinyatakan dalam prosentase dan jumlah penjualan bersih

Sedangkan menurut Kasmir (2010:139) Return On Investment (ROI) merupakan analisis rasio keuangan yang menunjukkan hasil (Return) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan atau suatu ukuran tentang efisiensi manajemen. Rasio ini menunjukkan hasil dari seluruh aktiva yang dikendalikannya dengan mengabaikan sumber pendanaan dan biasanya rasio ini diukur dengan persentase (Wordpress.com. 2015). Perhitungan Return On Investment (ROI) dengan menggunakan analisis Du Pont System sebagai berikut:

1. Assets Turn Over

Assets Turn Over merupakan salah satu rasio aktivitas. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mengelola seluruh asset/investasi untuk menghasilkan penjualan atau Digunakan untuk

mengetahui efektifitas perusahaan di dalam menggunakan aktiva yang dimiliki..

$$\text{Assets Turn Over} = \frac{\text{Penjualan}}{\text{Total Aktiva}}$$

Sumber: (Hanafi, 2010:120 dalam Pebriandana 2014:3)

### 2. Net Profit Margin (Return On Sales)

Net Profit Margin (return on sales) merupakan salah satu rasio profitabilitas. Rasio yang membandingkan antara laba bersih sesudah pajak dengan penjualan. Semakin tinggi Net Profit Margin (NPM) semakin baik operasi suatu perusahaan. Rasio ini dapat dihitung dengan formula:

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Penjualan}}$$

Sumber: (Hanafi, 2010:42 dalam Pebriandana 2014:3)

### 3. Return On Investment (ROI) dalam Du Pont Formula

Return On Investment (ROI) merupakan analisis analisis rasio yang menggambarkan kondisi profitabilitas perusahaan. Berikut ini disajikan hasil dari analisis Return On Investment (ROI) dengan Du Pont System Formula

ROI

= Net Profit Margin x Total Assets Turnover  
Atau

$$\text{ROI} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Penjualan}} \times \frac{\text{Penjualan}}{\text{Total Aktiva}}$$

Sumber: (Hanafi, 2010:42 dalam Pebriandana 2014:4)

Semakin rendah Return On Investment (ROI), maka semakin rendah tingkat efektivitas dari keseluruhan operasi perusahaan (Kasmir, 2016:202 dalam Alfiah, 2018: 149).

Disamping kelebihan/kegunaan dari analisis Return On Investment (ROI) terdapat kelemahan-kelemahan Return On Investment (ROI) yaitu

sebagai berikut:

1. Salah satu kelemahan yang prinsipil ialah kesukaran dalam membandingkan Rate of Return suatu perusahaan dengan perusahaan lain yang sejenis, mengingat bahwa praktek akuntansi yang digunakan masing-masing perusahaan tersebut adalah berbeda-beda. Perbedaan metode dalam penilaian berbagai aktiva antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain, perbandingan tersebut akan memberikan gambaran yang salah.
2. Kelemahan lain terletak adanya fluktuasi nilai dari uang (daya beli) suatu mesin atau perlengkapan tertentu yang dibeli dalam keadaan inflasi nilainya berbeda dengan kalau beli pada waktu tidak terjadi inflasi dan hal ini akan berpengaruh dalam menghitung investment dan profit margin.
3. Analisa Return On Investment (ROI) tidak dapat digunakan untuk mengadakan perbandingan antara dua perusahaan atau lebih. Return On Investment (ROI) diperoleh dari dua ratio yang masing-masing mengandung unsur penjualan dimana penganalisa tidak mengetahui sebab terjadinya perubahan dalam penjualan tersebut.

Pada penelitian ini untuk mengukur Return On Investment (ROI) dengan menggunakan rumus modifikasi Du Pont. Pada sistem ini terdapat gabungan rasio aktivitas (perputaran aktiva) dengan rasio laba (profit margin atas penjualan) dan bagaimana keduanya dapat berinteraksi untuk menentukan besarnya nilai Return On Investment (ROI) pada suatu perusahaan. Metode sistem Du Pont ini digunakan peneliti untuk menilai kinerja keuangan perusahaan pada sektor perkebunan kelapa sawit yang terdiri dari tiga

langkah: (1) Menentukan Total Perputaran Aset (2) Margin Laba Bersih (3) Pengembalian Investasi (ROI).

Menurut Alfred pakasi (2009:11) komoditas adalah barang dagangan atau bahan yang memiliki nilai ekonomis yang ditawarkan atau disediakan oleh produsen untuk memenuhi keinginan konsumen. Komoditas memiliki peran penting sebagai salah satu penunjang pergerakan perekonomian karena dibutuhkan dalam proses produksi, sehingga hal tersebut menjadikannya alternative investasi yang aman dan menguntungkan.

Saham yang masuk dalam list BEI akan ditempatkan pada sektor yang sesuai dengan bidang yang dikerjakan oleh perusahaan tersebut. Salah satu sektor yang ada di BEI adalah sektor perkebunan dimana perusahaan yang masuk dalam sektor tersebut merupakan perusahaan yang berhubungan dengan kelapa sawit atau komoditas. Kinerja perusahaan tersebut tentu sangat dipengaruhi oleh jumlah produksi serta harga komoditas yang dijual di pasar. Semakin tinggi harga komoidtas yang dijual maka semakin tinggi earning yang didapatkan. Hal ini tentu aan mempengaruhi harga saham perusahaan tersebut dan jika pergerakan yang ada terjadi serentak maka akan memberikan pengaruh positif pada pergerakan IHSG (Manurung, 2008:1 dalam Martono, 2010: 22-23).

Pengusahaan kelapa sawit di Indonesia terdiri dari tiga bentuk utama, yaitu perkebunan rakyat, perkebunan besar swasta, dan perkebunan besar negara. Bentuk lain dari pengusahaan kelapa sawit dikenal dengan PIR (Perusahaan Inti Rakyat), yang pada dasarnya merupakan bentuk gabungan antara perkebunan rakyat dengan perkebunan besar negara atau dengan perkebunan besar swasta.

## 2.1. Pengembangan Hipotesis

*Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Harga Saham Perusahaan Pada Sektor Perkebunan yang terdaftar di BEI Periode 2014 – 2018*

Kepedulian terhadap lingkungan hidup merupakan salah satu prioritas perusahaan dalam keberlangsungan kegiatan produksinya. Selain menjalankan fungsinya untuk memperoleh profit, perusahaan diwajibkan memperhatikan dan melestarikan lingkungan terkhususnya lingkungan yang terkena dampak dari proses produksinya. Wujud pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan kepada masyarakat dikenal dengan Corporate Social Responsibility (CSR). Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan suatu konsep terintegrasi yang menggabungkan aspek bisnis dan sosial dengan selaras agar perusahaan dapat membantu tercapainya kesejahteraan para pemegang kepentingan (stakeholders), serta dapat mencapai profit maksimum sehingga dapat meningkatkan harga saham (Tarigan, 2013).

Hal ini didukung dengan penelitian terdahulu Liliana Nicoleta, dkk (2018) yang menunjukkan sebuah hubungan positif antara Corporate Social Responsibility (CSR) dan kinerja keuangan perusahaan, ketika perusahaan menerapkan kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) mengenai karyawan, perlindungan lingkungan, etika sebagai praktik sosial. Raluca Miruna, dkk (2016) menunjukkan hubungan yang positif secara statistik signifikan antara tanggung jawab perusahaan dan kinerja sosial, melihat bahwa keuangan mendukung kinerja perusahaan yang bertanggungjawab secara sosial dapat dikaitkan dengan serangkaian manfaat bottom-line. Dan Anis Fitriani (2013) menunjukkan kinerja lingkungan dan biaya lingkungan berpengaruh secara simultan terhadap kinerja keuangan.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan diatas maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah

**H1 : Corporate Social Responsibility (CSR) berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham Perusahaan Pada Sektor Perkebunan yang terdaftar di BEI Periode 2014 - 2018**

*Pengaruh Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO) terhadap Harga Saham Perusahaan Pada Sektor Perkebunan yang terdaftar di BEI Periode 2014 – 2018*

Pemerintah Indonesia berupaya meminimalkan kerusakan lingkungan, maka diwajibkan setiap perusahaan kelapa sawit harus memiliki Sertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO) dengan tujuan meningkatkan daya saing produk Crude Palm Oil (CPO) dan membuktikan ikut berpartisipasi mengurangi gas rumah kaca. Hal ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO) pada pasal 2 (Permentan. 2015)32.

Dengan adanya sertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO) maka Crude Palm Oil (CPO) dapat diterima di pasar internasional dan meningkatkan daya saing, karena telah memperoleh sertifikat yang membuktikan bahwa proses produksi yang dijalankan menghindari dan mengurangi dampak pengrusakan lingkungan, emisi gas rumah kaca, hingga pemicu deforestasi (Eva Martha Rahayu. 2013)28.

Hal ini dibuktikan melalui penelitian terdahulu oleh Ariance Valentina Hia & Natasya Kusumawardani (2016) yang menunjukkan bahwa prinsip dan kriteria yang terdapat dalam ISPO memenuhi kriteria sustainable biofuels sebagaimana yang terdapat dalam EU RED. Keduanya memiliki

tujuan yang sama mengenai kriteria sustainable palm oil. Terlebih lagi, Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO) memberikan efek yang baik terhadap permintaan ekspor minyak kelapa sawit Indonesia ke UE. Dengan demikian, Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO) memiliki potensi yang besar untuk dapat mencapai tujuan dari sustainable palm oil dan meningkatkan ekspor minyak kelapa sawit Indonesia ke Eropa di masa depan. Melalui kepemilikan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO) diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen pada pasar internasional sehingga tingkat penjualan meningkat dan berdampak pada kenaikan harga saham. Berdasarkan pernyataan-pernyataan diatas maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

**H2 : Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO) berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham Perusahaan Pada Sektor Perkebunan yang terdaftar di BEI Periode 2014 – 2018**

*Pengaruh Return On Investment (ROI) terhadap Harga Saham Perusahaan Pada Sektor Perkebunan yang terdaftar di BEI Periode 2014 – 2018*

Perusahaan kelapa sawit juga perlu melakukan penilaian terhadap kinerja keuangan, guna memberikan informasi tentang kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bagi investor. Return On Investment (ROI) merupakan salah satu rasio pengukuran kinerja yang biasa dilakukan untuk mengukur efisiensi tindakan-tindakan yang dilakukan dan profitabilitas dari masing-masing produk yang dihasilkan oleh perusahaan, selain itu berguna juga untuk kontrol dan perencanaan dalam pengambilan keputusan oleh pimpinan. Hal ini semata-mata meningkatkan kinerja perusahaan sehingga harga saham dapat meningkat.

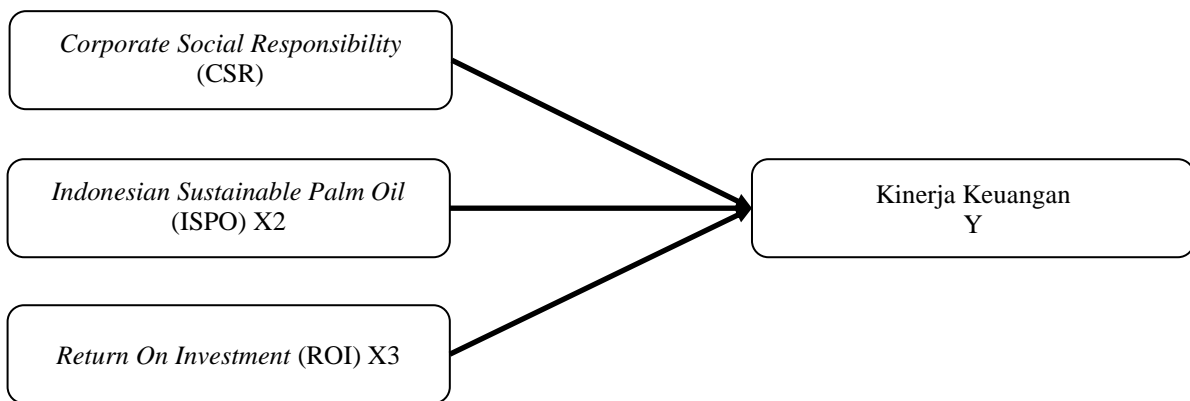
Hal ini didukung dengan penelitian terdahulu oleh Denies Priatinah (2012) yang menunjukkan bahwa Return on Investment secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Harga Saham. Dan M. Taufiq Noor Rokhman (2017) menunjukkan secara parsial dan bersama-sama Return On Investment (ROI) dan Earnings Per Share (EPS) memiliki pengaruh signifikan terhadap saham perusahaan. Berdasarkan pernyataan-pernyataan diatas maka

hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

**H3 : Return On Investment (ROI) berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham Perusahaan Pada Sektor Perkebunan yang terdaftar di BEI Periode 2014 - 2018**

## 2.2. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan telaah teori hipotesis yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti membuat kerangka konseptual sebagai berikut:



## 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian kausal komparatif, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih, yaitu variabel independen terhadap variabel dependen (Sugiyono, 2013 dalam Dityarukmana. 2018: 49).

### 3.1. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek/objek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya Sugiyono (2013: 80 dalam Dityarukmana. 2018: 53)39. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh

perusahaan pada sektor perkebunan kelapa sawit (CPO) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-201843.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut:

1. Perusahaan tetap aktif di BEI dari tahun 2014 sampai dengan 2018
2. Perusahaan tergolong dalam subsektor perkebunan perusahaan kelapa sawit
3. Selama periode penelitian, perusahaan mengeluarkan laporan keuangan tahunan dari tahun 2014 – 2018

Berdasarkan kriteria diatas maka diperoleh perusahaan-perusahaan kelapa sawit yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah

**Tabel 3.1 Sampel Perusahaan – Perusahaan Kelapa Sawit**

No	Kode Saham	Nama Perusahaan
1	AALI	PT Astra Agro Lestari Tbk
2	BWPT	PT Eagle High Plantations Tbk
3	GZCO	PT Gozco Plantations Tbk
4	JAWA	PT Jaya Agra Wattie Tbk
5	LSIP	PT London Sumatra Indonesia Tbk
6	SGRO	PT Sampoerna Agro Tbk
7	SMAR	PT Sinar Mas Agro Resources & Technology Tbk
8	TBLA	PT. Tunas Baru Lampung Tbk

Sumber : Data Sekunder 2019

### 3.2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder (secondary data). Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data yang digunakan yaitu laporan keuangan tahunan dari setiap perusahaan yang merupakan sampel penelitian tahun 2014-2018 dan harga saham. Data yang dibutuhkan peneliti adalah: Laporan Tahunan Perusahaan (Annual Report), Laporan Keberlanjutan Perusahaan (Sustainability Report), Kepemilikan Sertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), Nilai Return On Investment (ROI) dan Harga Saham.

### 3.3. Variabel Penelitian

#### 3.3.1. Variabel Independen

Variabel independen atau yang biasa disebut dengan variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen (variabel terikat) (Sugiyono, 2013: 39 dalam

Dityarukmana. 2018: 50)39. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Corporate Social Responsibility (CSR), Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), Return On Investment (ROI).

Corporate Social Responsibility (CSR) menurut Wineberg dan Rudolph (2004:72) dalam Tanudjaja (2006:93) adalah: "The contribution that a company makes in society through its core business activities, its social investment and philanthropy programs, and its engagement in public policy". Variable Corporate Social Responsibility (CSR) pada penelitian ini diukur menggunakan CSRIj atau indeks luas pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sebagai proxynya. Pengukuran pengungkapan CSR dilakukan dengan cara mengamati dan memberikan skor (bentuk angka 0-4/skala likter) terhadap laporan tahunan perusahaan (annual report) dan laporan keberlanjutan perusahaan (sustainability report) yang berdasarkan standar indeks Global Reporting Initiative G4 dalam kategori lingkungan

**Tabel 3.3.1 Skala Likter Terhadap Indikator Pengungkapan CSR**

Skor	Keterangan
0	Perusahaan tidak memberikan penjelasan untuk indicator
1	Perusahaan hanya menyebutkan indicator tanpa adanya penjelasan
2	Perusahaan menyebutkan indicator dan memberikan penjelasan secara singkat
3	Perusahaan menyebutkan indicator dan memberikan penjelasan dengan beberapa detail atau rincian
4	Perusahaan menjelaskan indicator secara lengkap dan rinci

Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO) adalah suatu kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Pertanian dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar dunia dan ikut berpartisipasi dalam rangka memenuhi komitmen Presiden Republik Indonesia untuk mengurangi gas rumah kaca serta memberi perhatian terhadap masalah lingkungan. Pada penelitian ini untuk mengukur Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) maka menggunakan prinsip dan kriteria kelapa sawit berkelanjutan Indonesia (Indonesian

Sustainable Palm Oil/ISPO) untuk perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan terintegrasi dengan usaha pengolahan dan energy terbarukan sebagai proxy-nya. Pengukuran pengungkapan ISPO dilakukan dengan cara mengamati dan memberikan skor (bentuk angka 0-4/skala likter) terhadap laporan tahunan perusahaan (annual report) dan laporan keberlanjutan perusahaan (sustainability report) yang berdasarkan prinsip dan kriteria pada Lampiran II Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No 11 Tahun 2015.

**Tabel 3.3.2 Skala Likter Terhadap Indikator Pengungkapan CSR**

Skor	Keterangan
0	Perusahaan tidak memberikan penjelasan untuk indicator
1	Perusahaan hanya menyebutkan indicator tanpa adanya penjelasan
2	Perusahaan menyebutkan indicator dan memberikan penjelasan secara singkat
3	Perusahaan menyebutkan indicator dan memberikan penjelasan dengan beberapa detail atau rincian
4	Perusahaan menjelaskan indicator secara lengkap dan rinci

Return On Investment (ROI) menurut Mulyadi (2001:440) dalam Permadi (2013: 3) adalah “merupakan perbandingan laba dengan investasi yang digunakan untuk menghasilkan laba”<sup>34</sup>. Pada penelitian ini untuk mengukur Return On Investment (ROI) dengan menggunakan rumus modifikasi Du Pont. Metode ini terdiri dari tiga langkah:

1. Menentukan Total Perputaran Aset

$$\text{Assets Turn Over} = \frac{\text{Penjualan}}{\text{Total Aktiva}}$$

Sumber: (Hanafi, 2010:120 dalam Pebriandana 2014: 3)

2. Margin Laba Bersih

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Penjualan}}$$

Sumber: (Hanafi, 2010:42 dalam Pebriandana 2014: 3)

3. Pengembalian Investasi atau Return On Investment (ROI)



ROI

= *Net Profit Margin x Total Assets Turnover*

Sumber: (Hanafi, 2010:42 dalam Pebriandana 2014: 3)

### 3.3.2. Variabel Dependen

Variabel dependen sering juga disebut dengan variabel terikat, yaitu variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2013: 39 dalam Dityarukmana. 2018: 50-51)39. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan perusahaan pada sektor perkebunan kelapa sawit (CPO) yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018.

Menurut Irhan Fahmi (2011: 2) kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Pada penelitian ini untuk mengukur kinerja keuangan maka menggunakan harga saham sebagai proxynya. Harga saham yang dimaksudkan yaitu harga saham saat penutupan (closing price) setiap bulannya pada setiap perusahaan sektor perkebunan kelapa sawit yang diteliti.

## 3.4. Teknik Analisis Data

### 3.4.1. Metode Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisa data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2013:147 dalam Dityarukmana. 2018: 57).

### 3.4.2. Asumsi Klasik

Sebelum pengujian hipotesis dilakukan, terlebih dahulu perlu dilakukan pengujian terhadap gejala penyimpangan asumsi klasik. Asumsi model linear klasik adalah tidak terdapat multikolinieritas,

autokorelasi, dan heteroskedastitas. Cara pengujian gejala penyimpangan asumsi klasik adalah sebagai berikut:

#### a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi, variabel dependen, variabel independen atau keduanya memiliki distribusi data yang normal/tidak, uji yang dipakai adalah Kolmogorov-Smirnov. Menurut Singgih Santoso (2012:293) dalam Anggraeni (2015: 84) dasar pengambilan keputusan bisa dilakukan berdasarkan probabilitas (Asymtotic Significance), yaitu:

- Jika probabilitas > 0,05 maka distribusi dari model regresi adalah normal.
- Jika probabilitas < 0,05 maka distribusi dari model regresi adalah tidak normal45.

#### b. Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas adalah suatu hubungan linear yang sempurna (mendekati sempurna) antara beberapa atau semua variabel bebas (Kuncoro, 2007 dalam Sari 2013: 55)43. Uji Multikolinieritas adalah situasi adanya korelasi variabel-variabel bebas diantara satu dengan yang lainnya.

Uji multikolinieritas dapat dilihat dari Variance Inflation Factor (VIF) dan nilai Tolerance. Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jika terbukti ada multikolinieritas, sebaiknya salah satu independen yang ada dikeluarkan dari model, lalu pembuatan model regresi diuang kembali (Singgih Santoso, 2010: 234 dalam Anggraeni 2015: 85)45. Pedoman suatu model regresi yang bebas multikolinieritas adalah mempunyai angka tolerance mendekati 1. Batas VIF adalah 10, jika nilai VIF dibawah 10, maka tidak terjadi gejala multikolinieritas (Gujarati, 2012:432 dalam Anggraeni 2015: 85)45.

#### c. Uji Heteroskedastitas

Situasi heteroskedastisitas akan

menyebabkan penaksiran koefisien-koefisien regresi menjadi tidak efisien dan hasil taksiran dapat menjadi kurang atau melebihi dari yang semestinya. Dengan demikian, agar koefisien-koefisien regresi tidak menyesatkan, maka situasi heteroskedastisitas tersebut dihilangkan dari model regresi. Adapun untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas yaitu dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot. (Singgih Santoso, 2000:210 dalam Marliah. 2016: 79)46.

#### **d. Uji Autokorelasi**

Menurut Algifari (2000) dalam Sari (2013: 55), penyimpanan model regresi klasik salah satunya adalah adanya auto korelasi dalam model regresi. Artinya, adanya korelasi antara anggota sampel yang diurutkan berdasarkan waktu. Penyimpangan ini biasanya muncul pada observasi yang menggunakan data time series.

Untuk mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi dapat dilakukan dengan uji Durbin Watson dengan ketentuan sebagai berikut (C.Trihendradi,2011:166 dalam Lelyana 2014: 45)44 :

- $1,65 < DW < 2,35$  tidak terjadi autokorelasi
- $1,21 < DW < 1,65$  atau  $2,35 < DW < 2,79$  tidak dapat disimpulkan
- $DW < 1,21$  atau  $DW > 2,79$  terjadi autokorelasi

#### **3.4.3. Analisis Regresi Linier Berganda**

Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen dengan variabel dependen. Analisis regresi linier berganda bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediator dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya) (Sugiyono. 2014:277 dalam

Anggraeni 2015: 87). Jadi rumus regresi linear berganda:

$$y = a + \beta_1 CSR + \beta_2 ISPO + \beta_3 ROI + \epsilon$$

Keterangan Y	:	Kinerja Keuangan
A	:	Konstanta
$\beta_1$ ,	:	Koefisien Regresi
$\beta_2$ ,	:	
$\beta_3$	:	
X <sub>1</sub>	:	Corporate Social Responsibility (CSR)
X <sub>2</sub>	:	Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO)
X <sub>3</sub>	:	Return On Investment (ROI)

#### **3.4.4. Pengujian Hipotesis**

Setelah dilakukan uji asumsi klasik terhadap data, selanjutnya dilakukan uji hipotesis. Untuk membuktikan hipotesis pertama sampai dengan hipotesis keempat maka digunakan alat uji sebagai berikut:

Uji Koefisien Determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel bebas menjelaskan variabel terikat yang dilihat melalui Adjust R. Semakin besar angka R<sup>2</sup> maka semakin baik model yang digunakan untuk menjelaskan hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat. Jika R<sup>2</sup> semakin kecil berarti semakin lemah model tersebut untuk menjelaskan dari variabel terikatnya (Supranto. 2005: 75 dalam Rijal. 2017: 66)47.

Uji t, dengan maksud untuk menguji apakah secara parsial variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen, dengan tingkat keyakinan 95% ( $\alpha = 0.05$ ). Variabel independen dikatakan berpengaruh terhadap variabel dependen bisa dilihat dari probabilitas variabel independen dibandingkan tingkat kesalahannya ( $\alpha$ ).

Menurut Sugiyono (2014: 250) dalam Anggraeni (2015: 91) (t-test) hasil perhitungan ini selanjutnya dibandingkan dengan t tabel dengan menggunakan tingkat kesalahan 0,05.

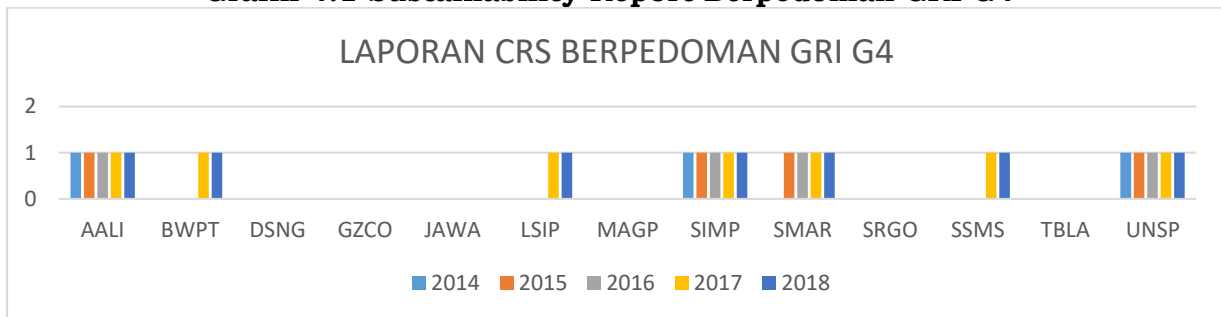
#### 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### 4.1. Deskripsi data penelitian

Data dalam penelitian ini berasal dari data sekunder yang diperoleh dari website masing-masing perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit

berupa Laporan Tahunan (Annual Report) dan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) pada periode tahun 2014 hingga 2018. Kedua laporan ini digunakan untuk memperoleh data pada variable CSR, ISPO, dan ROI. Sedangkan data harga saham untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit periode 2014 hingga 2018 dapat diperoleh dari Ringkasan Performa Perusahaan Tercatat melalui website [www.finance.yahoo.com](http://www.finance.yahoo.com).

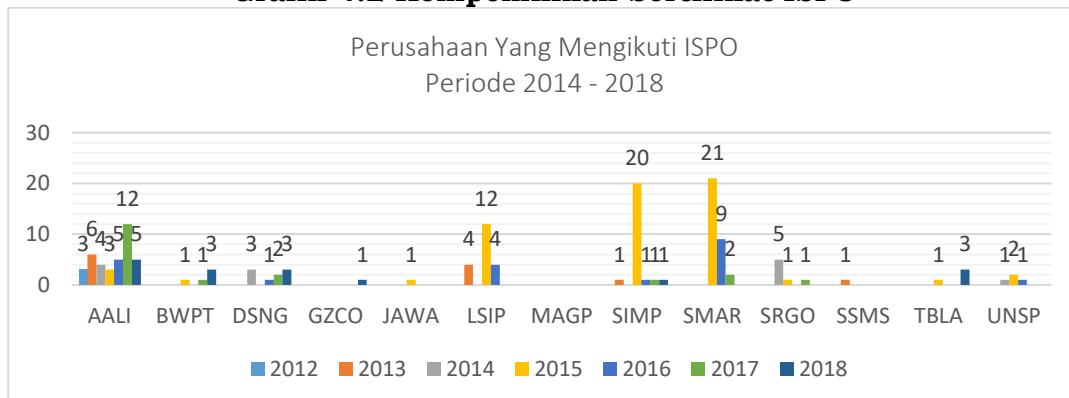
**Grafik 4.1 Sustainability Report Berpedoman GRI G4**



Berdasarkan Grafik 4.1 diatas, menunjukkan bahwa 4 perusahaan yang secara penuh mempublikasikan laporan keberlanjutan berpedoman GRI G4 terhitung tahun 2014 hingga 2018, sementara 3 perusahaan lainnya

hanya mempublikasikan laporan keberlanjutan terhitung tahun 2017 dan 2018, sedangkan sisanya hanya mempublikasikan laporan tahunan.

**Grafik 4.2 Kempemilikan Sertifikat ISPO**



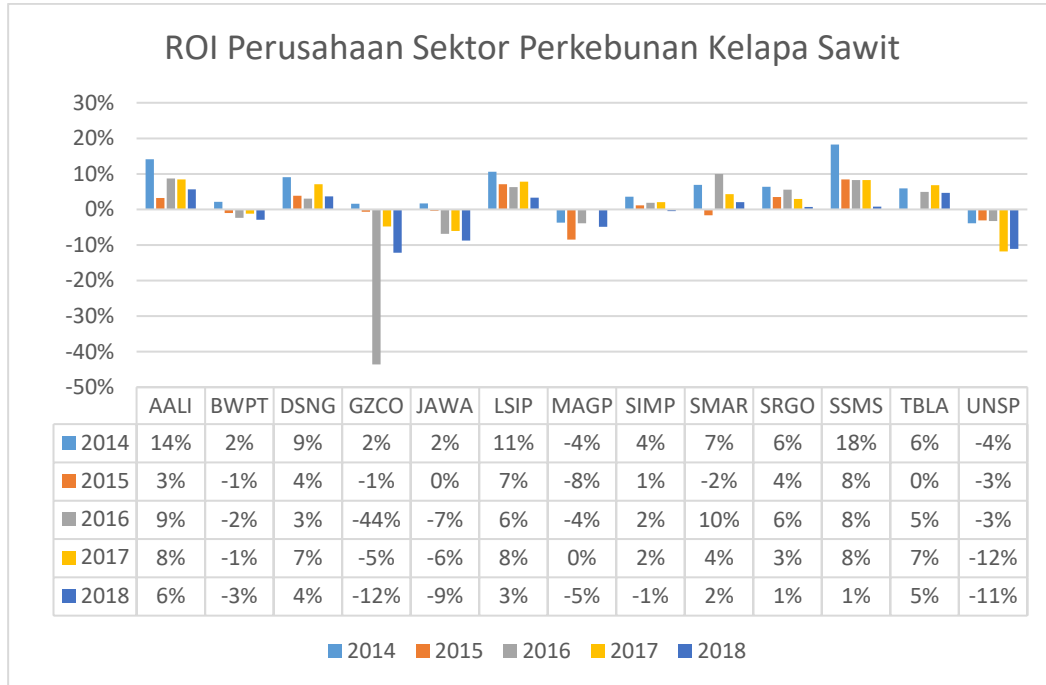
Berdasarkan Grafik 4.2 menunjukkan bahwa hanya perusahaan AALI secara berturut-turut menerima sertifikat ISPO, apabila dilihat berdasarkan banyaknya

sertifikat maka hanya tiga perusahaan yang memiliki sertifikat ISPO. Adapula beberapa perusahaan yang sedang memproses kepemilikan sertifikat ISPO. Selain itu kepemilikan sertifikat

ISPO hanya berlaku selama 5 tahun, apabila perusahaan memperoleh

sertifikat ISPO pada tahun 2014 maka akan berakhir pada tahun 2018.

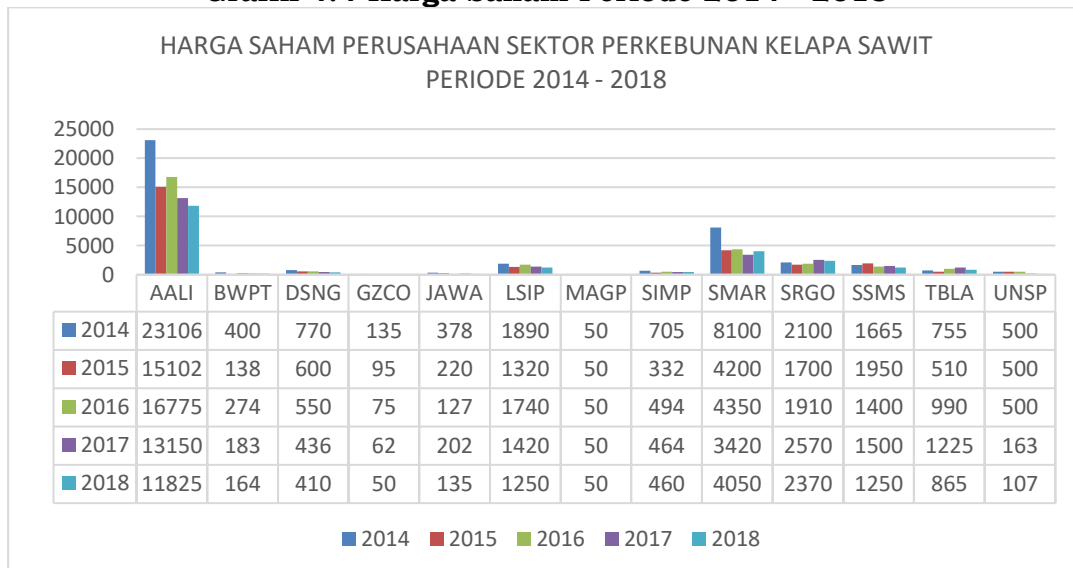
**Grafik 4.3 Rasio ROI Periode 2014 - 2018**



Berdasarkan Grafik 4.3 menunjukkan bahwa tingkat imbalan atas investasi yang digunakan untuk menghasilkan laba paling tinggi pada beberapa perusahaan mengalami penurunan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, bahkan GZCO

mencatat ROI yang paling rendah pada tahun 2016. Apabila dihitung rata-rata setiap tahun berdasarkan 13 perusahaan dan diurutkan dari nilai ROI paling tinggi hingga terendah maka didapat urutan SSMS, AALI, LSIP, DSNG, SMAR, SRGO, TBLA, SIMP, JAWA, MAGP, UNSP, dan GZCO.

**Grafik 4.4 Harga Saham Periode 2014 - 2018**

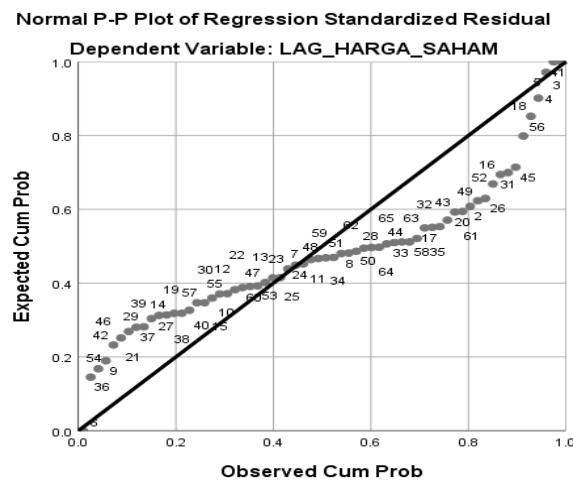


Berdasarkan Grafik 4.4 menunjukkan tren penurunan harga saham 13 perusahaan sector perkebunan kelapa sawit. Hingga tahun 2018 perusahaan berkode AALI, SMAR, SRGO, SSMS dan LSIP masih mencatatkan harga saham diatas seribu. Bahkan perusahaan MAGP masih tetap mencatatkan harga saham yang sama dari tahun 2014 hingga 2018 dan tidak mengalami peningkatan.

## 4.2. Uji Kualitas Data

### a. Uji Asumsi Normalitas Data

Pengujian normalitas dilakukan dengan melihat normal plot. Menurut Imam Ghozali (2011:161) model regresi dikatakan berdistribusikan normal jika data plotting (titik-titik) yang menggambarkan data sesungguhnya mengikuti garis diagonal. Hasil pengujian normalitas dapat dilihat pada gambar 4.1 berikut ini:



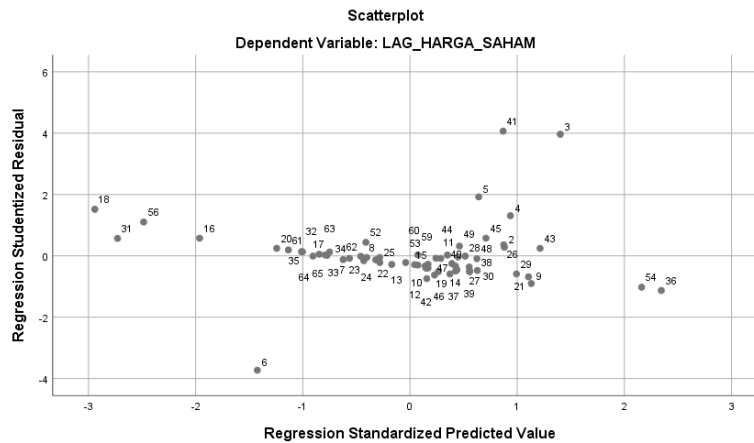
**Gambar 4.1 Uji Normalitas**

Pada gambar 4.1 diatas terlihat titik-titik atau plotting bersusun mengikuti garis diagonal, sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal.

### b. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui adanya penyimpangan saat uji regresi linier. Metode yang digunakan adalah melihat grafik scatterplot antara standardized

predicted value (ZPRED) dengan studentized residual (SRESID). Menurut Imam Ghozali (2011:139) tidak terjadi heteroskedastisitas, jika tidak ada pola yang jelas (bergelombang, melebar kemudian menyempit) pada gambar scatterplots, serta titik-titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. hasil pengujian heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar 4.2 diberikut ini:



**Gambar 4.2 Uji Heteroskedastisitas**

Gambar 4.2 diatas memperlihatkan bahwa titik-titik menyebar diantara titik nol dan tidak membentuk suatu pola, sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan tidak mengalami heteroskedastisitas.

**c. Uji Multikolinearitas**

Uji multikolinearitas menunjukkan adanya korelasi variable-variabel bebas diantara satu

dengan yang lainnya. Pengujian ini menggunakan nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan nilai Tolerance. Menurut Imam Ghozali (2011: 107-108) tidak terjadi gejala multikolinearitas, jika nilai Tolerance > 0,100 dan nilai VIF < 10,00. Hasil pengujian multikolinearitas dapat dilihat pada table 4.1 dibawah ini:

**Tabel 4.1 Uji Multikolinearitas**

Variabel	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
LAG_TOTAL_CSR	0,318	3,143	Tidak ada multikolinearitas
LAG_TOTAL_ISPO	0,321	3,117	Tidak ada multikolinearitas
LAG_TOTAL_ROI	0,985	1,015	Tidak ada multikolinearitas

Pada table 4.1 menunjukkan nilai VIF pada variable CSR, ISPO, dan ROI kurang dari 10, selain itu nilai Tolerance pada ketiga variable independen lebih dari 0,1. Sehingga dinyatakan tidak ada multikolinearitas yang terjadi diantara variable CSR, ISPO, dan ROI.

**d. Uji Autokorelasi**

Salah satu penyimpangan model regresi klasik adalah adanya korelasi antara anggota sampel yang

diurutkan berdasarkan waktu. Pengujian autokorelasi menggunakan metode Durbin Watson, menurut Imam Ghozali (2011:111) tidak ada gejala autokorelasi, jika nilai Durbin Watson terletak antara Du sampai 4-Du. Nilai Du dicari pada distribusi nilai tabel Durbin Watson berdasarkan k (3) dan N (65) dengan signifikansi 5%. Du (1,731) < Durbin Watson < 4-Du (2,269).

**Tabel 4.2 Uji Autokorelasi 1**

Nilai Durbin Watson	Kriteria			Keterangan
	Nilai D1	Nilai Du	Nilai 4-Du	
0,494	1,535	1,662	2,337	Terjadi autokorelasi positif

Pada tabel 4.2 menunjukkan nilai Durbin Watson pada hasil perhitungan IBM SPSS tidak berada diantara nilai Du sampai 4-Du, nilai Durbin Watson kurang dari nilai D1. Autokorelasi yang terjadi dicari arahnya melalui kriteria berikut:

- a. Deteksi Autokorelasi Positif
  - Jika  $d < D1$  maka terdapat autokorelasi positif,
  - Jika  $d > Du$  maka tidak terdapat autokorelasi positif,
  - Jika  $D1 < d < Du$  maka pengujian tidak menyakinkan atau tidak dapat disimpulkan.
- b. Deteksi Autokorelasi Negatif
  - Jika  $(4 - d) < D1$  maka terdapat autokorelasi negative,
  - Jika  $(d - d) > Du$  maka tidak

terdapat autokorelasi negative, Jika  $D1 < (4 - d) < Du$  maka pengujian tidak menyakinkan atau tidak dapat disimpulkan.

Berdasarkan kriteria diatas maka arah autokorelasi pada data yang digunakan adalah autokorelasi positif. Masalah ini biasanya terjadi pada regresi linear dengan menggunakan data runtut waktu/time series. Data penelitian ini berbentuk data panel (pooled data), dimana data gabungan antara data time series dengna data cross section. Setelah terdeteksi adanya autokorelasi positif maka dilakukan perbaikan menggunakan metode Cochrane Orcutt dan hasil perhitungan disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 4.3 Uji Autokorelasi 2**

Nilai Durbin Watson	Kriteria			Keterangan
	Nilai D1	Nilai Du	Nilai 4-Du	
2,063	1,535	1,662	2,337	Terjadi autokorelasi positif

Berdasarkan hasil perhitungan Cochrane Orcutt pada tabel 4.3 diperoleh nilai Durbin Watson yang berada pada kategori nilai Du dan nilai 4-Du. Sehingga dinyatakan data penelitian ini tidak terjadi autokorelasi.

#### 4.3. Pengujian Hipotesis

Setelah melakukan uji asumsi klasik, kemudian dilanjutkan pengujian hipotesis dalam peneltian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil pengujian ketiga hipotesis disajikan pada tabel 4.4 berikut ini:

**Tabel 4.4 Hasil Pengujian Hipotesis**

Variabel	Unstandardized	Uji_t	Sig.	Konfirmasi Hipotesis
	Coefficients			
	B			
(Constant)	-1.201,988	-1,996	0,051	
LAG_TOTAL_CSR	25,891	2,035	0,046	Tolak H0
LAG_TOTAL_ISPO	-21,228	-0,297	0,768	Terima H0
LAG_TOTAL_ROI	4.285,847	1,659	0,102	Terima H0
R Square		0,191		
Adjusted R Square		0,150		
F		4,708		
Sig		0,005		

Berdasarkan tabel 4.4 maka dapat disimpulkan hasil regresi sebagai berikut.

$$\text{Harga Saham} = -1.201,98 + 25,89 \text{ CSR} - 21,22 \text{ ISPO} + 4.285,84 \text{ ROI}$$

Nilai konstanta sebesar -1.201,98 memiliki arti bahwa apabila CSR, ISPO dan ROI konstan, maka Harga Saham akan turun sebesar 1.201,98 persen. Nilai Koefisien regresi CSR sebesar 25,89 memiliki arti bahwa apabila CSR meningkat sebesar 1 persen, maka Harga Saham akan meningkat sebesar 25,89 persen. Nilai koefisien regresi ISPO sebesar -21,22 memiliki arti bahwa apabila ISPO meningkat 1 persen, maka Harga Saham akan menurun sebesar 21,22 persen. Nilai koefisien regresi ROI sebesar 4.285,84 memiliki arti bahwa apabila ROI meningkat 1 persen, maka Harga Saham akan meningkat sebesar 4.285,84 persen.

Koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) diukur untuk mengetahui presentase pengaruh variabel indenpenden terhadap perubahan variabel depenen. Pada tabel 4.4 nilai Adjusted R Square sebesar 0,150 menunjukkan bahwa 15% variabel harga saham perkebunan kelapa sawit yang dapat dijelaskan oleh variable CSR, ISPO, dan ROI, sedangkan sisanya sebesar 85% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam model persamaan yang

digunakan..

Selain itu nilai t-hitung pada variabel CSR, ISPO, dan ROI sebesar 2,035, -0,297, 1,659 dengan nilai signifikansi 0,046, 0,768, dan 0,102 apabila dibandingkan dengan nilai t-tabel sebesar (df = n (65) – k (3), satu sisi dengan signifikansi 5%), maka nilai t-hitung < t-tabel yang berarti variabel Corporate Social Responsibility (CSR) berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham Perusahaan Pada Sektor Perkebunan yang Terdaftar di BEI Periode 2014- 2018. Sebaliknya variabel Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO) dan Return On Investment (ROI) tidak berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham Perusahaan Pada Sektor Perkebunan yang Terdaftar di BEI Periode 2014-2018.

Pada nilai F-hitung sebesar 4,708 dengannilai signifikansi 0,005 apabila dibandingkan dengan nilai F-tabel sebesar 2,525 (p= 0,05, df1 = 4, df2 = 4-1), maka nilai F-hitung > F-tabel. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Corporate Social Responsibility (CSR), Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO) dan Return On Investment (ROI) mempengaruhi secara simultan terhadap variabel Harga Saham.



#### 4.4. PEMBAHASAN

*Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Harga Saham Perusahaan Pada Sektor Perkebunan yang terdaftar di BEI Periode 2014 – 2018*

Kondisi pasar global untuk komoditas ekspor CPO menjadi perhatian khusus bagi perusahaan sector perkebunan kelapa sawit, dengan adanya ketegangan antara Uni Eropa dan Indonesia yang terjadi sebelum tahun 2018 hingga penularan wabah Covid-19 dan perang dagang Amerika – China. Uni Eropa menjadi salah satu importir terbesar selain China dan India untuk komoditas CPO. Kebijakan RED I dan RED II yang dikeluarkan oleh Uni Eropa melarang impor CPO dari Indonesia disebabkan proses produksi produk CPO yang tidak mematuhi sistem keberlanjutan atau Corporate Social Responsibility (CSR) seperti kebakaran lahan sampai masalah hak asasi manusia di perusahaan sector perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Menurut Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardi menyimpulkan bahwa kebakaran lahan sering menjadi motif land clearing karena lebih murah dan sebesar 80 lahan yang terbakar berubah menjadi lahan perkebunan<sup>49</sup>. Sejalan dengan itu larangan import berdampak pada penurunan harga di pasar internasional, hingga menurunnya laba perusahaan selama tahun 2014 hingga 2018.

Laba menjadi salah satu parameter investor dalam menilai kinerja perusahaan. Menurunnya laba memberikan informasi bagi investor atau stakeholder tentang prospek yang kurang baik terhadap perusahaan sector perkebunan kelapa sawit yang berdampak menurunnya harga saham. Untuk memberikan informasi yang relevan dan meyakinkan stakeholder atau investor terhadap pandangan negatif terhadap

perusahaan kelapa sawit di Indonesia maka perlu mengungkapkan pelaksanaan CSR terutama dibidang social dan lingkungan yang berpedoman pada Global Reporting Initiative (GRI) G4. Global Reporting Initiative (GRI) merupakan sebuah lembaga independen yang menyediakan framework untuk pelaporan berkelanjutan yang dipakai secara luas oleh banyak organisasi di banyak negara. Melalui peningkatan pengungkapan CSR berpedoman Global Reporting Initiative (GRI) G4 dapat meningkatkan harga saham, sebaliknya bila kurangnya pengungkapan CSR akan menurunkan harga saham.

Berdasarkan grafik 1.1 menunjukkan dari 13 perusahaan yang diteliti hanya 4 perusahaan secara penuh mempublikasikan laporan keberlanjutan (sustainability report) dan 3 perusahaan lainnya hanya mempublikasikan pada tahun 2017 dan 2018. Publikasi laporan keberlanjutan ini berpedoman pada Global Reporting Initiative (GRI) G4, tetapi ada beberapa perusahaan kurang mengungkapkan item-item secara penuh sesuai kriteria Global Reporting Initiative (GRI) G4. Hal ini sesuai dengan penelitian Apriani (2016) yang menjelaskan bahwa perusahaan Astra Agro Lestari lebih banyak mengungkapkan laporan sustainability report dibandingkan dengan perusahaan Bakrie Sumatera Plantations. Apabila perusahaan yang mampu memperhatikan pengelolaan lingkungannya, maka keberadaan perusahaan memiliki citra yang baik akan direspon positif oleh masyarakat, investor dan konsumen.

Selain itu hasil penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian tentang pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap harga saham, seperti Rizki (2019) dan Rosiana, et al., (2013) menunjukkan hasil variabel CSR berpengaruh positif

dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Adapula penelitian Nicoleta et al., (2018) dan Miruna et al., (2016), menunjukkan hubungan positif antara CSR dan kinerja keuangan.

*Pengaruh Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO) terhadap Harga Saham Perusahaan Pada Sektor Perkebunan yang terdaftar di BEI Periode 2014 – 2018*

Tren penurunan harga saham yang sedang dilanda perusahaan kelapa sawit dari tahun 2014 hingga 2018 berimbas dari isu defortasi dari pihak Uni Eropa dengan kebijakan yang melarang import komoditas CPO Indonesia. Hal ini menginformasikan bahwa perusahaan sector perkebunan kelapa sawit di Indonesia kurang meyakinkan stakeholder dalam proses produksi CPO yang berkelanjutan. Menanggapi hal ini, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yang menyadarkan perusahaan kelapa sawit untuk mengikuti tata kelola yang benar dan berkelanjutan. Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) adalah solusi jitu untuk melawan kampanye negatif yang dilancarkan oleh pasar global terhadap komoditas primadona perkebunan Indonesia ini, yang selalu berkuat pada tuduhan deforestasi, pekerja di bawah umur dan kebun yang tidak berkelanjutan.

Berbeda dengan RSPO, sejak tahun 2011 hingga saat ini masih banyak permasalahan dalam penerapan Sertifikasi ISPO seperti banyak kebun sawit yang secara administrasi masih dalam kawasan hutan dan masih banyak yang belum memiliki sertifikat kepemilikan. Menurut Ketua GAPKI Sumsel Harry Hartanto mengatakan bahwa masalah legalitas yang terkait Hak Guna Usaha yang belum terbit serta tumpang tindih kawasan dan lainnya<sup>48</sup>. Hal ini menjadi batu sandungan bagi petani swadaya yang jumlahnya lebih banyak dibandingkan petani plasma dan

perusahaan dalam rantai pasokan kelapa sawit, maka dapat memberikan persepsi negatif terhadap produk komoditas ekspor CPO Indonesia di pasar global. Berdasarkan grafik 1.2 menunjukkan hingga tahun 2018 terdapat 12 perusahaan yang telah memperoleh sertifikat ISPO, sedangkan perusahaan AALI setiap tahunnya memperoleh sertifikat apabila dibandingkan dengan perusahaan lainnya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Harsono et al., (2012) yang menunjukkan masih sangat sedikit industri yang menerapkan prinsip berkelanjutan, kondisi yang diperlukan untuk penerapan ISPO. Adapula penelitian Faudah (2018) menunjukkan tidak terpenuhinya ha katas tanah, memfasilitasi kebun masyarakat sekitar dan pemanfaatan limbah pada PTPN VIII Cikasungka. Hal yang sama juga ditemukan oleh Anwar et al., (2016) menunjukkan indikator yang masih belum sesuai dengan ketentuan ISPO yaitu; 1). Sistem perijinan dan manajemen kebun, 2). Penerapan pedoman teknis budidaya dan pengolahan kelapa sawit. 3). Pengelolaan dan pemantauan lingkungan. 4). Tanggung jawab terhadap pekerja. 5). Tanggung jawab sosial dan komunitas.

Masalah kepercayaan stakeholder menjadi unsur penting, Ketua Komisi ISPO Gamal berpendapatan bahwa penerapan ISPO penting bagi perusahaan kelapa sawit untuk meyakinkan negara-negara lain bahwa produk minyak sawit mentah Indonesia sudah mementingkan keberlangsungan dan ramah lingkungan<sup>49</sup>. Pemerintah Indonesia terus berupaya memberikan penjelasan tentang produk sawit Indonesia dan mensosialisasikan ISPO di Negara India, Prancis, Jepang, Jerman, dan Belgia<sup>50</sup>. Akan tetapi tanggapan yang diberikan Uni Eropa mewajibkan esportir CPO memberikan label RSPO kepada produk CPO-nya.

*Pengaruh Return On Investment (ROI) terhadap Harga Saham Perusahaan Pada Sektor Perkebunan yang terdaftar di BEI Periode 2014 – 2018*

Pergerakan harga saham yang cepat di pasar mengharuskan investor menentukan pengambilan keputusan untuk membeli suatu saham dengan membaca rasio-rasio keuangan yang ada pada suatu laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan sector perkebunan kelapa sawit. Return On Investment (ROI) menjadi salah satu rasio profitabilitas yang digunakan untuk menentukan harga saham, akan tetapi ROI tidak memiliki pengaruh yang bermakna terhadap harga saham. Untuk mengambil keputusan yang tepat dan cepat maka investor lebih tertarik terhadap Net profit margin dibandingkan Total Aset turn over. Net profit margin merupakan rasio antara laba bersih setelah pajak dengan penjualan, dimana Semakin tinggi nilai NPM maka semakin tinggi laba bersih yang dihasilkan dari setiap penjualan, dan hal itu dapat menunjukkan bahwa kinerja perusahaan baik, hal tersebut akan menarik investor untuk berinvestasi, semakin banyak investor yang berinvestasi di perusahaan tersebut maka pergerakan harga saham perusahaan tersebut akan naik (Azianur1 & Abdurrahman, 2013:6).

Berbeda dengan NPM, investor kurang memperhatikan Total aset turn over (TATO) sebagai cerminan kinerja perusahaan sector perkebunan kelapa sawit. Di karenakan industri kelapa sawit adalah bagian dari industri perkebunan yang di mana hasil penggunaan aset untuk kegiatan produksi tidak akan langsung dapat dirasakan dengan cepat, hal tersebut dikarenakan pada industri perkebunan perusahaan harus menunggu sampai tanaman yang ditanam tumbuh hingga dapat menghasilkan produk yang dapat dijual (Azianur1 & Abdurrahman,

2013:6). Karena alasan inilah berdasarkan hasil penelitian ini ROI yang memiliki kedua rasio saling berinteraksi sehingga menghasilkan pengaruh yang besar tetapi tidak bermakna terhadap harga saham. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Arifin & Agustami (2016) menunjukkan profitabilitas berpengaruh positif terhadap harga saham.

## **5. KESIMPULAN, DAN SARAN**

### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan data yang telah didapat dan dianalisis dalam penelitian ini maka dapat disimpulkan adalah:

1. Penelitian ini membuktikan Corporate Social Responsibility (CSR) memberikan pengaruh yang signifikan terhadap harga saham pada perusahaan perkebunan kelapa sawit periode tahun 2014 sampai dengan 2018.
2. Penelitian ini membuktikan Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO) memberikan pengaruh yang tidak signifikan terhadap harga saham pada perusahaan perkebunan kelapa sawit periode tahun 2014 sampai dengan 2018.

Penelitian ini membuktikan Return On Investment (ROI) memberikan pengaruh yang tidak signifikan terhadap harga saham pada perusahaan perkebunan kelapa sawit periode tahun 2014 sampai dengan 2018.

### **5.2 Saran**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan masukan kepada perusahaan-perusahaan sector perkebunan kelapa sawit untuk lebih meningkatkan kinerja ekonomi, social dan lingkungan melalui penerapan dan pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) yang berpedoman pada kriteria GRI G4 dan mempublikasikannya dalam



bentuk laporan keberlanjutan (sustainability report). Selain itu perusahaan juga perlu melengkapi dokumen, status penilaian kelas kebun dan status legalitas kebun serta turut mensosialisasikan kebijakan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) bagi petani plasma dan petani swadaya/mandiri. Apabila kedua hal ini telah meyakinkan stakeholder maka perusahaan harus meningkatkan efisiensi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh bagian-bagian maupun anak-anak perusahaan sehingga penggunaan aktiva dalam menghasilkan keuntungan dan meningkatkan harga saham.

Bagi pemerintah perlu memperhatikan kapasitas dan skill lembaga sertifikasi, membangun komunikasi yang aktif dengan perusahaan, petani plasma dan petani swadaya. Menyediakan atau memberikan subsidi bagi petani swadaya untuk memiliki sertifikat,

dikarenakan petani swadaya termasuk kelompok terbesar dalam rantai pasokan CPO di Indonesia. Pemerintah harus meningkatkan penyerapan CPO dalam negeri dan diolah sebagai alternatif energy yakni B30, sehingga mengurangi resiko global yang menurunkan harga jual CPO.

## **Pengaruh *Good Public Governance* dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan di Pemerintahan Kota Ambon**

Retno Widia Astuti

*Fakultas Ekonomi Program Pasca Sarjana Universitas Pattimura*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *good public governance* dan pengendalian internal terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah kota ambon. Melihat sejauh mana laporan keuangan menyajikan informasi yang benar dan jujur, yang dapat dirasakan oleh berbagai kepentingan untuk terciptanya keadilan di dalam sistem dan saling berinteraksi satu sama lain agar tercapainya suatu target atau sasaran yang telah ditetapkan di dalam pengendalian internal. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis aktual, laporan keuangan pemerintah harus memenuhi 4 karakteristik kualitatif/kualitas informasi berikut: relevan, andal, dapat dibandingkan, dapat dipahami.

Populasi pada penelitian ini adalah kepala dinas atau sekretaris dinas, kepala subbagian keuangan dan perencanaan, kepala bagian, dan staf yang bekerja lebih dari setahun di Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Ambon. Teknik pengambilan sampel Penelitian ini dilakukan pada 24 Organisasi Perangkat Daerah, terdiri dari Dinas dan Badan di Pemerintahan Kota Ambon, dengan teknik pengambilan sampel secara purposive sampling menghasilkan 96 sampel untuk diolah. Teknik pengumpulan data melalui penelitian lapang berupa menyebarkan kuisioner kepada responden, Data yang diperoleh dianalisis menggunakan program SPSS versi 24 dengan metode analisis data menggunakan teknik analisis regresi linier berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *good public governance* dan pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Dibuktikan dengan nilai uji t menunjukkan angka -2,958 dan signifikasinya  $0,004 < 0,05$  dari hasil tersebut maka ada pengaruh yang signifikan antara *good public governance* dan kualitas informasi laporan keuangan. Sedangkan uji t untuk variabel pengendalian internal menunjukkan angka 6,805 dan signifikansinya  $0,000 < 0,05$  dari hasil tersebut maka ada pengaruh yang signifikan antara pengendalian internal dan kualitas informasi laporan keuangan. Hasil analisis koefisien determinasi ( $R^2$ ) menunjukkan besarnya pengaruh *good public governance* dan pengendalian internal terhadap kualitas informasi laporan keuangan yaitu 0,325 artinya 32,5% dan sisanya 67,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

**Kata Kunci:** *good public governance*, pengendalian internal, kualitas informasi laporan keuangan.

### ABSTRACT

*This study aims to determine the effect of good public governance and internal control on the quality of information on the financial statements of the Ambon city government. Seeing the extent to which the financial statements provide true and honest information, which can be felt by various interests for the creation of justice in the system and interact with each other in order to achieve a target or objectives that have been set in internal control. Based on Government Regulation Number 71 of 2010 concerning Actual-based Government Accounting Standards, government financial reports must meet the following 4 qualitative / quality information characteristics: relevant, reliable, comparable, understandable.*

*The population in this study were the heads of offices or service secretaries, heads of finance and planning subsections, heads of sections, and staff who worked for more than a year in the Ambon City Government Regional Apparatus Organization. Sampling technique This research was conducted at 24 Regional Apparatus Organizations, consisting of Agencies and Agencies in Ambon City Government, with the sampling technique using purposive sampling to produce 96 samples to be processed. Data collection techniques through field research in the form of distributing questionnaires to respondents. The data obtained were analyzed using SPSS version 24 with the data analysis method using multiple linear regression analysis techniques. The results showed that good public governance and internal control had an effect on the quality of information on local government financial reports. Evidenced by the t-test value shows the number -2,958 and the significance is 0.004 <0.05, so there is a significant influence between good public governance and the quality of financial statement information. While the t test for the internal control variable shows the number 6.805 and the significance is 0.000 <0.05, so there is a significant influence between internal control and the quality of financial statement information. The results of the analysis of the coefficient of determination (R<sup>2</sup>) show the magnitude of the influence of good public governance and internal control on the quality of financial statement information, namely 0.325, which means 32.5% and the remaining 67.5% is influenced by other variables not discussed in this study.*

**Keywords:** *good public governance, internal control, quality of financial report information.*

## 1. PENDAHULUAN

Tata pemerintahan yang baik (*good public governance*) merupakan harapan dari setiap warga negara dalam sebuah pemerintahan. Pemerintah daerah bekerja sesuai dengan aturan perundang-undangan, dalam menjalankan setiap pekerjaannya dengan tujuan kesejahteraan rakyat bersama pada daerah tempat para pegawai bekerja (I Wayan; 2018).

Konsep *good public governance* ini muncul karena kurang efektifnya kinerja pemerintah yang selama ini dipercaya sebagai penyelenggara urusan publik. Pemerintahan yang

berkualitas akan mewujudkan suatu kehidupan negara yang teratur dan akan mewujudkan *good public goverance* yang diharapkan. Setiap masyarakat memiliki pola pemikiran yang berbeda mengenai sebuah pemeritahan yang disebut *good public governance*. Kehidupan masyarakat yang makmur bisa menjadi tolak ukur apakah sistem pemerintahan daerah yang dijalankan oleh pemerintah daerah sudah terlaksana dengan baik atau belum (I Wayan;2018).

Pengendalian internal merupakan bagian yang sangat penting agar tujuan pemerintah daerah dapat tercapai, tanpa adanya pengendalian

internal tujuan pemerintah tidak akan tercapai secara efektif dan efisien. Maka dari itu pengendalian internal juga berperan penting dalam membuat kualitas informasi laporan keuangan yang baik dan dapat diandalkan. Pemahaman yang sama tentang efektivitas pengendalian internal merupakan suatu hal yang sangat penting. Mengingat kompleksnya permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah dalam mewujudkan *good public governance* pada kualitas informasi laporan keuangan daerah (Pratiwi, 2014;12).

Laporan keuangan yang berkualitas merupakan laporan yang dapat menyajikan informasi yang benar, jujur, relevan, andal, dapat diperbandingkan, dan dapat dipahami. Laporan keuangan yang berkualitas penting karena akan dipakai sebagai dasar dalam pengambilan keputusan (*Governmental Accounting Standards Board – GASB, Concepts Statement No.1, 1999*). Selain itu informasi laporan keuangan yang berkualitas akan mengikis kurang percaya masyarakat terhadap pemerintah daerah dengan adanya berbagai skandal keuangan (Haliah;2013)

Informasi laporan keuangan yang tidak berkualitas (buruk) memberikan peluang bagi adanya penyimpangan dan kekeliruan di bidang keuangan. Hal tersebut akan menimbulkan kecurangan, korupsi, kolusi yang bisa menimbulkan tuntutan hukum. Jika berlangsung terus menerus tentu saja rakyat akan menanggung akibatnya, biaya transaksi yang tinggi dan pelayanan kepada publik yang buruk. Selanjutnya, berakibat pada terjadinya krisis kepercayaan baik masyarakat, kreditur, dan investor internasional akan ragu menempatkan dananya di Indonesia, kecuali dengan beban (*cost of money*) yang tinggi. Dengan demikian, diharapkan pemerintah daerah memperhatikan dan meningkatkan kualitas dari informasi laporan keuangan. Namun

kenyataannya, fenomena yang terjadi tidak sesuai dengan harapan tersebut. Hal ini berarti berbeda antara fenomena lapangan (kenyataan) dengan teori (harapan) (Haliah;2013).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan ada ketidakpatuhan dalam pengelolaan finansial negara, BPK juga mencatat masih banyak kementerian negara atau lembaga (k/l) yang laporan keuangannya tidak memiliki opini (TMP) (Moermahadi Soerja; didownload dari [www.tribunnews.com/nasional](http://www.tribunnews.com/nasional)).

Opini BPK atas laporan keuangan merupakan bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, (Sri Mulyani, 2019; didownload dari [www.republika.co.id](http://www.republika.co.id)).

Di Indonesia yang belum capai WTP hanya Provinsi NTT dan Maluku. Hal itu karena sumber daya manusia belum memadai dan sistem pengendalian internalnya masih harus terus diperbaiki, sehingga saya akan sampaikan langsung saran-saran kepada Gubernur NTT dan Maluku,” kata Harry di Kupang, seperti ditulis Kompas.com, Jumat, (12/2/16).

Ambon mendapatkan Opini WTP karena dalam LKPD Kota Ambon Tahun 2017 mampu menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan tanggal 31 Desember 2017, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, namun dari laporan hasil pemeriksaan tersebut terdapat beberapa rekomendasi yang harus diperbaiki oleh Pemerintah Kota Ambon untuk melengkapi laporan keuangan tersebut dengan waktu yang ditentukan selambat-lambatnya 60 hari setelah hasil pemeriksaan diterima,” tutur Muhammad Abidin Kepala BPK Perwakilan Maluku.

Ambon kembali mendapat WTP pada tahun 2018 namun masih banyak yang harus dibenahi karena BPK masih mendapat temuan-temuan

yang harus diperhatikan meski pemerintah kota ambon melaksanakan mencapai 70% karena target maksimal pemerintah kota ambon harus mencapai 90%,” kata Walikota Ambon, Richard Louhenapessy.

## **2. TELAHAH LITERATUR DAN PERUMUSAN**

### **2.1. Kajian Dan Teori Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan (Y)**

Kualitas didefinisikan suatu kondisi dinamis dimana yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan (Tjiptono, 2004:51).

Selanjutnya kualitas didefinisikan sebagai “kesesuaian dengan standar, diukur berbasis kadar ketidaksesuaian, serta dicapai melalui pemeriksaan (Mulyana, 2010:94).

IAI (2009:1) menyatakan bahwa laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Berdasarkan pengertian yang telah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa pengertian laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atau dibuat sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Laporan keuangan tersebut didalamnya mencakup semua posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dibuat oleh suatu entitas akuntansi. Entitas Akuntansi dilingkup pemerintah pusat yaitu setiap kuasa pengguna anggaran di lingkungan suatu kementerian Negara/Lembaga. Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan tersebut berguna bagi para pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi, karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut IAI (2009 : 1) yaitu : Dapat Dipahami, Relevan, Keandalan dan Dapat dibandingkan.

### **2.2. Kajian Dan Teori Terhadap Good Publik Governance (X1)**

Konsep *good governance* dari segi fungsional aspek *governance* dapat ditinjau dari apakah pemerintah telah berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah digariskan, atau justru sebaliknya dimana pemerintahan tidak berfungsi (Sedarmayanti, 2012:4).

Hal yang paling mendasar untuk melaksanakan prinsip menciptakan keadilan dibutuhkan beberapa prasyarat yang saling berkaitan dan satu sama lainnya saling mempengaruhi adalah: 1. Transparansi; 2. Akuntabilitas; 3. Kepastian hukum; 4. Partisipasi.

Empat syarat tersebut akan berdampak pada dampak selanjutnya terhadap *public governance* yang akan dirasakan *stakeholders* yang berbagai kepentingan, adalah terciptanya keadilan (*fairness*) dalam supra system, untuk saling berinteraksi satu sama lain (Adrian Sutedi, 2012:44).

### **2.3. Kajian Dan Teori Terhadap Pengendalian Internal (X2)**

Pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan direksi, manajemen dan personel lainnya dalam suatu entitas, yang dirancang untuk menyediakan keyakinan yang memadai berkenaan dengan pencapaian tujuan dalam kategori berikut ini: (1) keandalan pelaporan keuangan, (2) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, (3) efektifitas dan efisiensi operasi (Boynton,2006:391, dalam Riris Dwi 2015).

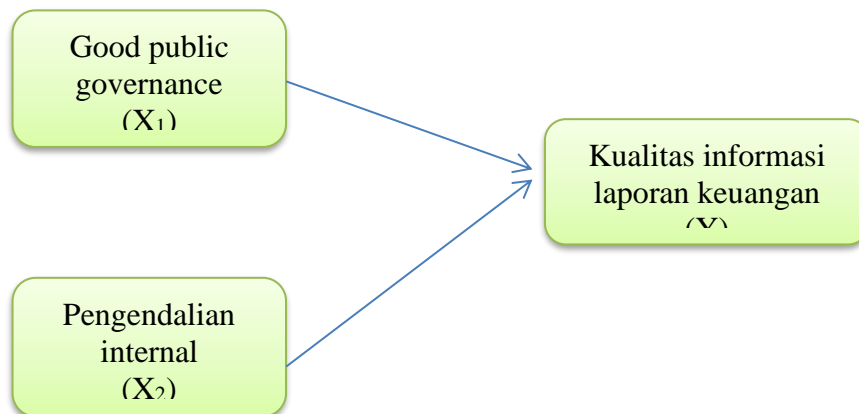
Sistem pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan eksekutif (kepala daerah, instansi/dinas, dan segenap personel) yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tiga golongan yang terdiri atas : (1). Keandalan laporan keuangan, (2). Kepatuhan terhadap



hukum dan peraturan yang berlaku, (3). Efektifitas dan efisiensi operasi (Indra bastian, 2007:7). Selain itu, sistem pengendalian internal harus terintegrasi dengan baik supaya dapat dipercaya tingkat keandalan datanya. Faktor ketepatan waktu dalam memposting data maupun otorisasi dokumen transaksi harus diperhatikan sehingga sistem yang berjalan tidak mengalami kebocoran. Untuk memastikan sistem tersebut berjalan

dengan baik, maka dilakukan pembagian tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada aparatur yang berkompeten.

Berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian terdahulu telah dijelaskan beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya pengaruh kualitas informasi laporan keuangan. Adapun kerangka pemikiran penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut ini:



Berdasarkan permasalahan penelitian, tujuan penelitian dan kajian teoritis yang ada, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H<sub>1</sub>: “*Good public governance* berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan”.

H<sub>2</sub>: “Pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan”.

### 3. METODOLOGI PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang bekerja pada dinas dan badan pada pemerintahan kota ambon. Ada 24 dinas pemerintahan yang akan diteliti.

Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah responden bagian keuangan pada setiap dinas di bagian keuangan, sampel diambil sesuai kriteria teknik sampling yaitu setiap dinas 4 responden.

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Analisis regresi adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen bertujuan untuk mengestimasi dan memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui (Ghozali, 2011 dalam Harlinda, 2016). Pengujian dengan regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh *good public governance* dan pengendalian internal terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Hubungan antar variabel-variabel dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam persamaan sebagai berikut:  $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + \epsilon$  dimana Y adalah Kualitas Informasi Laporan Keuangan, a adalah Nilai Konstanta, X<sub>1</sub> adalah *Good public*

*governance*,  $X_2$  adalah Pengendalian internal,  $b_1$ ,  $b_2$  adalah Koefisien regresi dari masing-masing variabel  $\epsilon$  (eror) adalah Faktor lain yang tidak diteliti.

Uji parsial (Uji t) digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel Tingkat signifikansi yang digunakan sebesar 5%, dengan derajat kebebasan  $df=(n-k-1)$ , dimana  $n$  adalah jumlah responden dan  $k$  adalah jumlah variabel bebas (Sunyoto, 2011a : 13).

diteliti.

Uji Reliabilitas Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Menurut Azwar (1997), reliabilitas adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya dan dapat memberikan hasil yang relatif tidak berbeda apabila dilakukan kembali kepada subyek yang sama. Nunnally (1960) dalam Ghozali (2006) mengatakan pada umumnya suatu konstruk atau variabel

dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha lebih besar dari 0,60 .

Untuk melihat apakah instrument tersebut valid, maka dilakukan uji validitas dengan cara mengkorelasikan antara skor masing-masing butir pertanyaan terhadap total skor. Bila korelasi antara masing-masing butir terhadap total skor tersebut signifikan maka data tersebut dinyatakan valid.

#### 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji validitas menguji masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini, dimana keseluruhan variabel penelitian adalah 26 pernyataan yang harus dijawab oleh responden, yaitu 11 pernyataan untuk  $X_1$ , 4 pernyataan juga untuk  $X_2$  dan 11 pernyataan untuk  $Y$ . Berikut Tabel 4.3 data validitas :

**Tabel 4.1 Validasi data**

Variabel / Indikator	Korelasi r	Indikator tabel	Korelasi	R Tabel	Keterangan
<i>Good Public Governance (X<sub>1</sub>)</i>					
	0,608			0,201	Valid
	0,591			0,201	Valid
	0,646			0,201	Valid
	0,617			0,201	Valid
	0,603			0,201	Valid
	0,693			0,201	Valid
	0,602			0,201	Valid
	0,488			0,201	Valid
	0,617			0,201	Valid
	0,722			0,201	Valid
	0,681			0,201	Valid
<i>Pengendalian Internal (X<sub>2</sub>)</i>					
	0,850			0,201	Valid
	0,859			0,201	Valid
	0,845			0,201	Valid
	0,846			0,201	Valid
<i>Kualitas Informasi Laporan Keuangan (Y)</i>					
	0,544			0,201	Valid
	0,695			0,201	Valid

Variabel / Indikator	r tabel	Korelasi	R Tabel	Keterangan
Korelasi		0,553	0,201	Valid
Keterangan		0,665	0,201	Valid
		0,599	0,201	Valid
		0,626	0,201	Valid
		0,660	0,201	Valid
		0,547	0,201	Valid
		0,601	0,201	Valid
		0,613	0,201	Valid
		0,625	0,201	Valid

Sumber : Data SPSS 24 (2020)

Tabel 4.1 diatas menunjukkan bahwa semua indikator untuk variabel X<sub>1</sub>, X<sub>2</sub> dan Y yang digunakan untuk mengukur variabel dalam penelitian ini dinyatakan sebagai item yang valid. Hal ini karena indikator variabel yang digunakan dalam penelitian ini semua memiliki nilai korelasi yang lebih besar dari nilai r tabel 0,201.

Kuesioner dikatakan reliabel ketika responden konsisten menjawab setiap pertanyaan dari waktu ke waktu. Sebelum dilakukan pengolahan hasil data kuesioner, maka dilakukan uji kehandalan data supaya kesimpulan yang diperoleh handal. Hasil pengujian reliabilitas dapat dilihat pada Tabel 4.4 dibawah ini:

**Tabel 4.2 Uji Realibilitas**

Varibel	Nilai Alfa	Keterangan
<i>Good Public Governance</i>	0,841	Reliabel
Pengendalian Internal	0,871	Reliabel
Kualitas Informasi Laporan Keuangan	0,829	Reliabel

Sumber : Data SPSS 24 (2020)

Nilai *alpha* variabel *Good Public Governance* adalah 0,841 sehingga data *Good Public Governance* dikatakan reliabel, nilai *alpha* dari variabel Pengendalian Internal adalah 0,871, sehingga data Pengendalian Internal dikatakan reliabel dan nilai *alpha* variabel Kualitas Informasi Laporan Keuangan adalah 0,829 sehingga data Kualitas Informasi Laporan Keuangan

juga reliabel.

Uji *t* bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel independen (*good public governance* dan pengendalian internal) dan variabel dependen (Kualitas informasi laporan keuangan). Hasil uji *t* pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.7 dibawah ini:

**Tabel 4.3 Uji t Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Standardized Coefficients		Beta	Sig.	Collinearity Statistics
	B	Std. Error			
(Constant)		3.311		.1560	
Good Public Governance	-.259	.088	-.305	.00469	.6494
Pengendalian Internal	.211	.178	.701	.00069	.6494

a. Dependent Variable: Kualitas Informasi Laporan Keuangan

Sumber : Data SPSS 24 (2020)

Variabel *good public governance* memiliki  $t_{hitung}$  sebesar -2,958 dan nilai signifikansi sebesar 0,004 pada tingkat signifikansi 0,05. Dapat disimpulkan bahwa  $0,004 < 0,05$  maka  $H_1$  yang berbunyi “*good public governance* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan di Pemerintahan Kota Ambon”. Selain itu hasil *good public governance* perbandingan antara  $t_{hitung}$  dan  $t_{tabel}$  yang menunjukkan nilai  $t_{hitung}$  sebesar -2,958 sedangkan  $t_{tabel}$  sebesar (1,661), maka di katakan  $H_1$  diterima, artinya variabel independen (*good public governance*) berpengaruh terhadap variabel dependen kualitas informasi laporan keuangan dan signifikan.

Hal ini dikarenakan masih ada yang belum maksimal dalam menjalankan *good public governance*, terlihat dari segi kurangnya akses pada informasi yang siap, mudah dijangkau, bebas diperoleh dan tepat waktu, dan dilihat juga dari pernyataan tentang meningkatkan dan melaksanakan ketaatan hukum, rata-rata dijawab oleh responden netral, artinya belum dilakukan

dengan baik bahkan ada yang tidak memberikan transparansi terhadap akses informasi yang siap, mudah dijangkau, bebas diperoleh dan tepat waktu untuk di ketahui masyarakat maupun dalam hal ketaatan hukum.

Variabel pengendalian internal memiliki  $t_{hitung}$  sebesar 6,805 dan nilai signifikansi sebesar 0,004 pada tingkat signifikansi 0,05. Dapat disimpulkan bahwa  $0,000 < 0,05$  maka  $H_2$  yang berbunyi “pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan di Pemerintahan Kota Ambon”. Perbandingan antara  $t_{hitung}$  dan  $t_{tabel}$  pengendalian internal yang menunjukkan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 6,805 dan  $t_{tabel}$  sebesar 1,986 maka di katakan bahwa  $H_2$  diterima, artinya variabel independen (pengendalian internal) berpengaruh positif terhadap variabel dependen kualitas informasi laporan keuangan dan signifikan.

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda (*Multiple regression analysis*). Hasil pengujian untuk hipotesis 1 dan 2 dapat terlihat pada Tabel 4.9 dibawah ini :

**Tabel 4.4 Coefficients regresi Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.	Collinearity Statistics
	B	Std. Error	Beta	T		
1 (Constant)	38.218	3.306		11.560	.000	
Good Public Governance	-.259	.088	-.305	-2.958	.004	.669
Pengendalian Internal	1.211	.178	.701	6.805	.000	.669

a. Dependent Variable: Kualitas Informasi Laporan Keuangan

Sumber : Data SPSS 24 (2020).

Dalam persamaan  $Y = 38,218 - 0,259X_1 + 1,211X_2 + e$  menyatakan bahwa jika nilai *Good public governance* naik satu satuan, maka Kualitas Informasi Laporan Keuangan naik sebesar -0,259 dan jika nilai Pengendalian internal naik satu satuan maka Kualitas Informasi Laporan Keuangan naik sebesar 1,211. Selain itu pada tabel *coeficients* diatas juga menunjukkan bahwa angka 0,669 pada *standardized coefficients* (Beta). Angka sebesar 0,669 atau 66,9% menunjukkan tingkat korelasi antara *Good public governance*, Pengendalian internal dengan Kualitas Informasi Laporan Keuangan yang kuat (hubungan dikatakan kuat karena mencapai 66,9% dan jauh diatas 50%).

Nilai t yang dijelaskan di atas adalah nilai yang dapat digunakan untuk pengujian, apakah pengaruh *Good public governance* dan Pengendalian internal terhadap jumlah Kualitas Informasi Laporan Keuangan benar-benar signifikan atau tidak. Nilai t pada variabel *Good public governance* menunjukkan angka -2,958 dan signifikasinya  $0,004 < 0,05$  dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa  $H_1$  diterima, artinya ada pengaruh yang signifikan

antara *Good public governance* dan Kualitas Informasi Laporan Keuangan. Bahwa semakin baik penerapan *good governance* maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan.

Nilai t pada variabel Pengendalian internal menunjukkan angka 6,805 dan signifikansinya  $0,000 < 0,05$  maka dapat diambil kesimpulan  $H_2$  diterima, artinya ada pengaruh yang signifikan antara Pengendalian internal terhadap jumlah Kualitas Informasi Laporan Keuangan. Hal ini memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari kualitas informasi laporan keuangan melalui sistem pengendalian internal, yang berarti semakin baik sistem pengendalian internal pemerintah daerah maka kualitas informasi laporan keuangannya semakin baik.

Hasil regresi pada Tabel 4.8 di atas dapat dilihat bahwa diperoleh nilai *Adjust R Square* sebesar 0,325 menunjukkan 32,5% variabel kualitas informasi laporan keuangan yang dapat dijelaskan oleh variabel *good public governance* dan pengendalian internal sedangkan sisanya sebesar 67,5% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam model

persamaan yang digunakan. Nilai statistik F sebesar 23,837 dengan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$  menunjukkan bahwa model yang digunakan dalam penelitian layak untuk digunakan. Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah *good public governance* berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Hasil pengujian menunjukkan nilai koefisien  $b_1$  sebesar  $-0,259$  dengan nilai signifikansi  $0,004 < 0,05$  yang berarti bahwa berpengaruh negatif dan signifikan variabel *good public governance* terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Berdasarkan hasil uji hipotesis pada Tabel 4.9 bahwa nilai koefisien  $b_2$  sebesar 1,211 dengan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$  berarti terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel pengendalian internal terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Hasil pengujian sejalan dengan hipotesis yang telah dibuat dimana terdapat pengaruh yang positif dan signifikan pengendalian internal terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Nilai  $t_{hitung}$  sebesar 6,805 sedangkan  $t_{tabel}$  sebesar 1,986.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1. Kesimpulan

Dari pembahasan dan landasan teori diatas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dalam penelitian tesis ini antara lain :

1. *Good public governance* berpengaruh negative terhadap kualitas informasi laporan keuangan pada Organisasi Pemerintah Daerah/OPD pemerintah kota ambon. *good public governance* atau cara mengelola urusan-urusan publik

sejalan dengan aturan yang dilaksanakan secara adil dan melibatkan partisipasi dari masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung untuk pembangunan daerah tetapi belum cukup baik melakukan transparansi dalam memberikan akses informasi yang siap tepat waktu, mudah dipahami, bebas diperoleh, terhadap akses informasi yang diberikan oleh pemerintah terhadap masyarakat.

2. Peningkatan pengendalian internal di setiap Organisasi Pemerintah Daerah/OPD, dapat mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan karena pengendalian internal mengendalikan kinerja Organisasi Pemerintah Daerah/OPD, sehingga dapat mencegah kesalahan pegawai saat menjalankan tugas, pada akhirnya dapat melindungi aset pemerintah.

### 5.2 Saran

1. Organisasi Pemerintah Daerah/OPD dapat menyediakan layanan *customer service* berupa website agar masyarakat bisa menyalurkan kritik dan saran secara online sehingga pemerintah daerah dapat menerima langsung masukan masyarakat secara cepat dan masyarakat dapat mudah memberikan saran dimana dan kapan saja untuk pembangunan daerah.
2. Organisasi Pemerintah Daerah/OPD konsisten di dalam menerapkan SOP sesuai dengan fungsi dan tugas kinerja agar setiap fungsi dan kewenangan yang melekat pada jabatan tidak digunakan menyimpang dari SOP/ Standar Operasional Prosedur yang pada akhirnya memperkuat sistem pengendalian

- internal.
3. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat melengkapi kekurangan dan melanjutkan variabel-variabel yang tidak diteliti pada penelitian ini agar bisa menjadi suatu pembelajaran untuk kita semua dalam hal memajukan pemerintah kota ambon.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmito, Rahardjo, 2011. *“Pengelolaan Pendapatan Dan Anggaran Daerah*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Adrian, Sutedi. 2012. *“Good Corporate Governance”*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Bastian, Indra. 2007. *“Audit Sektor Publik”*. Jakarta: Salemba Empat.
- Celviana Winidyaningrum dan Rahmawati, 2010. Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Pengendalian Intern Akuntansi (Studi Empiris di Pemda Subosukawonosraten). (Purwokerto: SNA XIII).
- Darwanis, M, dan D. Dwi. 2009. Pengaruh Kapasitas Sumberdaya manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi Universitas Syiah Kuala* Vol. 2. No. 2 Juli : 133151.
- Dita Arfianti. 2011. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Batang), Universitas Diponegoro, Semarang.
- Fikri, M. Ali, Inapty, B. Adha., Martiningsih, R. R. S. Pancawati. 2015. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Aparatur Dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada SKPD-SKPD Di Pemprov. NTB). *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi* 18.
- Ghozali, I. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS* 19. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Governmental Accounting Standards Boards (GASB). 1999. Concepts Statement No. 1: Objectives Of Financial Reporting In Governmental Accounting Standards Boards Series Statement No. 34: Basic Financial Statement And Management Discussion And Analysis For State And Local Government. Norwalk.
- Harlinda, 2016, Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau), *Jurnal Sorot* Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Riau.
- Harnovinsah, *Metodologi Penelitian*. Pusat Bahan Ajar dan Elearning. Universitas Mercu Buana.
- Hidayat. 1986. *Teori Efektifitas Dalam Kinerja Karyawan*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- <https://kumparan.com/ambonnesia/bpk-laporan-keuangan-kota-ambon-raih-wtp->

- [27431110790549262  
https://www.malukuprov.go.id/index.php/2016-10-06-01-22-07/dinas?start=12](https://www.malukuprov.go.id/index.php/2016-10-06-01-22-07/dinas?start=12)
- <http://www.tribunnews.com/nasional/2017/10/04/bpk-temukan-1137-ketidakpatuhan-dalam-laporan-keuangan-pemerintah>
- <https://terasmaluku.com/pemkot-ambon-kembali-raih-wtp-atas-laporan-keuangan/>
- <https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/18/05/04/p879mh335-iai-nilai-kualitas-pelaporan-keuangan-pemerintah-rendah>
- <https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/18/05/04/p879mh335-iai-nilai-kualitas-pelaporan-keuangan-pemerintah-rendah>
- [https://www.researchgate.net/publication/326161268\\_Kualitas\\_Infomasi\\_Laporan\\_Keuangan\\_Pemerintah\\_Daerah\\_Dan\\_Faktor\\_Yang\\_Memengaruhinya\\_The\\_Quality\\_of\\_Information\\_in\\_Local\\_Government\\_Financial\\_Statement\\_and\\_the\\_Influential\\_Factors](https://www.researchgate.net/publication/326161268_Kualitas_Infomasi_Laporan_Keuangan_Pemerintah_Daerah_Dan_Faktor_Yang_Memengaruhinya_The_Quality_of_Information_in_Local_Government_Financial_Statement_and_the_Influential_Factors)
- Husaini Usman, dan Purnomo Setiady Akbar, 1996, , *Metodologi penelitian sosial*, PT. Bumi Aksara Jakarta. Cetakan 1.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2009. Laporan Keuangan Daerah, Mengapa Mutu Laporan Keuangan Daerah menurun? Pemerintah Daerah Belum Paham Akuntansi ? Penerapan SAP Baru Kulit Luarnya.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 1994. *Standar Akuntansi Keuangan*, Jakarta: Salemba Empat.
- I Wayan Hari Kurniawan. 2018. Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Penyusunan Rpjmd Di Bappeda Provinsi Lampung (Studi Dalam Tahap Musrenbang Dan Penetapan Rpjmd 2015-2019 Provinsi Lampung).
- I Putu Upabayu Rama Mahaputra dan I Wayan Putra. 2014. ‘Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah,’ *jurnal akuntansi Universitas Udayana* 8.2.
- Mardiasmo, 2002. “*Elaborasi Reformasi Akuntansi Sektor Publik: Telaah Kritis Terhadap Upaya Aktualisasi Kebutuhan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*. (JAAI Volume 6 No. 1).
- Marsdenia, 2016.” Kualitas Informasi Laporan Keuangan Entitas Sektor Publik Daerah X”, *Jurnal Of Vocational Program University Indonesia*, Volume 4. Nomor 1. Januari – Juni 2016.
- Masdupi, 2005. ”Analisis Dampak Struktur Kepemilikan Pada Kebijakan Hutang Dalam Mengontrol Konflik Keagenan.” *Jurnal Ekonomi Bisnis* vol.20, No.1. Desember .
- Moh., Nazir, 2009. *Metode Penelitian*, (Cet.VII; Jakarta: Graha Indonesia).
- Nur Fitri Dewia, Ferdous Azama and Siti Khalidah Mohd Yusoff, 2019, Factors Influencing The Information Quality Of Local Government Financial Statement And Financial Accountability, *Journal Management Science Letter*, 1373–1384.
- Payanta, 2006 :Pengaruh Kualitas Auditor, Independensi, Dan Opini Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan” , *Jurnal Bisnis Dan Manajemen* Vol 6 No 1.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Riris Dwi Wahyu Rahmawati, 2015 : Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Kas pada PT.





- Graha Sarana Gresik.
- Sahya Anggra. 2012. *Ilmu Administrasi Negara Kajian Konsep, Teori Dan Fakta Dalam Upaya Menciptakan Good Governance*. Penerbit: Bandung;Pustaka Setia Cetakan 1.
- Sanusi, A. 2013. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta : Salemba Empat.
- Sedarmayanti, 2012. *Good Governance Kepemerintahan Yang Baik Bagian Pertama* edisi revisi , Mandar Maju, Bandung.
- Sedarmayanti, 2012. *Good Governance Kepemerintahan Yang Baik Bagian Kedua* edisi revisi , Mandar Maju, Bandung
- Sunyoto, Danang. 2011. *Analisis Regresi dan Uji Hipotesis*. Yogyakarta: CAPS.
- Tantriani Sukmaninggrum, 2012. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Semarang)*.
- Tohardi, 2008. *Petunjuk Praktis Penelitian Sosial*, Bandung: Mander Maju.

# **Pengaruh Penilaian Tindakan Supervisi dan Pengalaman Kerja dengan Pendekatan Dyadic Terhadap Kepuasan Kerja Auditor**

(Studi Empiris Pada Bpk, Inspektorat Kota Dan Provinsi Maluku)

Christina Sososutiksno<sup>1\*</sup>, Yuyun Yuniarti Layn<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Pattimura

<sup>2</sup>Universitas Pattimura

---

## **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk membandingkan penilaian yang berasal dari supervisor dan subordinat, dan untuk mengetahui pengaruh penilaian supervisor maupun subordinat atas tindakan supervisi dan pengalaman kerja dengan pendekatan dyadic terhadap kepuasan kerja auditor pada BPK, Inspektorat Kota dan Provinsi Maluku.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan sumber data primer yang diperoleh melalui instrument kuesioner serta menggunakan metode *purposive sampling* atau sampel bertujuan untuk pengambilan sampel. Selain itu data dalam penelitian ini dianalisis dan diuji dengan menggunakan program statistik SPSS dan menggunakan 2 tahap pengujian hipotesis; pengujian beda dan pengujian regresi berganda.

Penelitian ini menunjukkan bahwa secara statistik penilaian kedua pihak tersebut (*supervisor/atasan dan subordinat/bawahan*) tidaklah berbeda karena tindakan supervisi yang dilakukan untuk sektor publik adalah merata, baik untuk aspek kepemimpinan dan mentoring, kondisi kerja dan penugasan. Selain itu, hasil lain menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara penilaian subordinat dan superior atas tindakan supervisi terhadap kepuasan kerja auditor, serta terdapat hubungan positif antara penilaian subordinat dan superior atas pengalaman kerja terhadap kepuasan kerja auditor di BPK, Inspektorat Kota dan Provinsi Maluku.

**Kata Kunci:** *Tindakan Supervisi, Pengalaman kerja, Kepuasan Kerja, Dyadic Supervisor dan Subordinat BPK , Inspektorat Kota dan Inspektorat Provinsi.*

## **ABSTRACT**

*The purpose of this study was to compare the supervisory and subordinate assessments, and to determine the effect of supervisory and subordinate assessments on supervision actions and work experience using a dyadic approach on auditors' job satisfaction at the BPK, City Inspectorate and Maluku Province.*

*This study is an empirical study with primary data sources obtained through a questionnaire instrument and using purposive sampling method or sample aims to take samples. In addition, the data in this study were analyzed and tested using the SPSS statistical program and using 2 stages of hypothesis testing; different testing and multiple regression testing.*

*This research shows that statistically the assessment of the two parties (supervisor / superior and subordinate / subordinate) is not different because the supervision measures taken for the public sector are even, both for the aspects of leadership and mentoring, working conditions and assignments. In*

*addition, other results show that there is a positive relationship between subordinate and superior assessments of supervision measures on auditor job satisfaction, and there is a positive relationship between subordinate and superior assessments of work experience on auditor job satisfaction at BPK, City Inspectorate and Maluku Province.*

**Keywords:** *Supervision Action, Work Experience, Job Satisfaction, Dyadic Supervisors and Subordinates of BPK, City Inspectorate and Provincial Inspectorate.*

---

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Tindakan supervisi dan kepuasan kerja merupakan topik menarik dalam akuntansi manajemen, dikarenakan tindakan supervisi dan kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja dan pencapaian tujuan organisasi suatu entitas. Dalam profesi akuntan publik, supervisi merupakan hal yang sangat penting, yang disebutkan dalam Statement on Auditing Standard (SAS) Nomor 22 tentang Standar Lapangan Pertama berbunyi *“The work is to be adequately planned and assistants, if any, are to be properly supervised/ Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya”*.

Dalam tindakan supervisi terdapat dua pihak yang terlibat, yaitu pihak yang melakukan tindakan supervisi dan pihak yang menerima tindakan supervisi. Patten (1995) menemukan hasil bahwa kepuasan kerja akuntan pemula di kantor akuntan publik dipengaruhi oleh sikap supervisor mereka dalam aspek kepemimpinan dan mentoring, aspek kondisi kerja, dan aspek penugasan.

Tindakan supervisi wajib dilakukan oleh auditor jika dalam penugasannya menggunakan asisten sesuai dengan Standar Pekerjaan Lapangan yang pertama (SPAP, 2001). *The Accounting Education Change Commision (AECC)* sebagai suatu badan yang menangani pendidikan akuntan menerbitkan *Issues Statement No.4* yang ditujukan untuk

meningkatkan kepuasan kerja akuntan pemula. Salah satu isinya adalah *Recommendations for Supervisors of Early Work Experience* yang mendorong pemberdayaan akuntan pemula di kantor akuntan publik melalui tindakan supervisi yang tepat dan bisa menumbuhkan motivasi intrinsik sehingga kepuasan kerja akuntan pemula meningkat (Nurahma dan Indriantoro, 2000). Tindakan supervisi terbagi menjadi tiga aktivitas yang terdapat dalam *AECC Statement NO. 4* yaitu : aspek kepemimpinan dan mentoring, aspek kondisi kerja dan aspek penugasan.

Kenyataannya, auditor yang berpengalaman dan yang kurang berpengalaman mengalami tindakan supervisi yang berbeda. Hal ini bisa berdampak pada kepuasan kerja auditor yang dirasakan. Miller, Dkk (2001) melakukan studi tentang pengaruh diskusi verbal terhadap peningkatan motivasi dan kinerja auditor dengan pengalaman sebagai variabel moderating. Hasil studinya menunjukkan bahwa pada auditor yang kurang berpengalaman, dengan adanya diskusi verbal dapat meningkatkan motivasi dan kinerjanya. Namun pada auditor yang sudah berpengalaman, dengan adanya diskusi verbal malah menurunkan motivasi dan kinerja dibandingkan dengan auditor yang kurang berpengalaman.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) adalah suatu Lembaga Tinggi Negara yang bertugas melaksanakan pemeriksaan

pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara dan Merupakan satu – satunya auditor eksternal pemerintah serta mempunyai Kantor Perwakilan BPK-RI di seluruh Indonesia. Tugas pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK-RI (dalam hal ini adalah Kantor Perwakilan BPK-RI) dilakukan oleh para pemeriksa (auditor) dan dalam pelaksanaannya dilakukan tindakan supervise oleh atasan auditor agar tujuan pemeriksaan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Begitupun Inspektorat Provinsi Maluku dan Inspektorat Kota berperan sebagai auditor internal pemerintah, untuk menunjukkan pemerintahan yang baik dan bersih. Inspektorat daerah merupakan salah satu lembaga yang memiliki fungsi utama sebagai pengawasan internal pemerintah daerah.

### 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut.

1. Apakah ada perbedaan penilaian antara superior (atasan) dan subordinat (bawahan) atas tindakan supervisi sesuai rekomendasi AECC di BPK, Inspektorat Tk I dan Tk II ?
2. Apakah ada pengaruh penilaian superior atas tindakan supervisi terhadap kepuasan kerja auditor di BPK, Inspektorat Tk I dan Tk II ?
3. Apakah ada pengaruh penilaian subordinat atas tindakan supervisi terhadap kepuasan kerja auditor di BPK, Inspektorat Tk I dan Tk II ?
4. Apakah penilaian superior atas pengalaman kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja auditor di BPK, Inspektorat Tk I dan Tk II ?
5. Apakah penilaian subordinat atas pengalaman kerja berpengaruh

terhadap kepuasan kerja auditor di BPK, Inspektorat Tk I dan Tk II ?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk :

1. Menemukan bukti empiris mengenai perbedaan penilaian antara superior dan subordinat atas tindakan supervisi sesuai rekomendasi AECC di BPK, Inspektorat Tk I dan Tk II.
2. Menguji dan memberikan bukti empiris tentang pengaruh penilaian superior atas tindakan supervisi terhadap kepuasan kerja auditor di BPK, Inspektorat Tk I dan Tk II.
3. Menguji pengaruh penilaian subordinat atas tindakan supervisi terhadap kepuasan kerja auditor di BPK, Inspektorat Tk I dan Tk II.
4. Menguji pengaruh penilaian superior atas pengalaman kerja terhadap kepuasan kerja auditor di BPK, Inspektorat Tk I dan Tk II.
5. Untuk menguji pengaruh penilaian subordinat atas pengalaman kerja terhadap kepuasan kerja auditor di BPK, Inspektorat Tk I dan TK II.

## 2. TELAAH LITERATUR DAN PERUMUSAN

### 2.1. Landasan Teori

#### 2.1.1. Teori Ketidaksesuaian (*Discrepancy theory*)

Teori ini dipelopori oleh Porter (1961) yang mengukur kepuasan kerja dengan menghitung selisih antara apa yang seharusnya dengan kenyataan yang dirasakan. Porter mendefinisikan kepuasan kerja sebagai “*the differences between how much of something these should be must how much there is now*”. Locke (1969) menjelaskan bahwa kepuasan kerja seseorang tergantung

pada *discrepancy* antara apa yang seharusnya (*should be*) yang terdiri dari *expectation*, *needs* dan *value* dengan apa yang menurut persepsinya telah diperoleh dalam pekerjaan.

Seseorang akan merasa puas jika tidak terdapat perbedaan antara yang diinginkan dengan persepsinya atas kenyataan. *Discrepancy* bisa positif bisa juga negatif. *Discrepancy* positif terjadi jika apa yang diperoleh lebih besar dari apa yang diharapkan, artinya orang tersebut memperoleh kepuasan yang lebih besar. *Discrepancy* negatif terjadi jika apa yang diperoleh lebih kecil dari apa yang diharapkan, artinya orang tersebut memperoleh ketidakpuasan yang lebih besar.

### **2.1.2. Teori Keadilan (*Equity theory*)**

Teori yang dikembangkan oleh Adams (1963) ini mengungkapkan bahwa orang akan merasa puas atau tidak puas, tergantung pada ada atau tidaknya keadilan dalam suatu situasi, khususnya situasi kerja. Teori ini membandingkan antara *input* dan *outcomes* yang dimilikinya dengan *input* dan *outcomes* orang lain. Jika hasil perbandingannya dirasa cukup adil, maka individu akan berada dalam kondisi puas. Jika perbandingannya tidak seimbang dan menguntungkan (*over compensation inequity*), dalam arti hasil perbandingannya lebih besar dari orang lain yang dijadikan pembanding, maka individu bisa mengalami kepuasan bisa pula tidak. Jika perbandingannya tidak seimbang, tetapi merugikan (*under compensation inequity*) maka individu akan cenderung berada dalam kondisi ketidakpuasan.

### **2.1.3. Teori Dua Faktor (*Two factors theory*)**

Teori ini dikemukakan oleh Herzberg. Hasil dari penelitian Herzberg menunjukkan bahwa situasi yang mempengaruhi sikap seseorang

terhadap kerja terbagi menjadi dua golongan, yaitu: *satisfiers/ motivator* dan *dissatisfiers/ hygiene factors*. *Satisfiers* adalah factor – factor atau situasi yang bisa menimbulkan kepuasan kerja, yaitu karakteristik pekerjaan yang relevan dengan kebutuhan – kebutuhan, urutan lebih tinggi seseorang serta perkembangannya, psikologinya, mencakup pekerjaan yang menarik, penuh tantangan, kesempatan berprestasi, dan penghargaan dan promosi (*achievement, recognition, work it self, responsibility, advancement*). Jika alam pekerjaan terdapat factor – factor ini maka kepuasan kerja akan terwujud. *Dissatisfiers* adalah factor – factor yang menjadi sumber ketidakpuasan, yang terdiri dari: *compacy policy, interpersonal relations working conditions, jobsecurities, dan status*(Wexley dan Yukl, 1977). Perbaikan terhadap kondisi ini akan mengurangi atau menghilangkan ketidakpuasan kerja tetapi tidak akan menimbulkan kepuasan kerja karena faktor tersebut bukan sumber kepuasan kerja.

### **2.1.4. Tindakan supervisi**

Supervisi merupakan proses yang berkelanjutan untuk mengawasi atau mengarahkan pekerjaan yang dimulai dengan perencanaan dan diakhiri dengan penyimpulan atas jalannya tugas. Seiring dengan perjalanan waktu, supervisi dikatakan sebagai proses yang dinamis. Pada awalnya, supervisi bersifat kaku atau otoriter. Jika seorang karyawan tidak bekerja seperti yang diperintahkan maka ia akan dihukum. Pada masa sekarang ini, supervisi diwarnai dengan gaya kepemimpinan partisipatif (Comstock, 1994). Parker et al (1989) mengatakan bahwa kebutuhan yang paling penting bagi akuntan yang berkaitan dengan kerja adalah evaluasi secara *fair* (adil) terhadap dirinya, kemudian kebutuhan

kedua yang penting adalah supervisi yang kompeten dan *fair*.

Ketika pekerja merasakan bahwa supervisor berlaku adil dan kompeten serta yakin bahwa supervisor mempunyai niat baik dan sepenuh hati maka kepuasan akan cenderung meningkat atau naik. Sebaliknya, ketika pekerja memandang bahwa supervisor berlaku tidak adil, tidak kompeten atau mendorong motivasi pribadi maka kepuasan akan cenderung menurun (Trempe et al, 1985). Sebagian orang cenderung menyukai pekerjaan yang menantang dengan tetap mampu untuk menangani tingkat kesibukannya tetapi tidak terlalu memberatkan (*overly exhausting*). Dengan kata lain bahwa pekerjaan tersebut timbul pada tingkat kepuasan yang sedang atau medium dimana beban pekerjaan tersebut tidak terlalu tinggi yang menyebabkan *stress* ataupun terlalu rendah yang menyebabkan kebosanan.

Secara umum, pekerjaan yang memberikan sekurang-kurangnya beberapa variasi dalam aktivitasnya akan memberikan tingkat kepuasan kerja yang lebih tinggi disbanding aktivitas yang statis dan penuh dengan pengulangan (Curry et al, 1986). Bagi akuntan publik, tindakan supervisi di atur dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) pada Standar Pekerjaan Lapangan yang pertama, yang berbunyi : “pekerjaan harus direncanakan sebaik – baiknya dan jika digunakan asisten harus di supervisi dengan semestinya” (SPAP, 2001).

### **2.1.5. Pengalaman kerja**

Penelitian tentang pengalaman dalam bidang auditing telah banyak dilakukan oleh berbagai pihak. Bedard (1989) berpendapat bahwa berbagai macam pengalaman individu akan mempengaruhi pelaksanaan suatu tugas. Seseorang yang berpengalaman akan memiliki cara berpikir yang lebih

terperinci, lengkap, dan *sophisticated* dibandingkan dengan orang yang belum berpengalaman. Mohammadi dan Wright (1987) menunjukkan bahwa staff yang berpengalaman akan memberikan pendapat yang berbeda dengan auditor junior untuk tugas – tugas yang sifatnya tidak terstruktur. Karakteristik tugas yang tidak terstruktur adalah tugas tersebut unik, tidak ada petunjuk pasti untuk dijadikan acuan, lebih cenderung berupa prediksi serta banyak membutuhkan intuisi dalam membuat keputusan.

Purnamasari (2005 : 24) memberikan kesimpulan bahwa karyawan yang memiliki pengalaman kerja yang tinggi akan memiliki keunggulan dalam beberapa hal diantara : 1) mendeteksi kesalahan, 2) memahami kesalahan dan 3) mencari penyebab munculnya kesalahan. Keunggulan tersebut bermanfaat bagi pengembangan keahlian. Berbagai macam pengalaman yang dimiliki individu akan mempengaruhi pelaksanaan suatu tugas. Seseorang yang berpengalaman memiliki cara berpikir yang lebih terperinci, dan lengkap dibandingkan seseorang yang belum berpengalaman.

Pengalaman kerja seseorang menunjukkan jenis – jenis pekerjaan yang pernah dilakukan seseorang dan memberikan peluang yang besar bagi seseorang untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik. Semakin luar pengalaman kerja seseorang, semakin terampil melakukan pekerjaan dan semakin sempurna pola berpikir dan sikap dalam bertindak untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Puspaningsih, 2004 : 14)

### **2.1.6. Pendekatan Dyadic**

Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan pada kedua belah pihak, atasan dan bawahan secara berpasangan (*dyadic*). Pendekatan ini dikembangkan oleh Dansereau et al.

(1975) dalam Choo dan Tan (1997). Pendekatan dyadic ini mengakui adanya kemungkinan dalam suatu kelompok terdapat dua pihak (superior dan subordinat) yang mana perlakuan superior terhadap semua bawahannya tidak sama satu dengan yang lain.

Cherrington (1994) mengatakan bahwa dalam suatu hubungan saling ketergantungan, kedua pihak (superior dan subordinat) saling mengembangkan ekspektasi terhadap satu sama lain. Ketika ekspektasi ini “dilanggar” (*violated*), konflik atau problem serius kemungkinan dapat terjadi.

#### **2.1.7. Kepuasan Kerja**

Kepuasan kerja didefinisikan sebagai suatu sikap umum yang merupakan hasil dari beberapa sikap khusus terhadap factor – factor pekerjaan, penyesuaian diri, dan hubungan sosial individu di lingkungan kerja (As'ad, 1995). Menurut Luthans (1989), kepuasan kerja merupakan suatu keadaan emosional yang positif yang diperoleh dari hasil penilaian kerja atau pengalaman kerja seseorang. Seorang individu yang memiliki tingkat kepuasan kerja tinggi akan menunjukkan sikap yang positif terhadap pekerjaannya (Robbins, 1989).

Kepuasan kerja berpangkal dari berbagai aspek pekerjaan seperti upah, kesempatan promosi, supervisor, dan rekan kerja. Kepuasan kerja juga berasal dari faktor–faktor lingkungan kerja seperti gaya supervisi, kebijaksanaan dan prosedur, keanggotaan kelompok kerja, kondisi kerja, dan tunjangan. Kepuasan kerja mendapat tempat yang sangat penting bagi perilaku organisasi (Luthans, 1989).

Faktor – faktor yang penting bagi kepuasan kerja dapat dilihat dari tiga segi. Pertama, kepuasan kerja merupakan faktor emosional yang

tidak dapat dilihat, tetapi hanya bisa diperkirakan. Kedua, bila hasil pekerjaan telah memenuhi atau melampaui yang diharapkan, misalnya kalau seseorang telah bekerja keras, namun menerima imbalan yang lebih sedikit, mungkin yang bersangkutan akan bersikap kurang menyenangkan (negatif) pada teman sekerja, atasan atau juga pada pekerjaannya. Kebalikannya kalau diperlakukan dengan baik dan dibayar dengan cukup, maka sikapnya akan cenderung positif. Ketiga, kepuasan kerja merupakan beberapa sikap yang berhubungan dengan pekerjaan, dalam hal ini terdapat lima dimensi sebagai sifat dari kerja yang akan mempengaruhi perilaku yaitu pekerjaan itu sendiri, imbalan, kesempatan promosi, supervisi, dan rekan kerja.

Seseorang yang memiliki tingkat kepuasan kerja yang tinggi akan menampakkan sikap yang professional terhadap pekerjaannya, sedangkan seseorang yang tidak atau kurang memperoleh kepuasan dalam bekerja akan menampakkan sikap yang sebaliknya. Sikap positif yang dimaksud dapat berupa rendahnya tingkat ketidakhadiran karyawan, produktivitas karyawan yang tinggi, dan rendahnya tingkat *turnover* yang terjadi, sedangkan sikap negatif berupa tingginya tingkat ketidakhadiran dan *turnover* karyawan dan rendahnya produktivitas.

#### **2.2. Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian telah dilakukan guna memperoleh bukti adanya suatu hubungan antara berbagai aspek yang berkaitan dengan tindakan supervisi dan tingkat kepuasan kerja bagi auditor. Diantaranya terdapat penelitian yang menguji hubungan antara tindakan supervisi yang direkomendasikan oleh AECC dengan tingkat kepuasan kerja auditor pada level bawah (Patten, 1995;

Nurrahma, 1998; Haryoko, 1996; dan Martiah, 2000). Patten (1995) meneliti tentang hubungan penelitian tindakan supervisi dengan kepuasan kerja. Penelitian yang dilakukan Patten (1995) menggunakan penilaian yang dilakukan oleh satu pihak saja, yaitu subordinat. Hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya hubungan positif antara tindakan supervisi dengan kepuasan kerja auditor junior.

Martiah (2000) melakukan pengembangan atas penelitian Patten (1995) tentang hubungan tindakan supervisi dengan kepuasan kerja auditor junior dengan menambahkan superior sebagai pihak yang melakukan penilaian tindakan supervisi melalui pendekatan dyadic. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tindakan supervisi berhubungan negatif dengan kepuasan kerja auditor junior. Syafri Rahman (2006) melakukan pengembangan atas penelitian Patten (1995) dan Martiah (2000) tentang pengaruh penilaian tindakan supervisi dengan pendekatan dyadic terhadap kepuasan kerja auditor junior. Hasil penelitian ini mendukung penelitian (Patten, 1995; Nurrahma, 1998; dan Haryoko 1999) yang menunjukkan adanya hubungan positif antara tindakan supervisi dengan kepuasan kerja auditor junior.

Rostiana dan Tethool (2003) meneliti tentang dampak interaksi tindakan supervisi dan pengalaman kerja terhadap kepuasan kerja auditor. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa interaksi tindakan supervisi dengan pengalaman kerja berdampak negatif terhadap kepuasan kerja.

### 2.3. Pengembangan Hipotesis

#### 2.3.1. Tindakan Supervisi Dan Kepuasan Kerja

Dalam Parker et al (1989) dikatakan bahwa kebutuhan yang paling penting bagi auditor yang berkaitan dengan kepuasan kerja adalah evaluasi secara *fair* (adil)

terhadap dirinya. Kemudian, kebutuhan kedua yang penting adalah supervisi yang kompeten dan *fair*. Supervisi merupakan tindakan mengawasi atau mengarahkan penyelesaian pekerjaan agar pekerjaan yang dilaksanakan dapat terselesaikan dengan baik. Dalam tindakan supervisi terdapat tiga aktivitas menurut *AECC Statement NO. 4 Recommendations for Supervisors of Early Work Experience* yaitu : aspek kepemimpinan dan mentoring, aspek kondisi kerja dan aspek penugasan.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan dyadic yang dikembangkan oleh Dansereau et al (1975) dalam Choo dan Tan (1997). Pendekatan *dyadic* ini memiliki asumsi bahwa dalam suatu evaluasi kinerja *superior*, terdapat dua kelompok penilai (yang terdiri dari superior dan subordinat). Selain itu pendekatan ini juga mengakui kemungkinan bahwa *supervisor* tidak melakukan hal yang sama terhadap semua *subordinat* mereka. Dansereau et al (1975) dalam Choo dan Tan (1997) juga menyarankan bahwa pendekatan *dyadic* pantas digunakan untuk menganalisis hubungan *superior – subordinat* (atasan dan bawahan) karena *the dyadic* mencerminkan proses hubungan mereka. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti merumuskan hipotesis penelitian pertama (H1) sebagai berikut:

**H1 : Terdapat perbedaan penilaian antara superior dan subordinat atas tindakan supervisi sesuai rekomendasi AECC.**

Hipotesis penelitian tersebut kemudian dirinci sesuai dengan ketiga aspek yang ada dalam tindakan supervisi yaitu :

1. H1a : Terdapat Perbedaan penilaian antara superior dan subordinat atas tindakan supervisi pada aspek kepemimpinan dan mentoring.



2. H1b : Terdapat perbedaan penilaian antara superior dan subordinat atas tindakan supervisi pada aspek kondisi kerja
3. H1c : Terdapat perbedaan penilaian antara superior dan subordinat atas tindakan supervisi pada aspek penugasan.

### 2.3.2. Hubungan Superior, Tindakan Supervisi dan Kepuasan Kerja

Dengan menggunakan pendekatan *dyadic* memungkinkan terjadi konflik atau ketidaksepakatan dalam hubungan antara atasan dan bawahan, sehingga akan menimbulkan pengaruh terhadap kepuasan kerja. Ketidaksepakatan tersebut diakibatkan oleh perbedaan ekspektasi masing – masing pihak kepada pasangannya (atasan terhadap bawahan dan bawahan terhadap atasannya) yang disebabkan adanya egocentric bias.

Cherrington (1994) mengatakan bahwa dalam suatu hubungan saling ketergantungan, kedua pihak (superior dan subordinat) saling mengembangkan ekspektasi terhadap satu sama lain. Ketika ekspektasi ini terlanggar (*violated*), konflik atau problem serius kemungkinan dapat terjadi dan sebaliknya. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang dapat dibangun yaitu :

**H2 : Penilaian superior atas tindakan supervisi berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja auditor.**

### 2.3.3. Hubungan Subordinat, Tindakan Supervisi Dan Kepuasan Kerja

Penelitian oleh Belkaoui (1989) yang menyatakan bahwa interaksi antara superior (atasan) dan subordinat (bawahan) dapat digunakan sebagai alat analisis kerja subordinat. Interaksi tersebut dalam penelitian ini berupa tindakan supervisi (*supervisory action*).

Sementara itu, Luthans (1998)

mengatakan bahwa supervisi merupakan salah satu sumber penting yang mempengaruhi kepuasan kerja, disamping pekerjaan itu sendiri, gaji, promosi, dan kerjasama antar individu. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis penelitian yang dibangun yaitu:

**H3 : Penilaian subordinat atas tindakan supervisi berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja auditor.**

### 2.3.4. Hubungan Superior, Pengalaman Kerja dan Kepuasan kerja

Purnamasari (2005 : 24) memberikan kesimpulan bahwa karyawan yang memiliki pengalaman kerja yang tinggi akan memiliki keunggulan dalam beberapa hal diantara : 1) mendeteksi kesalahan, 2) memahami kesalahan dan 3) mencari penyebab munculnya kesalahan. Keunggulan tersebut bermanfaat bagi pengembangan keahlian. Berbagai macam pengalaman yang dimiliki individu akan mempengaruhi pelaksanaan suatu tugas. Seseorang yang berpengalaman memiliki cara berpikir yang lebih terperinci, dan lengkap dibandingkan seseorang yang belum berpengalaman.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis penelitian yang dibangun oleh peneliti yaitu :

**H4 : Penilaian superior atas pengalaman kerja berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja auditor.**

### 2.3.5. Hubungan Subordinat, Pengalaman Kerja Dan Kepuasan Kerja

Pengalaman kerja dapat memperdalam dan memperluas kemampuan kerja seseorang. Semakin sering seseorang melakukan pekerjaan yang sama, semakin terampil dan semakin cepat dia menyelesaikan pekerjaan tersebut. Semakin banyak

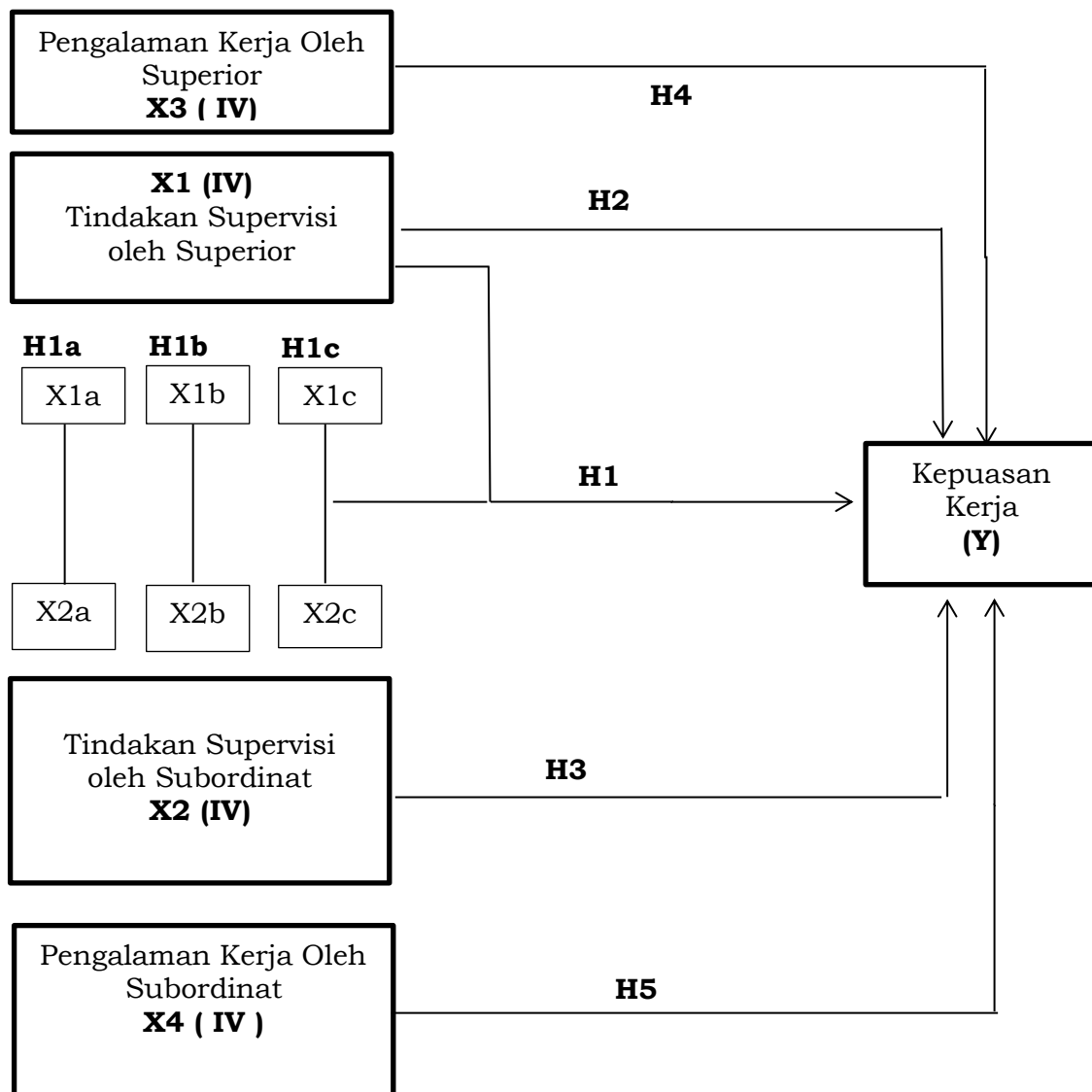
macam pekerjaan yang dilakukan seseorang, pengalaman kerjanya semakin kaya dan luas, dan memungkinkan peningkatan kinerja (Simanjuntak, 2005 : 45).

Peningkatan pengetahuan yang muncul dari penambahan pelatihan formal sama bagusnya dengan yang di dapat dari pengalaman khusus dalam rangka memenuhi persyaratan sebagai seorang professional. Berdasarkan

uraian diatas, maka hipotesis penelitian yang dibangun sebagai berikut :

**H5 : Penilaian Subordinat atas pengalaman kerja berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja auditor.**

Jika hipotesis – hipotesis tersebut digambarkan dalam sebuah model penelitian maka terlihat sebagai berikut:



**Gambar 2.1. Model Penelitian Tindakan Supervisi dan Pengalaman Kerja Terhadap Kepuasan Kerja**

Keterangan Gambar 2.1 :

X1 (IV) : Penilaian tindakan supervisi oleh superior (Independent Variabel)

X1a : Penilaian tindakan supervisi oleh superior pada aspek kepemimpinan

dan mentoring.

X1b : Penilaian tindakan supervisi oleh superior pada aspek kondisi kerja.

X1c : Penilaian tindakan supervisi oleh superior pada aspek penugasan.

X2 (IV) : Penilaian tindakan supervisi oleh subordinat (Independent Variabel)

X2a : Penilaian tindakan supervisi oleh superior pada aspek kepemimpinan dan mentoring.

X2b : Penilaian tindakan supervisi oleh subordinat pada aspek kondisi kerja.

X2c : Penilaian tindakan supervisi oleh subordinat pada aspek penugasan.

X3 (IV) : Penilaian pengalaman kerja oleh superior (Independent Variabel)

X4 (IV) : Penilaian pengalaman kerja oleh subordinat (Independent Variabel)

Y (DV) : Kepuasan kerja (Dependent Variabel)

### **3. METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel**

##### **3.1.1. Populasi**

Populasi penelitian ini adalah seluruh auditor yang bekerja di BPK Perwakilan Provinsi Maluku, Inspektorat Tk I dan Tk II.

##### **3.1.2. Sampel**

Sampel dalam penelitian ini adalah para auditor junior dan supervisor dari auditor yang melaksanakan audit untuk dan atas nama BPK Perwakilan Provinsi Maluku. Dalam penelitian ini, kriteria auditor junior di BPK, adalah auditor yang belum memperoleh Sertifikasi Peran Ketua Tim Junior (KTY). Ketua Tim Junior adalah peran yang dimiliki oleh pemeriksa BPK dengan tanggungjawab memimpin pelaksanaan tugas pemeriksaan dengan kompleksitas rendah dan disandang oleh pemeriksa pertama atau pemeriksa muda. Berdasarkan peraturan BPK No 04 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Pada Badan Pemeriksa Keuangan pasal 13 ayat (1) pemeriksa pertama harus lulus sertifikasi peran paling rendah sebagai Anggota Tim Junior. sedangkan di Inspektorat Kota dan Provinsi adalah auditor yang berpendidikan paling rendah diploma (D3) atau berpendidikan Sarjana (S1) yang memiliki pengalaman melaksanakan audit lebih kurang satu tahun.

Kriteria supervisor di BPK, adalah auditor yang menjabat sebagai kepala seksi dan/atau kepala sub auditorat yang telah memiliki sertifikasi peran Ketua Tim Senior (KTS). Ketua Tim Senior adalah peran yang dimiliki oleh pemeriksa BPK dengan tanggungjawab memimpin pelaksanaan tugas pemeriksaan dengan kompleksitas tinggi dan disandang oleh pemeriksa muda atau pemeriksa madya.

Berdasarkan peraturan BPK No 04 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Pada Badan Pemeriksa Keuangan pasal 13 ayat (3) pemeriksa madya harus lulus sertifikasi peran paling rendah sebagai Ketua Tim Senior. sedangkan di Inspektorat kota dan Provinsi adalah auditor yang berpendidikan serendah-rendahnya sarjana (S1) dan mempunyai pengalaman audit sekurang – kurangnya 5 (lima) tahun.

#### **3.2. Pengukuran Variabel**

##### **3.2.1. Pengukuran Variabel**

Adapun pengukuran variabel dalam penelitian ini sebagai berikut :

##### **a. Variabel Tindakan Supervisi**

Tindakan supervisi merupakan pengarah usaha asisten yang terkait dalam pencapaian tujuan audit dan penentuan apakah tujuan tersebut tercapai (SPAP, 1997). Supervisi mencakup pengarah usaha asisten dalam mencapai tujuan audit dan penentuan apakah tujuan tersebut tercapai (SA Seksi 311.5 – SPAP, 2001).

Tindakan supervisi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi hal – hal yang direkomendasikan oleh *The Accounting Education Change Commission (AECC)* yang terdiri dari tiga aspek, yaitu aspek kepemimpinan dan mentoring (*leadership and mentoring*), aspek kondisi kerja (*working condition*), dan aspek penugasan (*assignment*). Tindakan supervisi diukur dengan menggunakan instrument yang dibuat oleh Patten (1995) terdiri dari 22 item pernyataan. Instrument tersebut mengukur variabel aspek kepemimpinan dan mentoring dengan delapan pernyataan (pernyataan 1 s.d 8), aspek kondisi kerja dengan delapan pernyataan (pernyataan 9 s.d 16) dan aspek penugasan dengan enam pernyataan (pernyataan 17 s.d 22) dengan menggunakan lima skala likert, yang menunjukkan tingkat persetujuan atau tidak setuju terhadap pernyataan yang ada.

- b. Variabel Pengalaman kerja  
Pengalaman kerja merupakan suatu proses pembelajaran dan pertumbuhan perkembangan potensi bertingkah laku baik dari pendidikan formal maupun non formal atau bisa diartikan sebagai suatu proses yang membawa seseorang kepada suatu pola tingkah laku yang lebih tinggi. Suatu pembelajaran juga mencakup perubahan yang relatif tepat dari perilaku yang diakibatkan pengalaman, pemahaman dan praktek (Knoers dan Haditono, 1999 : 46). Pengalaman kerja merupakan pengalaman auditor dalam mengaudit kliennya dalam tiga aspek (lamanya penugasan, jumlah perusahaan yang diaudit dan perusahaan klien yang telah go public) dan terdiri dari 4 item pertanyaan dengan lima skala likert, yang menunjukkan tingkat

persetujuan atau tidak setuju terhadap pernyataan yang ada.

- c. Kepuasan kerja  
Kepuasan kerja didefinisikan sebagai perbedaan antara jumlah penghargaan yang diterima karyawan dengan jumlah yang diyakini seharusnya diterima oleh karyawan (Luthans, 1998). Variabel tingkat kepuasan kerja diukur dengan menggunakan alat ukur dengan menggunakan alat ukur *Minnesato Satisfaction Questionnaire (MSQ)* yang dikembangkan oleh Albrecht et al (1897). MSQ terdiri dari 20 item pertanyaan dengan lima skala likert. Angka 1 menunjukkan sikap sangat tidak puas dan angka 5 menunjukkan sikap sangat puas. Instrument ini dipilih karena pengukuran ini menghasilkan *convergent validity* tinggi, memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memprediksi kepuasan kerja dibandingkan dengan pengukuran lainnya, dan lebih komprehensif mengukur segi – segi spesifik dari kepuasan kerja (Scarpello dan Chambell, (1983).

### 3.3. Teknik Pengujian Hipotesa

Untuk kepentingan pengujian hipotesis, maka dilakukan 2 tahap pengujian, yaitu uji beda, dan uji regresi. Uji beda dilakukan menggunakan teknik analisis *Independent Samples T-test* yang dimaksudkan untuk membandingkan pelaksanaan tindakan Supervisi, pengalaman kerja dan Kepuasan Kerja antara auditor di BPK Perwakilan Provinsi Maluku, sedangkan uji regresi bertujuan untuk mengetahui pengaruh tindakan Supervisi yang dikeluarkan oleh AECC (aspek Kepemimpinan & *Mentoring*, aspek Kondisi Kerja dan aspek Penugasan) dan pengalaman kerja dengan Kepuasan Kerja.

Sebelum melakukan kedua pengujian hipotesis tersebut, diperlukan uji normalitas data agar hasil yang diperoleh tidak bias.

Pengujian ini juga untuk menentukan alat statistic yang akan dipakai (parametrik atau non – parametric). Setelah itu dilanjutkan dengan Uji beda dan uji regresi.

#### 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### 4.1. Hasil Pengumpulan Data

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh auditor yang bekerja pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Inspektorat Kota dan Provinsi Maluku. Sampel dipilih dengan menggunakan metode *purposive sampling* artinya sampel dipilih dengan menggunakan kriteria-kriteria tertentu. Kriteria yang dimaksud yaitu yang dapat menjadi sampel haruslah auditor yang belum mempunyai sertifikasi untuk junior auditor dan auditor yang sudah mempunyai sertifikasi untuk senior auditor dan sudah mempunyai pengalaman audit minimal 1 tahun untuk junior auditor dan 5 tahun untuk senior auditor. Alasan menggunakan auditor junior dan auditor senior adalah untuk mengetahui perbedaan tindakan supervisi. Data penelitian dikumpulkan dengan cara melakukan survei kuesioner yaitu mendatangi

secara langsung masing-masing objek penelitian untuk menyerahkan kuesioner dan mengumpulkannya kembali setelah selang waktu yang telah ditentukan. Dari 90 kuesioner yang disebar, masing-masing untuk Inspektorat Provinsi sebanyak 50 eksemplar, untuk Inspektorat Kota sebanyak 20 eksemplar, dan untuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebanyak 20 eksemplar, kuesioner yang kembali sebanyak 65 buah dan tidak ada kuesioner yang cacat atau tidak diisi dengan lengkap. Jadi total kuesioner yang dapat digunakan untuk melakukan analisis data selanjutnya sebanyak 65 buah yaitu sebesar 72.22 %.

##### Statistik Deskriptif

Statistika deskriptif variabel-variabel penelitian ini ditampilkan untuk mempermudah dalam mengetahui tanggapan umum responden terhadap variabel-variabel yang diteliti dalam penelitian ini antara lain tindakan supervisi (X1), pengalaman kerja (X2) dan kepuasan auditor (Y). Untuk mengetahui gambaran mengenai karakteristik variabel secara rinci dapat di lihat pada tabel 4.6 di bawah ini.

**Tabel 4.1 Statistik Deskriptif Variabel-Variabel Penelitian Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic
Tindakan Supervisi (X1)	65	35	48	40,25	,368	2,963
Pengalaman Kerja (X2)	65	5	10	8,00	,157	1,262
Kepuasan Kerja (Y)	65	11	33	26,69	,578	4,660
Valid N (listwise)	65					

Sumber : hasil penelitian (2018)

Dari tabel tabel 4.1 di atas dapat dilihat bahwa variabel tindakan supervisi (X1) dengan sampel (N) sebanyak 65 orang memiliki nilai minimum sebesar 35, nilai maksimum sebesar 48, rata-rata sebesar 40.25 dan standar deviasinya sebesar 2.963. Selanjutnya, untuk variabel pengalaman kerja (X2) dengan sampel (N) sebanyak 65 orang memiliki nilai minimum sebesar 5, nilai maksimum sebesar 10, rata-rata sebesar 8.00 dan standar deviasinya sebesar 1.262. Dan yang terakhir variabel kepuasan kerja auditor (Y) dengan sampel (N) sebanyak 65 orang memiliki nilai minimum sebesar 11, nilai maksimum sebesar 33, rata-rata sebesar 26.69 dan standar deviasinya sebesar 4.660.

**4.2. Uji Asumsi Klasik**

Pengujian asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui, menguji serta memastikan kelayakan model regresi yang digunakan dalam penelitian ini, dimana variabel tersebut terdistribusi secara normal, bebas dari multikolonieritas dan heteroskedastisitas. Uji asumsi klasik yang digunakan adalah Uji normalitas, Uji multikolonieritas, dan Uji heteroskedastisitas. Pengujian ini dilakukan sebelum melakukan

pengujian hipotesis (Ghozali, 2012). Uji asumsi klasik dalam penelitian ini dilakukan sebanyak dua kali. Pengujian dilakukan terhadap dua sampel yaitu supervisor dan subordinate. Pada Penelitian ini telah memenuhi Uji Asumsi klasik yaitu Uji Normalitas, Uji Multikolonieritas, Uji Heteroskedastisitas.

**4.3. Uji Beda dan Pengujian Hipotesis**

Untuk mengetahui adanya perbedaan tindakan supervisi antara supervisor dan subordinate mengenai aspek kepemimpinan, kondisi kerja dan penugasan dilakukan uji *Independent Sample T-Test*. Tujuan pengujian *Independent Sample T-Test* adalah ingin mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata (mean) antara dua populasi, dengan melihat rata-rata dua sampelnya. Lebih lanjut, tujuan *Independent Sample T-Test* untuk membandingkan rata-rata dari dua grup yang tidak berhubungan satu dengan yang lain, apakah kedua grup tersebut mempunyai rata-rata yang sama ataukah tidak secara signifikan.

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel 4.2 Hasil Uji Independent Samples T-Test Group Statistics**

	Kode	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Kepemimpinan dan Mentoring	Supervisor	20	12,55	1,050	,235
	Subordinat	45	12,47	,894	,133
Kondisi Kerja	Supervisor	20	15,75	1,410	,315
	Subordinat	45	15,89	1,283	,191
Penugasan	Supervisor	20	11,90	1,294	,289
	Subordinat	45	11,91	1,184	,176

**Independent Samples Test**

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
								Lower	Upper	
Kepemimpinan dan Mentoring	Equal variances assumed	,586	,447	,328	63	,744	,083	,254	-,424	,590
	Equal variances not assumed			,309	31,801	,760	,083	,270	-,467	,633
Kondisi Kerja	Equal variances assumed	,242	,625	-,391	63	,697	-,139	,355	-,849	,571
	Equal variances not assumed			-,377	33,604	,709	-,139	,369	-,888	,611
Penugasan	Equal variances assumed	,193	,662	-,034	63	,973	-,011	,327	-,665	,643
	Equal variances not assumed			-,033	33,750	,974	-,011	,339	-,700	,678

Sumber: data primer diolah 2018

Dari tabel 4.2 di atas dapat dilihat bahwa rata-rata perbedaan persepsi untuk aspek kepemimpinan pada responden supervisor adalah 12.55 sedangkan untuk kelompok responden subordinate adalah 12.47. Secara absolut jelas bahwa rata-rata persepsi tidak berbeda antara kedua kelompok responden tersebut. Dapat dilihat pula bahwa F hitung *levene test* 0.586 dengan probabilitas 0.447, karena probabilitas > 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima atau kedua group memiliki *variance* yang

sama untuk persepsi aspek kepemimpinan. Selanjutnya, dapat dilihat bahwa rata-rata perbedaan persepsi untuk aspek kondisi kerja pada responden supervisor adalah 15.75 sedangkan untuk kelompok responden subordinate adalah 15.89. Secara absolut jelas bahwa rata-rata persepsi tidak berbeda antara kedua kelompok responden tersebut. Dapat dilihat pula bahwa F hitung *levene test* 0.242 dengan probabilitas 0.625, karena probabilitas > 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima atau

kedua group memiliki *variance* yang sama untuk persepsi aspek kondisi kerja. Dan yang terakhir, dapat dilihat bahwa rata-rata perbedaan persepsi untuk aspek penugasan pada responden supervisor adalah 11.90 sedangkan untuk kelompok responden subordinate adalah 11.91. Secara absolut jelas bahwa rata-rata persepsi tidak berbeda antara kedua responden tersebut. Dapat dilihat pula bahwa *F* hitung levene test 0.193 dengan probabilitas 0.662, karena probabilitas > 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa *H0* diterima atau kedua group memiliki *variance* yang sama untuk kedua kelompok tersebut.

Lebih lanjut nilai *t* pada *equal variances assumed* untuk aspek kepemimpinan, kondisi kerja dan penugasan adalah < 1.96 dengan probabilitas signifikansi > 0.05 (two tail). Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan persepsi

antara supervisor dan subordinate terhadap aspek kepemimpinan, kondisi kerja dan penugasan, yang berarti bahwa hipotesis satu *H1abc* ditolak. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian (Martiah, 2000) yang menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara penilaian superior dan penilaian subordinat pada ketiga aspek tindakan supervisi.

#### 4.4. Analisis Regresi Berganda dan Pengujian Hipotesis

Berikut ini adalah uraian hasil pengujian regresi linear berganda dan *output table* pengujian dengan menggunakan bantuan program IBM SPSS versi 20.0 dalam bentuk *output model summary*, ANOVA (uji *F*), serta *coefficient* (uji *t*) seperti dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.3 Hasil Uji Persamaan Regresi (1)**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,788 <sup>a</sup>	,620	,576	3,662

a. Predictors: (Constant), Pengalaman Kerja (X2), Tindakan Supervisi (X1)

b. Dependent Variable: Kepuasan Kerja Supervisor (Y)

#### ANOVA<sup>a</sup>

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.	
1						
	Regression	372,587	2	186,294	13,893	,000 <sup>b</sup>
	Residual	227,963	17	13,410		
	Total	600,550	19			

a. Dependent Variable: Kepuasan Kerja Supervisor (Y)

b. Predictors: (Constant), Pengalaman Kerja (X2), Tindakan Supervisi (X1)



<b>Coefficients<sup>a</sup></b>					
<i>Model</i>	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>
	<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>		
<i>(Constant)</i>	1,768	5,863		,302	,767
1 <i>Tindakan Supervisi (X1)</i>	,454	,191	,457	2,376	,030
<i>Pengalaman Kerja (X2)</i>	1,402	,648	,416	2,163	,045

a. *Dependent Variable: Kepuasan Kerja Supervisor (Y)*

Sumber : hasil penelitian 2018

Dari tabel 4.3 di atas dapat dilihat bahwa model persamaan regresi yang pertama dalam penelitian ini adalah: **Y = 1.768 + 0.454 X1 + 1.402 X2**. Koefisien Determinasi (*Adjusted R Square*) sebesar 0.576 yang memiliki arti bahwa pengaruh variabel tindakan supervisi (X1) dan pengalaman kerja (X2) terhadap kepuasan kerja auditor (Y) adalah sebesar 57.6 % dan sisanya 42.4 % dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini. Nilai koefisien R yang positif menunjukkan pengaruh hubungan yang searah atau jika nilai variabel independen naik maka nilai variabel dependen juga naik.

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel bebas yang dimasukkan kedalam model. Setiap tambahan satu variabel bebas, maka R<sup>2</sup> pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. Oleh karena itu, banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai *Adjusted R<sup>2</sup>* pada saat mengevaluasi mana model regresi yang terbaik.

Secara parsial untuk variabel tindakan supervisi (X1) diperoleh nilai signifikansi 0.030 < 0.05 dengan beta *koefisien standardized* sebesar 0.457. Karena nilai signifikansi 0.030 < 0.05 maka H0 ditolak dan Ha diterima. Hal ini berarti H2 diterima atau terbukti signifikan, yang berarti bahwa

penilaian supervisor atas tindakan supervisi (X1) berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan kerja auditor (Y) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Inspektorat Kota dan Provinsi Maluku. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian (Rahman, 2006; dan Patten, 1995).

Selanjutnya, untuk variabel pengalaman kerja (X2) diperoleh nilai signifikansi 0.045 < 0.05 dengan beta *koefisien standardized* sebesar 0.416. Karena nilai signifikansi 0.045 < 0.05 maka H0 ditolak dan Ha diterima. Hal ini berarti H4 diterima atau terbukti signifikan, yang berarti bahwa penilaian supervisor atas pengalaman kerja (X2) berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan kerja auditor (Y) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Inspektorat Kota dan Provinsi Maluku. Hasil penelitian ini merupakan harapan peneliti. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Tethool dan Rustiana (2003) yang menyimpulkan bahwa ada pengaruh interaksi antara pengalaman dengan tindakan supervisi terhadap kepuasan kerja auditor dapat dijelaskan lebih lanjut. Pengaruh interaksi ini sifatnya negatif, artinya bahwa semakin banyak pengalaman auditor dalam mengaudit laporan keuangan klien dan dengan semakin tingginya tindakan supervisi malah menurunkan kepuasan kerja auditor. Sebaliknya semakin sedikit pengalaman auditor dalam mengaudit

dan semakin tinggi tindakan supervisi bisa menaikkan kepuasan kerja auditor. Bagi auditor yang kurang berpengalaman, tindakan supervisi diperlukan untuk meningkatkan kepuasan kerja, sebaliknya bagi auditor yang lebih berpengalaman tindakan supervisi yang berlebihan bisa menurunkan kepuasan kerja. Penelitian serupa yang dilakukan

Miller, dkk (2001) menemukan hasil bahwa diskusi verbal dalam *review* kertas kerja bisa meningkatkan motivasi dan kinerja para auditor yang kurang berpengalaman. Namun untuk auditor yang berpengalaman diskusi verbal dalam *review* kertas kerja auditor malah menurunkan motivasi dan kinerja auditor.

**Tabel 4.4 Hasil Uji Persamaan Regresi (2)**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,637 <sup>a</sup>	,405	,377	4,556

a. Predictors: (Constant), Pengalaman Kerja (X2), Tindakan Supervisi (X1)

b. Dependent Variable: Kepuasan Kerja Subordinate (Y)

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.	
1	Regression	594,234	2	297,117	14,316	,000 <sup>b</sup>
	Residual	871,677	42	20,754		
	Total	1465,911	44			

a. Dependent Variable: Kepuasan Kerja Subordinate (Y)

b. Predictors: (Constant), Pengalaman Kerja (X2), Tindakan Supervisi (X1)

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	10,106	3,440	,416	2,937	,005
	Tindakan Supervisi (X1)	,299	,098	,416	3,052	,004
	Pengalaman Kerja (X2)	1,039	,441	,321	2,355	,023

a. Dependent Variable: Kepuasan Kerja Subordinate (Y)

Sumber : hasil penelitian 2018

Tabel 4.4 di atas menjelaskan bahwa model persamaan regresi yang kedua dalam penelitian ini adalah: **Y = 10.106 + 0.299 X1 + 1.039 X2**. Koefisien Determinasi (*Adjusted R Square*) sebesar 0.377 yang memiliki arti bahwa pengaruh variabel tindakan supervisi (X1) dan pengalaman kerja (X2) terhadap kepuasan kerja auditor (Y) adalah sebesar 37.7 % dan sisanya

62.3 % dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini.

Secara parsial untuk variabel tindakan supervisi (X1) diperoleh nilai signifikansi  $0.004 < 0.05$  dengan beta koefisien *standardized* sebesar 0.416. Karena nilai signifikansi  $0.004 < 0.05$  maka H0 ditolak dan Ha diterima. Hal ini berarti H3 diterima atau terbukti signifikan, yang berarti bahwa

penilaian subordinate atas tindakan supervisi (X1) berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan kerja auditor (Y) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Inspektorat Kota dan Provinsi Maluku. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis yang dirumuskan serta konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya ( Patten, 1995; Nurrahma, 1998; dan haryoko, 1999). Selanjutnya, untuk variabel pengalaman kerja (X2) diperoleh nilai signifikansi  $0.023 < 0.05$  dengan beta koefisien standardized sebesar 0.321. Karena nilai signifikansi  $0.023 < 0.05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Hal ini berarti  $H_5$  diterima atau terbukti signifikan, yang berarti bahwa penilaian subordinate atas pengalaman kerja (X2) berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan kerja auditor (Y) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Inspektorat Kota dan Provinsi Maluku.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan diatas, maka kesimpulan yang dapat penulis rumuskan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Hasil uji hipotesis satu untuk (H1a) pada aspek kepemimpinan dan mentoring, (H1b) pada aspek kondisi kerja dan (H1c) pada aspek penugasan tidak menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara penilaian superior dan subordinate atas tindakan supervisi sesuai dengan rekomendasi AECC di BPK, Inspektorat Kota dan Provinsi Maluku. Kesimpulan penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya (Martiah, 2000).
2. Hasil uji hipotesis dua (H2) menunjukkan adanya pengaruh positif penilaian superior atas tindakan supervisi terhadap

kepuasan kerja auditor di BPK, Inspektorat Kota dan Provinsi Maluku. Kesimpulan penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya (Rahman, 2006)

3. Hasil uji hipotesis tiga (H3) menunjukkan adanya pengaruh positif penilaian subordinat atas tindakan supervisi terhadap kepuasan kerja auditor di BPK, Inspektorat Kota dan Provinsi Maluku. Kesimpulan penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya (Patten, 1995; Nurrahma, 1998; dan Haryoko, 1999) yang menyatakan bahwa tindakan supervisi berhubungan positif dengan kepuasan kerja karyawan.
4. Hasil uji hipotesis empat (H4) menunjukkan adanya pengaruh positif penilaian superior atas pengalaman kerja terhadap kepuasan kerja auditor di BPK, Inspektorat Kota dan Provinsi Maluku. Kesimpulan penelitian ini mendukung hipotesis penelitian yang dirumuskan dan harapan peneliti serta konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Tethool dan Rustiana (2003).
1. Hasil uji hipotesis lima (H5) menunjukkan adanya pengaruh positif penilaian subordinate atas pengalaman kerja terhadap kepuasan kerja auditor di BPK, Inspektorat Kota dan Provinsi Maluku. Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis yang dirumuskan. Sedangkan pada penelitian-penelitian sebelumnya, hipotesis penelitian ini tidak dirumuskan

### 5.2. Keterbatasan

Penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu:

1. Hasil penelitian ini menggunakan objek hanya terbatas pada instansi pemerintah saja. Selain

itu terdapat responden yang menolak mengisi kuesioner peneliti.

2. Penelitian ini tidak memperhitungkan adanya pengaruh-pengaruh psikologis terhadap probabilitas personal yang mungkin dimiliki oleh setiap individu atau responden.

### 5.3. Saran

Penelitian di masa mendatang diharapkan dapat menyajikan hasil penelitian yang lebih berkualitas lagi dengan adanya beberapa masukan mengenai beberapa hal diantaranya :

1. Bagi Auditor BPK Dan Inspektorat Perlunya tindakan supervisi dari unsur pimpinan khususnya dapat mengawasi pekerjaan hingga selesai dan dapat menyerahkan tugas sesuai dengan kesiapan dan kemampuan para auditor pemula. Supervisi dalam bentuk mentoring dan juga pelatihan secara kontinyu dapat menumbuhkan motivasi kerja sehingga dapat mencapai kinerja yang diharapkan.
2. Untuk peneliti mendatang, diharapkan ketika menentukan obyek penelitian, sebaiknya telah mengadakan pendekatan-pendekatan terlebih dahulu dengan obyek terkait sehingga masalah - masalah yang tidak diinginkan dalam proses penelitian dapat diatasi.

### DAFTAR PUSTAKA

Abdolmohammadi, Moh., dan Arnol Wright, (1987), " *An Examination Of The Effect Of Experience And Task Completion Audit Judgement*", *The Accounting Review*. Vol 1 pp. 1-13.

AECC (Accounting Education Change Commission) Issues Recommendations for

Supervisors of Early Work Experience No.4

- Albercht, W. S., Scoot W. B. dan David R. Field, (1897), "Toward Increased Job Satisfaction of Practicing CPAs", *Journal of Accountancy* pp. 61-66.
- Basset, G., 1994, *The Case Against Job Satisfaction*, Business Horizons, May-June, volume 37, No. 3.
- Belkaoui, Ahmed, 1989, *Behavioral Accounting*, New York : QUORUM Books
- BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) *Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan No.4, 2010*, tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Pada BPK.
- Cherrington, David J., 1994, *Organizational Behavior*, Second Edition, Massachusetts : Allyn & Bacon.
- Choo, Freddie, & Kim B. Tan, 1997, *A Study of the Relations Among Disagreement in Budgetary Performance Evaluation Style, Job-Related Tension, Job Satisfaction and Performance*, *Behavioral Research in Accounting*, Vol. 9.
- Comstock, Thomas W., 1994, *Fundamental of Supervision*, New York : Delmar Publisher Inc.
- Curry, J.P., Wakefield, D.S., Price, J.L., & Mueller, C.W., 1986, *On the causal order of job satisfaction and organizational commitment*, *Academy of Management Journal*, Volume 29.
- Emory dan Cooper (1991-243) dalam Agus Harjito (1996), <http://rac/uji.ac.id>.
- Gaertner, J.F. & Ruhe J.A., 1981, *Job-Related Stress in Public Accounting*, *Journal of Accountancy* (June).
- Ghozali, Imam, 2005, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Badan Penerbit Universitas

- Diponegoro, Semarang.
- Handoko (1998) dalam Skripsi-Tesis.com, *Pengaruh Kepuasan Kerja Dan Motivasi Kerja Terhadap Prestasi Karyawan Pada Pt.Amico dan Curio*, Semarang.
- Huda, Mitfahul. (2000), “Hubungan Tindakan Supervisi dengan Kepuasan Kerja”, *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 3 pp. 33-34.
- Locke, E.A., 1969, *What is job satisfaction?*, *Organizational Behavior and Human Performance*, Volume 4.
- Luthans, Fred, 1995, *Organizational Behavior*, 8th Edition, McGraw-Hill, Inc, USA.
- Nurahma, Myrna dan Nur Indriantoro, (2000), *Tindakan Supervisi dan Kepuasan Kerja di Kantor Akuntan Publik*, *Jurnal Riset Akuntansi*, Vol. 3 No. 1 hal 102-117, UGM.
- Parker, Lee D., Kenneth R. Fenis & David T. Otley, 1989, *Accounting for The Human Factor*, Australia : Prentice Hall.
- Patten, D.M. (1995). ‘*Supervisory Action and job Satisfaction: An Analysis of Difference Between Large and Small Public Accounting Firm*’. *Accounting Horizon*, 9 volume, no.2 June.
- Purnamasari, Dian Indri, 2005. *Pengaruh pengalaman kerja terhadap hubungan partisipasi dengan efektifitas sistem informasi*. *Jurnal riset akuntansi keuangan*.
- Puspaningsih, Abriyani, 2004. *Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepuasan kerja dan kinerja manajer perusahaan manufaktur*, JAAI.
- Puspita, Lisa Martiah Nila, (2000), “*Pengaruh Tindakan Supervisi terhadap Kepuasan Kerja Auditor Junior: Melalui Pendekatan Dyadic*”, *Thesis S2*. tidak dipublikasikan.
- Riggio, R.E., 1990, *Introduction to Industrial/Organizational Psychology*, Glenview, Illinois: Scott, Foresman/Little Brown Higher Education.
- Robbins, Stephen P., 1993, *Organizational Behavior*, Prentice Hall.
- Rustiana dan Tethool (2003). *Dampak Interaksi Tindakan Supervisi Dan Pengalaman Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Auditor*. *Studi Empiris Di KAP Yogyakarta, Semarang Dan Solo*. *Artikel Akuntansi* Volume 7, No.1, Hal. 12 – 20.
- Standar Profesional Akuntan Publik, (2001), *Ikatan Akuntan Indonesia*. Salemba, Jakarta.
- Syafri Rahman A (2006) . *Pengaruh Penilaian Tindakan Supervisi Dengan Pendekatan DYADIC Terhadap Kepuasan Kerja Auditor Yuniior*. *Studi Empiris Pada Kantor Perwakilan BPK – RI Dan KAP*. Tesis S2, Sekolah Pasca Sarjana Ilmu Akuntansi, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Tubbs, Richard. M., (1992), “The Affect of Experience on The Auditor’s Organization and Amount of Knowledge,” *The Accounting Review*, Vol 67. No.4 pp. 783-801.
- Wexley Kenneth N. and Yulk Gary A. (1985). *Perilaku Organisasi*. Edisi Bahasa Indonesia Jilid I, Jakarta: Bina Aksara.

## Implementasi Permendagri No.113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Hartina Husein<sup>1\*</sup>, Safaat Warandi<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Pattimura, Ambon, Maluku. Indonesia

<sup>2</sup>Ambon, Maluku. Indonesia

\*(hartina\_husein@yahoo.com)

---

### ABSTRAK

Dana desa yang dikucurkan pemerintah pusat mencapai 60 Triliun dan beberapa penelitian menunjukkan kelemahan aparatur desa dalam proses penyajian laporan pertanggungjawaban dana desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana pengelolaan laporan keuangan dana desa menurut permendagri No. 113/2014 agar diketahui kelemahan aparatur desa dari sisi pengelolaan keuangan dana desa yang terdiri tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi permendagri No.113/2014 tentang pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian ini merupakan studi kasus dengan Teknik pengambilan data berupa wawancara, observasi pada informan yang relevan. Dengan jenis data primer berupa jawaban atas daftar pertanyaan yang disusun berdasarkan 5 tahapan pengelolaan keuangan dana desa 1). Tahap Perencanaan, 2) Tahap Pelaksanaan, 3) Tahap Penatausahaan, 4) Pelaporan dan 5) pertanggungjawaban sesuai dengan permendagri No.113/2014 tentang pengelolaan keuangan dana desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada setiap ke lima tahapan pengelolaan keuangan dana desa ada beberapa yang tidak sesuai dalam penerapannya dalam pengelolaan keuangan dana desa.

**Kata Kunci:** *dana desa, permendagri no. 113/2014*

### ABSTRACT

*Village funds disbursed by the central government reach 60 trillion and several studies have shown weaknesses of village officials in the process of presenting village fund accountability reports. This study aims to analyze the extent of the management of village fund financial reports according to Minister of Home Affairs Regulation No. 113/2014 so as to know the weaknesses of the village apparatus in terms of financial management of village funds which consists of the stages of planning, implementation, administration, reporting and accountability for village financial management. Therefore, this study aims to analyze the implementation of Permendagri No.113 / 2014 concerning regional financial management.*

*This research is a case study with data collection techniques in the form of interviews, observations of relevant informants. With the type of primary data in the form of answers to a list of questions compiled based on 5 stages of village fund financial management 1). Planning Stage, 2) Implementation Stage, 3) Administration Stage, 4) Reporting and 5) accountability in accordance with Minister of Home Affairs Regulation No.113 / 2014 regarding financial management of village funds.*

*The results showed that at each of the five stages of financial management of village funds there were several that were not appropriate in their application in the financial management of village funds.*

**Keywords:** *village funds, Permendagri no. 113/2014*

---

## 1. PENDAHULUAN

Pada tahun 2018 pemerintah Indonesia mengalokasikan Dana Desa mencapai Rp.60 Triliun yang akan dibagikan ke sekitar 74.957 desa. Dengan penekanan pada desa yang memiliki ketertinggalan geografis, dan pemberian bobot yang lebih besar pada jumlah penduduk miskin tertinggi. Besaran anggaran tersebut akan diterima masing-masing desa sekitar Rp.800 juta. Nilai yang cukup besar untuk dikelola bagi desa yang sebelumnya tidak pernah mengelola anggaran desa sebesar itu. Untuk wilayah Kota Ambon sendiri menerima sebesar Rp.70 Miliar yang dibagikan ke 30 desa dengan besaran rata-rata per desa mencapai nilai Rp.2 M. Permasalahan timbul dalam pengelolaannya, dari 30 desa yang dibagikan hanya 12 desa yang mampu menyajikan laporan pengelolaan dana desa selain beberapa kelemahan pengelolaan keuangan dana public lainnya.

Guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas sesuai agenda good governance dan clean government, maka Pemerintah Kota Ambon melakukan penataan dan pengelolaan keuangan daerah, dengan melakukan perbaikan sistem penataan organisasi serta pembinaan sumber daya manusia (SDM) pengelola keuangan daerah dalam rangka mewujudkan tertib pengelolaan keuangan daerah, yang akan berdampak pada peningkatan jenis penilaian yang dikeluarkan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Terdapat 30 desa di lima Kecamatan di Kota Ambon menerima bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2015 sebesar 9,6 miliar

dan setiap desa menerima Rp 321 juta. Dari 30 desa dan negeri setidaknya ada sejumlah desa yang menerima dana yang lebih besar dibandingkan dengan desa lainnya diantaranya adalah Desa Batumerah. Anggaran tersebut akan diberikan sesuai dengan kriteria desa yakni jumlah penduduk sebesar 35%, jumlah penduduk miskin 25%, bobot luas wilayah 10% dan Indeks Kesulitan (Antara Maluku, 2015). Alokasi Dana Desa (ADD) diperuntukkan bagi pembangunan sarana dan prasarana fisik sebesar 50%, pelayanan pemerintah dan penguatan kelembagaan sebesar 30% dan pemberdayaan perempuan di desa atau negeri sebesar 20%).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, mengatur bahwa pemerintah desa mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan desanya. Untuk saat ini kendala umum yang dirasakan oleh sebagian besar desa adalah terkait pengelolaan keuangan yang baik dan benar. Seringkali tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan. Apa yang sudah dimusyawarahkan dan disepakati bersama, tidak diikuti pada saat pelaksanaannya.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti akan melakukan penelitian di Desa Batumerah yang terletak di Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Desa Batumerah terletak di pusat Kota Ambon yang memiliki jumlah penduduk terpadat dari berbagai kompleksitas elemen masyarakat. Alokasi Dana Desa sebesar

Rp1.857.103,00 yang bisa digunakan oleh pemerintah desa dalam melaksanakan program pembangunan dan pemberdayaan.

Berbagai macam potensi yang ada di desa Batumerah tentu saja dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika dikelola dengan baik. Pengelolaan keuangan desa yang dikelola berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 akan berdampak baik bagi Desa Batu Merah. Penelitian ini akan menganalisis implementasi pengelolaan keuangan dana desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban di Desa Batu Merah berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

Ini memuat tentang latar belakang penelitian, motivasi penelitian, kebaruan penelitian, pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian.

## **2. TELAAH LITERATUR DAN PERUMUSAN**

### **Fund Accounting Theory**

(William J Vatter 1947) dalam bukunya menjelaskan akuntansi dana sebagai alternatif teori entitas akuntansi dan teori proprietary. Teori ini menjelaskan bahwa dalam penyajian laporan keuangan melibatkan beberapa pihak terkait yakni:

1. Manajemen
2. Pemerintah sebagai perwakilan yang melakukan kontrol sosial
3. Pihak lainnya terkait kegiatan investasi dan pembiayaan

Vatter menegaskan bahwa pada teori entitas dan proprietary belum dapat menjelaskan proses akuntansi pada level praktikal. “Fund” yang dimaksudkan oleh Vatter merupakan unit operasi yang menjadi pusat perhatian pada entitas akuntansi. Teori akuntansi dana mengeliminir efek dan dampak personalitas

terhadap prosedur akuntansi dan kualitas laporan keuangan sebagaimana yang vatter nyatakan:

*“A fund ... cannot be identified with or related to a specific personality – there is no person for whom the fund accounts are kept or to whom the reports relate (Vatter, 1947, p.40)”*

Oleh Vatter Fund menjelaskan “Dana” sebagai konsep utama pada teori tersebut yang menjelaskan dana sebagai hasil atas potensi jasa yang diupayakan oleh organisasi/entitas.

Pada sektor public, dana merupakan suatu kesatuan entitas akuntansi yang dibentuk dalam suatu anggaran. Anggaran yang diusulkan harus disetujui oleh Lembaga legislatif sebelum dieksekusi oleh pihak eksekutif. Anggaran yang sudah dibentuk diperuntukkan untuk tujuan tertentu yang sudah direncanakan dalam proses perencanaan anggaran. Pengelolaan anggaran yang bertanggungjawab serta memenuhi syarat transparansi dan akuntabilitaslah yang dipertanggungjawabkan kepada public.

Dari sisi pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan desa, Pemerintah pusat menyalurkan sejumlah anggaran ke setiap pemerintahan desa untuk digunakan sesuai dengan peruntukannya yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat pedesaan melalui kemandirian berkarya dengan memaksimalkan perolehan dana desa untuk mengejar ketertinggalan pembangunan.

### **Dana Desa**

Menurut Permendagri No.113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah



Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerin-tahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa sendiri berbeda dengan alokasi dana desa (ADD) yang merupakan dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

### **Pengelolaan Keuangan Desa**

Menurut Permendagri No.113 Tahun 2014 dijelaskan bahwa “Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausaha-an, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Menurut permendagri tersebut, keuangan desa dikelola berda-sarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dengan adanya asas-asas tersebut, maka pemerintah desa dalam pengelolaan keuangannya diharap-kan akan transparan dalam pelaporan anggaran, bertanggung jawab dengan laporan keuangannya, melibatkan masya-rakat dalam pembentukan laporan keuangan, serta tertib dan disiplin dalam penggunaan anggaran.

Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan dengan tugas menyusun dan melaksanakan APBDesa, melakukan pengendalian terhadap kegiatan yang dibiayai APBDesa, menyuusn laporan tanggungjawab dan melakukan verifikasi bukt-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

### **Perencanaan**

Perencanaan keuangan desa mengacu pada perencanaan pembangunan kabupa-ten/kota.

Perencanaan pembangunan desa dibagi menjadi RPJM dan RKP. RPJM Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) adalah perencanaan yang dilakukan untuk rencana enam tahun. RPJM Desa dalam penyusunannya wajib melibatkan Musrenbangdes (Mus-yawarah Perencanaan Pembangunan Desa) secara partisipatif. Musrenbangdes sendiri diikuti oleh pemerintah desa, BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan unsur masyarakat desa, yang terdiri atas tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan/atau tokoh pendidikan. RPJM sendiri paling lama ditetapkan paling lama tiga bulan setelah pelantikan kepala desa. Sementara itu untuk RKP sendiri dibuat untuk jangka waktu lebih sedikit yaitu satu tahun. RKP desa disusun oleh pemerintah desa sesuai dengan informasi dari pemerintah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif desa dan rencana kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. RKP Desa berisi uraian tentang:

1. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya
2. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa
3. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola melalui kerja sama antar-desa dan pihak ketiga
4. Rencana program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota
5. Pelaksana kegiatan desa, yang terdiri atas unsur perangkat desa dan/atau unsur masyarakat desa.

### **Pelaksanaan**

Pelaksanaan keuangan desa merupakan serangkaian kegiatan yang

berkaitan dengan pengeluaran uang dan kegiatan di lapangan. Kegiatan yang dilakukan sesuai kewenangan desa yang diolah melalui rekening desa. Artinya, semua penerimaan dan pengeluaran desa harus dikelola melalui rekening desa yang didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Sehingga harus benar-benar dilakukan pencatatan transaksi secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pelaksanaan keuangan desa harus berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Tidak diperbolehkan melakukan transaksi belanja jika tidak ada dalam Perdes APBDesa.
2. Setiap transaksi penerimaan dan belanja harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
3. Seluruh bukti transaksi harus mendapat pengesahan kepala desa dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
4. Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APB Desa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran desa.

### **Penatausahaan**

Kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa. Penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausaha-kan, membayar dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes, Ardi Hamzah (2015). Bendahara desa wajib memper-tanggungjawabkan uang melalui

laporan pertanggungjawaban. Laporan pertang-gungjawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Menurut Permendagri No 113 tahun 2014 laporan pertanggungjawaban yang wajib dibuat oleh bendahara desa adalah:

1. Buku Kas Umum  
Buku kas umum digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun kredit, digunakan juga untuk mencatat mutasi perbankan atau kesalahan dalam pembukuan. Buku kas umum dapat dikatakan sebagai sumber dokumen transaksi.
2. Buku Kas Pembantu Pajak  
Buku pajak digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak.
3. Buku bank  
Buku bank digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank.

### **Pelaporan**

Tahap dalam pembuatan laporan keuangan desa adalah sebagai berikut:

1. Membuat rencana berdasarkan visi misi yang dituangkan dalam penyusunan anggaran.
2. Anggaran yang dibuat terdiri dari akun pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Setelah anggaran disahkan maka perlu dilaksanakan.
3. Dalam pelaksanaan anggaran timbul transaksi. Transaksi tersebut harus dilakukan pencatatan lengkap berupa pembuatan buku kas umum, buku kas pembantu, buku bank, buku pajak, buku inventaris dengan disertai pengumpulan

- bukti-bukti transaksi.
4. Untuk memperoleh informasi posisi keuangan, kemudian berdasarkan transaksi yang terjadi dapat dihasilkan sebuah neraca. Neraca ini fungsinya untuk mengetahui kekayaan/posisi keuangan desa.
  5. Selain menghasilkan neraca bentuk pertanggungjawaban pemakaian anggaran dibuatlah laporan realisasi anggaran desa. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran. Basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca.

### **Pertanggungjawaban**

Formulir/daftar yang dipergunakan dalam proses pertanggungjawaban:

1. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa.
2. Peraturan Desa.
3. Laporan Kekayaan Milik Desa.
4. Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

Tahapan kegiatan dalam proses pertanggungjawaban:

1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/ Walikota setiap akhir tahun anggaran.
2. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa, terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
3. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
4. Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri:
  - a. Format Laporan

- Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;
- b. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
  - c. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.
5. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
  6. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
  7. Media informasi antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.
  8. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati/ Walikota melalui ca-mat atau sebutan lain.
  9. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, di-sampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

### **3. METODOLOGI PENELITIAN**

#### **Tipe Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian studi kasus. Menurut (Shona McCombes 2019) studi kasus merupakan penelitian mengenai subjek yang spesifik seperti orang, gambar, tempat, peristiwa organisasi atau fenomena. Studi kasus seringkali digunakan pada penelitian sosial, edukasi, klinis dan bisnis. Penelitian ini mendeskripsikan gambaran yang

senyatanya dari fenomena yang terjadi di pemerintah desa khususnya kepatuhan aparatur desa dalam pengelolaan keuangan desa.

Studi kasus dipilih untuk memperoleh pengetahuan tentang aturan akuntansi, regulasi serta praktik akuntansi yang diadopsi oleh pemerintah desa. Selain itu studi kasus juga membantu memahami akuntansi baik dari sisi teknologi, prosedur atau sistem yang digunakan dalam proses penyajian informasi keuangan (Ryan B et al 2002). Pendekatan studi kasus pada penelitian ini menggunakan perspektif analitik dan pada analisis komparatif antara regulasi yakni permendagri 113 dan level praktik penggunaan dana desa.

### **Subjek dan Objek Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Desa Batumerah yang terdapat di Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dengan objek penelitian ini adalah persepsi informan mengenai perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa yang dilakukan oleh aparatur desa. Penelitian dilakukan terhadap para informan antara lain perwakilan dari Pemerintah Desa Batumerah yang terdiri dari kepala desa, bendahara desa, sekretaris desa atau kepala seksi keuangan yang ada pada Desa Batumerah di Kota Ambon, Tahun Anggaran 2018.

### **Instrumen Penelitian**

Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang diperoleh melalui wawancara, pengamatan dan analisis serta metode kuantitatif berupa data laporan keuangan dana desa Batu Merah.

### **Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah pada data primer

berupa peraturan terkait pengelolaan keuangan dana desa, wawancara pada responden yang relevan serta pengamatan. Sementara data kuantitatif berupa data laporan keuangan dana desa yang disusun oleh pemerintah desa Batu Merah.

### **Metode Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara mendalam sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan informasi lainnya dalam meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti. Proses analisis dalam penelitian ini yaitu:

1. Menyiapkan daftar pertanyaan untuk disodorkan kepada informan terkait dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014  
Pertanyaan yang disusun bersumber pada Permendagri No.113/2014 sebagaimana yang tercantum pada lampiran yang diawali pada tahap perencanaan hingga tahap pertanggungjawaban.
2. Mengolah data untuk dianalisis  
Langkah ini melibatkan transkrip wawancara, mengetik data lapangan dari hasil observasi dan dokumentasi, memilah-milah dan menyusun data tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi. Pada saat melakukan wawancara, peneliti mencatat hasil jawaban dari narasumber dan menggunakan alat bantu perekam suara. Hasil transkrip wawancara narasumber akan dikelompokkan berdasarkan proses pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Daftar

pertanyaan wawancara terdapat di bagian lampiran.

Data penelitian ini diperoleh dari dokumentasi dan wawancara. Narasumber dalam penelitian ini adalah Penjabat Desa Batumerah, Bapak Fenly Masawoy, S.STP dan Sekretaris Desa Batumerah, Bapak M. A rlis Lisaholet, S.Sos selaku orang yang lebih memahami terkait pengelolaan keuangan desa di Batumerah. Hasil dokumentasi pada penelitian ini merupakan data-data terkait teknis pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban di Desa Batumerah untuk periode anggaran tahun 2018 yang berupa RKPDesa dan RAPBDesa.

3. Menganalisis lebih detail data yang diperoleh  
Data hasil wawancara, pengamatan dan analisis data laporan keuangan dana desa sesuai dirangkum dan disusun per tahapan sesuai klasifikasi pentahapan pada permendagri No. 113/2014 yakni tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.
4. Membandingkan ketentuan setiap ayat dalam Permendagri No.113 tahun 2014 dan implementasi pengelolaan keuangan desa yang ada di Desa Batumerah. Perbandingan tersebut kemudian akan dianalisis dan dideskripsikan dalam bentuk narasi yang diperkuat dengan kutipan hasil wawancara dengan narasumber  
Berikut merupakan dua langkah yang akan dilakukan peneliti dalam proses ini, yaitu:
  - a. Mendeskripsikan proses pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan,

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

Berikut merupakan deskripsi proses perencanaan keuangan desa di Desa Batumerah:

- 1) Pendeskripsian proses perencanaan keuangan desa di Desa Batumerah.

Tahapan perencanaan diawali dari musrenbag dimana pemerintah desa membentuk tim 11 untuk menyortir aspirasi dari masyarakat berdasarkan skala prioritas kemudian disusun dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Desa dan disahkan dalam bentuk Rancangan Anggaran Pemerintah Desa (RAPBDesa)

Proses selanjutnya, Penjabat Desa akan menyampaikan RAPBDesa kepada BPDesa untuk dibahas dan disepakati bersama kemudian disampaikan kepada Walikota melalui Camat. Biasanya dalam kurun waktu tiga hari RAPBDesa tersebut dikembalikan ke desa karena ada beberapa hal yang tidak sesuai pada penempatan pos anggaran. Proses selanjutnya, Penjabat Desa melakukan penyempurnaan terhadap APBDesa tersebut dan membahas serta menyepakati dengan BPDesa untuk diserahkan kembali kepada Walikota. Proses penyempurnaan ini paling lama tujuh hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi. Jika hasil RAPBDesa telah diterima dan disepakati Walikota, maka akan dilakukan rapat pengesahan RAPBDesa melalui Badan Permusyawaratan Desa.

- 2) Pendeskripsian proses pelaksanaan keuangan Desa Batumerah  
Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Batumerah dimulai dari masing-

masing Kepala Seksi (Kasi) mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang dilampiri dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Surat ini ditujukan kepada Penjabat Desa melalui Sekretaris Desa. Tugas Sekretaris Desa adalah melakukan verifikasi terhadap Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut yang selanjutnya disahkan oleh Penjabat Desa. Setelah mendapat pengesahan, masing-masing Kasi mengajukan ke bendahara untuk selanjutnya dilakukan proses pancairan dana. Bendahara desa akan mencatatnya sebagai pengeluaran desa.

- 3) Pendeskripsian proses penatausahaan keuangan Desa Batumerah  
Penatausahaan keuangan desa Batumerah dilakukan oleh Kaur Keuangan selaku Bendahara Desa. Ia mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran desa serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Dokumen yang digunakan melakukan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran desa melalui buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank. Bendahara Desa melaporkan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa pada tanggal 10 bulan berikutnya.
- 4) Pendeskripsian proses pelaporan keuangan Desa Batumerah  
Pelaporan APBDesa di Desa Batumerah dimulai dengan pembuatan laporan pertanggungjawaban setiap Kepala Seksi (Kasi) dan tim pelaksana. Laporan pertanggungjawaban tersebut diberikan kepada Bendahara Desa yang akan digunakan sebagai dasar dalam pembuatan laporan realisasi APBDesa. Laporan realisasi APBDesa

kemudian akan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa yang akan disampaikan oleh Penjabat Desa paling lambat pada bulan Juli setiap tahun berjalan. Selanjutnya, pelaporan semester akhir tahun akan disampaikan paling lambat pada bulan Januari tahun berikutnya oleh Penjabat Desa.

- 5) Pendeskripsian proses pertanggungjawaban keuangan Desa Batumerah  
Proses pertanggungjawaban laporan realisasi pelaksanaan APBDesa dilakukan oleh Penjabat Desa dengan melaporkan kepada Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan tersebut terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Selain itu, Penjabat Desa akan melaporkan laporan tersebut kepada Badan Permusyawaratan Desa, Saniri, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Karang Taruna, dan PKK Desa. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri dengan format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan dan format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa selanjutnya akan diinformasikan kepada masyarakat melalui papan pengumuman.  
Menunjukkan Bagaimana Deskripsi dan Tema-Tema ini akan Disajikan Kembali dalam Narasi/Laporan Kualitatif.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN** **Gambaran Objek Penelitian**

Jumlah penduduk Desa Batumerah sebanyak 69.266 jiwa terdiri dari laki-laki sebanyak 34.723

jiwa dan perempuan sebanyak 34.543 jiwa. Mayoritas penduduk bekerja pada bidang perdagangan karena menjadi pusat pasar di Kota Ambon. Perekonomian Desa Batumerah didominasi oleh sektor dagang. Hal ini terlihat dari data profil Desa Batumerah yang menunjukkan jumlah penduduk yang bekerja di sektor ini sebanyak 6.647 jiwa (laki-laki) dan 2.033 jiwa (perempuan). Mereka sebagian besar beraktivitas di pasar yaitu Pasar Batumerah, Pasar Arumbai, dan Pasar Mardika.

### **Rencana Kerja Pembangunan Desa**

Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat dengan RKPDesa adalah hasil musyawarah masyarakat desa tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode satu tahun mulai 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018. Pejabat Desa Batumerah dan Badan Permusyawaratan Desa Batumerah menetapkan Peraturan Negeri Batumerah No.03 Tahun 2018 tentang RKPDesa yang memuat rencana program dan kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan, bidang pembinaan masyarakat, bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang tak terduga. Peraturan desa tentang RKPDesa tersebut bertujuan agar dalam program yang dijalankan pemerintah desa dapat berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat berdaya guna, berhasil, dan tepat sasaran.

### **Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa. Ada tiga bagian utama dalam APBDesa di Desa Batumerah, yaitu:

1. Pendapatan Desa: Meliputi

semua penerimaan uang yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran.

2. Belanja Desa: Meliputi semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.
3. Pembiayaan Desa: Meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali.

*Komparasi data dan pengamatan di lapangan dan Permendagri No.113/2014*

Penyajian data ini bertujuan untuk menyampaikan hasil analisis. Berdasarkan analisis data, peneliti akan memberikan laporan kualitatif tentang proses pengelolaan keuangan desa di Desa Batumerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dalam bentuk perbandingan tercantum pada lampiran

### **Hasil Penelitian**

Hasil interpretasi dalam penelitian ini diambil dari hasil penyajian data yang telah dilakukan sebelumnya. Proses ini dilakukan untuk membandingkan teori-teori pengelolaan keuangan desa pada Permendagri Nomor113 Tahun 2014 dengan hasil penelitian di lapangan sehingga bisa ditarik kesimpulan. Hal ini untuk mengetahui apakah implemmentasi pengelolaan keuangan desa di Desa Batumerah sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 11 Tahun 2014 atau tidak. Berikut ini merupakan hasil dari pemaknaan data dalam proses pengelolaan keuangan desa di Desa Batumerah dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban:

### Perencanaan

Proses perencanaan keuangan Desa Batumerah banyak yang sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113/2014 karena dari hasil penelitian. Terdapat tiga ketentuan yang belum dilaksanakan Pemerintah Desa Batumerah mengenai pasal 20 ayat (4), RAPBDesa tidak disepakati paling lambat bulan Oktober karena sering terjadi keterlambatan pencairan anggaran, pasal 21 ayat (3), Desa Batumerah tetap menunggu hasil evaluasi dari Walikota terkait dengan Peraturan Desa, dan ketentuan pada pasal 23 ayat (5) yang belum dilaksanakan karena selama ini Penjabat Desa Batumerah melakukan evaluasi terhadap RAPBDesa dari Camat. Penjabat Desa tidak mengetahui langkah selanjutnya yang akan di ambil Camat jika tidak ditindaklanjuti. Pemerintah Desa Batumerah memiliki rekening sendiri di Bank Negara Indonesia (BNI). Semua penerimaan dan pengeluaran desa dilengkapi dengan bukti yang lengkap dan sah. Pemerintah Desa Batumerah tidak melakukan pungutan selain yang ditetapkan dalam Perdes. Kaur Keuangan menyimpan uang sebesar Rp255.832.000 untuk keperluan operasional desa. Pengaturan jumlah uang dalam kas desa akan ditetapkan dalam Peraturan Walikota (Perwali).

### Pelaksanaan

Proses pelaksanaan keuangan Desa Batumerah banyak yang sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 karena dari hasil penelitian. Terdapat empat ketentuan yang belum dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Batumerah.

- a. Pada pasal 24 ayat (1) dimana tidak semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Pendapatan Asli Desa

(PAD) langsung disetor kepada Kaur Keuangan.

- b. Pasal 26 ayat (2) dimana semua pengeluaran operasional desa yang terkait dengan gaji, honor, dan upah kegiatan termasuk urusan Pemerintah Desa Batumerah.
- c. Pasal 28 ayat (2) dimana ada Surat Permintaan Pembayaran definitif yang dibayarkan sebelum barang atau jasa, ada juga Surat Permintaan Pembayaran panjar pembayaran sesudah barang atau jasa.
- d. Pasal 29 dimana Surat Permintaan Pembayaran hanya Rincian Anggaran Biaya dan bukti transaksi.

### Penatausahaan

Proses penatausahaan keuangan Desa Batumerah banyak yang sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Kegiatan penatausahaan dilakukan Kaur Keuangan selaku Bendahara Desa dan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan. Kaur Keuangan membuat Laporan Pertanggungjawaban dibantu oleh Sekretaris Desa selaku kordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban kepada Penjabat Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, namun kadang mengalami keterlambatan. Proses penatausahaan penerimaan dan pengeluaran desa menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank.

### Pelaporan

Proses pelaporan keuangan Desa Batumerah sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Pertama, Penjabat Desa telah menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Walikota berupa laporan semester



pertama dan laporan semester akhir tahun. Selanjutnya, Pejabat membuat laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa dan menyampaikan laporan realisasi APBDesa paling lambat akhir bulan Juli sesuai regulasi. Selanjutnya Pejabat telah menyampaikan laporan semester akhir tahun paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya.

### **Pertanggungjawaban**

Proses pertanggungjawaban keuangan Desa Batumerah sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113/2014. Pertama, Pejabat Desa Batumerah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Walikota setiap akhir tahun anggaran. Selanjutnya, Laporan Pertanggungjawaban yang disampaikan Pejabat Desa berupa pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang ditetapkan dalam Peraturan Desa sesuai dengan regulasi. Laporan Pertanggungjawaban yang disampaikan Pejabat Desa dilampiri dengan format LPJ realisasi pelaksanaan APBDesa tahun berkenaan, format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun berkenaan, dan format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk dan tidak terpisah dari laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa Batumerah. Selanjutnya, Pemerintah Desa Batumerah telah menginformasikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada masyarakat melalui papan pengumuman. Berikutnya, LPJ Desa Batumerah telah disampaikan kepada Camat Sirimau paling lambat satu bulan setelah tahun anggaran berkenaan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri. Ketentuan mengenai pengelolaan keuangan Desa Batu Merah diatur dalam Peraturan

Walikota.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1. Kesimpulan**

Penelitian ini diusahakan untuk dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan prosedur ilmiah, namun masih memiliki keterbatasan yang dapat digunakan sebagai acuan penelitian selanjutnya agar diperoleh hasil yang lebih baik lagi. Berikut ini keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian ini:

1. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Desa Batumerah, dimana informan yang diwawancarai hanya Pejabat Desa dan Sekretaris Desa karena pegawai/staf lainnya tidak memiliki waktu.
2. Keterbatasan waktu penelitian untuk memperoleh data.

### **5.2. Saran**

Saran untuk penelitian berikutnya adalah menganalisis kesesuaian peruntukkan alokasi dana desa untuk pemberdayaan masyarakat desa.

Ini memuat tentang rangkuman atas temuan-temuan penelitian, implikasi hasil penelitian serta saran dan rekomendasi bagi penelitian selanjutnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ananda, Khairunnisa Primavera; Purnamasari, Pupung; Gunawan, Hendra;. (2016). Pengaruh Pengendalian Internal dan Religiusitas terhadap Pencegahan Fraud. *Prosiding Akuntansi*, 2(2).
- Arikunto. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Board of Governors of the Federal reserve Sytem, Federal Deposit Insurance Corporation, National Credit Union Administration,

- Office of the Controller of the Currency and Office of Thrift Supervision. (2006). *Bank Secrecy Act/ Anti-Money Laundering Examination Manual*. Federal Financial Institutions Examination Council.
- Conroy, Stephen J; Emerson, Tisha L.N;. (2004). Business Ethics and Religion: religiosity as a Predictor of Ethical Awareness Among Students. *Journal of Business Ethics*, 383-396.
- Darto. (2016). *Perilaku Prososial Bagi Revolusi Mental: Seri Penelitian*. Malang: Selaras Media Kreasindo.
- Diaz Priantara. (2013). *Fraud Auditing dan Investigation*. Surabaya: Mitra Wacana Media.
- Dinata, Ruri Octari; Irianto, Gugus; Mulawarman, Aji Dedi;. (2018, April). Menyingkap Budaya Penyebab Fraud: Studi Etnografi di Badan Usaha Milik Negara. *Jurnal Economia*, 14(1), 66-86.
- Fadipe, Joseph O.A; Titiloye, E O;. (2012). Application of Continued Fractions in Controlling Bank Fraud. *International Journal of Business and Social Science*, 210-213.
- Fetzer John E. (2003). *Multidimensional Measurement of Religiousness/Spirituality For use in Health Research*. A report of The Fetzer Institute National Institute on Aging Working Group.
- Glock, Charles Y. (1962). On the Study of Religious Commitment. *Religious Education*, 98-110.
- Graham,MD and Mnus, TM. (2002). *Creating a Tool reward Strategy: A toolkit for designing business-based plans*. New York: Amacom.
- Imam Ghozali. (2012). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. Yogyakarta: Universitas Diponegoro.
- Irphani Ardi. (2017). Pengaruh Tekanan, Keefektifan Sistem Pengendalian Internal, Perilaku tidak Etis dan Jabatan Dalam Keuanga Terhadap Fraud. *Tesis*.
- Ivancevich J M. (2007). *Human resource Management*. New York: McGraw-Hill Irwin.
- Jiang, Zhou; Qian, Xiao; Henan, Qi; Lei, Xiao;. (2009, November). Total Reward Strategy: A Human Resources Management Stratgey Going with the Trend of the Times. *International Journal of Business and Management*, 4(11).
- Johnson. (1999). *Preventing Fraud. Accountancy Ireland*, 5(31).
- Karyono. (2013). *Forensic Fraud*. Yogyakarta: Andi.
- Kreitner; Kinicki, Robert; Angelo;. (2005). *Organizational Behavior*. New York: McGraw-Hill.
- Kurtulus Kaymaz. (2010). The Effects of Job Rotation Practices on Motivation: A Research on Managers in the Automotive Organizations. *International Journal of Economics and Business Research*, 1(3).
- Lado, Augustine A; Javckson, Susan E; Schuler, Randall S;. (2000, July 2020). Strategic Humsn Resource. *The Academy of Management Review*, 25(3).
- Mahsun Mohammad. (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFPE.
- Mangkunegara, A A; Prabu, Anwar;. (2000). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: PT. Remaja Resdakarya.
- Mansur A Tolkah. (2009). Analisis Pengaruh Budaya Organisasi dan Rotasi Pekerjaan terhadap Motivasi Kerja untuk Meningkatkan Kinerja Pegawai

- Ditjen Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Berbasis Administrasi Modern KPP Pratama Semarang Timur). *Tesis*.
- Mc Daniel, Stephen W; Burnett, John J;. (1990). Consumer Religiosity and Retail Store Evaluative Criteria. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 101-112.
- Melilia Permatasari. (2016). Pengaruh Penerapan Reward and Punishment dan Job Rotation terhadap Fraud. *Skripsi*.
- Muhammad, Ali. (2011). *Memahami riset Perilaku dan Sosial*. Bandung: Pustaka Cendekia.
- Nur Laila Istiqomah. (2017). Analisis Pengaruh reward and punishment, Job Rotation dan Religiusitas terhadap Fraud pada BMT Yogyakarta . *Skripsi*.
- Nurmiyati, E. (2011). Hubungan Pemberian Reward dan Punishment dengan Kinerja Karyawan pada BPRS Harta Insan Karimah . *Muamalat (Ekonomi Islam)*.
- Pamungkas, Imang D;. (2014). Pengaruh Religiusitas dan Rasionalisasi dalam Mencegah dan Mendeteksi Kecendrungan Kecurangan Akuntansi. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 48-59.
- Permatasari, Meilia;. (2016). Pengaruh Penerapan Reward and Punishment dan Job Rotation terhadap Fraud: Sebuah Studi Eksperimen. *Tesis*.
- Pradipha Wisnu Wibisono. (2015). Pengaruh Reward and Punishment dan Job Rotation terhadap Fraud. *Skripsi*.
- Purwanto. (2007). *Instrumen Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Rivai, V; Sagala, J;. (2010). *Manajemen Sumber Daya Manusia dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Sa'adah Yuliana. (2015). Pengaruh faktor Ekonomi, Modal Sosial dan Religiusitas terhadap Pengembalian Pembiayaan Murabahah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 10-20.
- Sahat Parulian Remus. (2016). Analisis Reward and Punishment terhadap Produktivitas Kerja Karyawan pada PT. Mina Jaya Persada Makmur Medan. *Jurnal Ilmiah Methonomi*, 2(1).
- Siagian. (2006). *academia.edu*. Retrieved from academia: www.academia.edu
- Siregar, Syofian. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana.
- Steers, R M; Porter, L W;. (1991). *Motivation and Work Behavior*. New York: McGraw-Hill.
- Sugiyono. (2016). *Statistika Untuk Penelitian*. Jakarta: Alfabeta.
- Sutherland, Edwin H;. (1940). White Collar Criminality. *American Sociological Association*, 5(1), 1-12.
- TM Tuanakotta. (2015). *Audit Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wahyudi. (2002). *Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)*. Bandung : Sulita.
- Wilopo. (2006). Analisis Faktor-faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kecendrungan Kecurangan Akuntansi: Studi Pada Perusahaan Publik dan Badan Usaha Milik Negara di Indonesia. *The Indonesian Journal of Accounting research*, 9(3).
- Wolfe, David T; Hermanson, Dana R;. (2004). The Fraud Diamond: Considering the Four Elements of Fraud. *CPA Journal*, 38-42.
- Worthington L E. (1998). *Dimensions of Forgiveness; Psychological Research and Theological Perspectives*. Philadelphia: Templeton Foundation Press.
- Yesi Mutia Basri. (2015). Pengaruh



Gender, Religiusitas dan Sikap  
Love of Money pada Persepsi  
Etika Penggelapan Pajak

Mahasiswa Akuntansi . *Jurnal  
Ilmiah Akuntansi dan Bisnis.*

**Lampiran 1 Daftar Pertanyaan menurut Permendagri No.113/2014**

**Tabel 1 Pertanyaan tahap Perencanaan**

No	Pertanyaan
1	Apa saja isi RAPBDes?
2	Bagaimana proses perencanaan APBDes?
3	Siapa saja yang terlibat dalam proses perencanaan APBDes?
4	Apakah sekretaris desa menyampaikan RAPBDes kepada Penjabat Desa?
5	Kapan sekretaris Desa menyampaikan RAPBDes kepada Penjabat desa?
6	Apakah RAPBDes dibahas dan disepakati bersama dengan BPD?
7	Apakah RAPBDes yang telah dibahas dan disepakati, disampaikan kepada Walikota?
8	Bagaimana prosedur yang berlaku apabila RAPBDes tidak disetujui?
9	Berapa lama walikota memberi hasil evaluasi RAPBDes?
10	Siapa yang akan diberikan RAPBDes oleh Bupati?
11	Apabila Walikota menyampaikan kepada camat, apakah camat tersebut melakukan evaluasi terhadap RAPBDes tersebut?
12	Berapa lama Camat menetapkan hasil evaluasi tersebut?
13	Apabila camat tersebut tidak memberikan hasil evaluasi RAPBDes tersebut, apakah berarti Perdes berlaku dengan sendirinya?
14	Berapa lama penjabat desa melakukan penyempurnaan RAPBDes?
15	Bagaimana tindak lanjut camat apabila Penjabat Desa tidak menindak lanjuti hasil evaluasi RAPBDes?
16	Jika Perdes batal, apakah hal itu akan menyatakan berlakunya pagu APBDes tahun sebelumnya?
17	Jika terjadi pembatalan Perdes apakah penjabat desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional Pemerintahah Desa?
18	Apabila terjadi pembatalan, apakah penjabat desa memberhentikan pelaksanaan Perdes?
19	Apabila terjadi pembatalan, apakah penjabat desa melakukan evaluasi terhadap rancangan Perdes?

**Tabel 2 Tahap Pelaksanaan**

No	Pertanyaan
1	Berasal dari mana saja penerimaan dan pengeluaran desa?
2	Apakah semua penerimaan dan pengeluaran dilakukan melalui rekening kas desa?
3	Bagaimana prosedur pencairan dana dalam RAPBDes?
4	Apakah ada pengesahan dari penjabat desa dan bendahara terkait dengan pencairan dana tersebut?
5	Apakah penerimaan dan pengeluaran dilengkapi dengan bukti yang lengkap dan sah?
6	Berupa apa saja bukti yang lengkap dan sah tersebut?
7	Apakah pengeluaran desa tidak boleh dilakukan sebelum RAPBDes ditetapkan menjadi Perdes?
8	Apakah ada pihak-pihak tertentu yang dibentuk dalam pelaksanaan APBDes?
9	Bagaimana mekanisme pengajuan pendanaan oleh pelaksana kegiatan?
10	Apabila pelaksana kegiatan ingin mengajukan pendanaan, apakah harus dilengkapi dengan dokumen tertentu? Dokumen itu seperti apa?
11	Apakah dokumen tersebut harus diverifikasi dan disahkan oleh Sekdes dan Penjabat Desa?
12	Apakah pelaksana kegiatan mengajukan LPJ?
13	Apabila pelaksana mengajukan SPP, apakah harus disahkan oleh Penjabat Desa terlebih dahulu?
14	Apakah SPP boleh dilakukan sebelum barang dan jasa diterima?
15	Pengajuan SPP berupa apa saja?
16	Apabila pelaksana kegiatan mengajukan SPP, apa yang dilakukan oleh Sekdes?
17	Kapan bendahara boleh melakukan pembayaran atas SPP tersebut?
18	Bagaimana prosedur yang berlaku jika ada biaya tak terduga timbul saat kegiatan pelaksanaan?
19	Jika ada biaya tak terduga, apakah perlu dilakukan perubahan Perdes?
20	Biasanya apa saja yang menyebabkan Perdes mengalami perubahan?
21	Apabila ada perubahan APBDes, apakah diinformasikan kepada BPD?
22	Apakah ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan desa?
23	Jika ada bantuan dari pihak ketiga yang tidak mengikat, apakah perlu dilakukan perubahan Perdes?
24	Apakah Bendahara Desa telah melakukan pungutan pajak dan disetorkan ke kas negara?
25	Apakah dalam pengadaan barang dan jasa diatur dalam Perwali?

**Tabel 3 Tahap Penatausahaan**

No	Pertanyaan
1	Siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan penatausahaan APBDes?
2	Kapan Bendahara Desa melaporkan pertanggungjawaban keuangan desa kepada Penjabat Desa?
3	Apakah bukti transaksi penerimaan dan pengeluaran diarsipkan oleh Bendahara Desa?
4	Apakah ada kendala dalam setiap pelaksanaan tutup buku?
5	Apa saja kendala yang dihadapi Bendahara Desa dalam melakukan tutup buku?

**Tabel 4 Tahap Pelaporan**

No	Pertanyaan
1	Bagaimana proses penyusunan laporan realisasi APBDes?
2	Kepada siapa laporan realisasi APBDes tersebut disampaikan?
3	Apa saja laporan yang terdapat dalam realisasi APBDes tersebut?
4	Kapan laporan-laporan tersebut disampaikan kepada Walikota?

**Tabel 5 Tahap Pertanggungjawaban**

No	Pertanyaan
1	Bagaimana pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa?
2	Apakah Penjabat Desa telah melaporkan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa?
3	Terdiri dari apa saja isi laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa tersebut?
4	Kapan Pemerintah Desa melaporkan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa?
5	Apakah Pemerintah Desa telah menyampaikan laporan realisasi anggaran pelaksanaan APBDesa melalui media tertentu?
6	Apa saja media yang digunakan dalam menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa?
7	Apakah semua pihak yang membutuhkan bisa mendapatkan akses yang sama untuk memperoleh informasi mengenai realisasi APBDesa?
8	Kapan laporan realisasi dan pertanggungjawaban disampaikan kepada Masyarakat Desa?
9	Apakah ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan desa diatur dalam Perwali?

**Lampiran 2 Data Perbandingan Tahapan Pengelolaan Keuangan dengan Permendagri No.113/2014****Tabel 6 Perbandingan Tahap Perencanaan Keuangan Desa dengan Permendagri No.113/2014**

No	Permendagri No.113 Tahun 2014	Desa Batumerah	Sesuai/ Tidak Sesuai
1	Pasal 20 ayat (1), Sekretaris menyusun RAPBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan	Sekretaris Desa telah menyusun RAPBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan	Sesuai
2	Pasal 20 ayat (2), Sekretaris Desa menyampaikan RAPBDesa kepada Kepala Desa	Sekretaris Desa telah menyampaikan RAPBDesa kepada Penjabat	Sesuai
3	Pasal 20 ayat (3), RAPBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPDesa untuk dibahas dan disepakati bersama	RAPBDesa telah disampaikan oleh Penjabat Desa kepada BPDesa untuk dibahas dan disepakati bersama	Sesuai
4	Pasal 20 ayat (4), RAPBDesa telah disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan	RAPBDesa tidak disepakati paling lambat bulan Oktober karena sering terjadi keterlamabatan mengenai proses pencairan anggaran. Desa Batumerah biasanya menyepakati pada bulan November	Tidak sesuai
5	Pasal 21 ayat (1), RAPBDesa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Walikota melalui Camat paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi	Penjabat Desa telah menyampaikan RAPBDesa yang telah disepakati kepada Walikota melalui Camat	Sesuai
6	Pasal 21 ayat (2), Walikota menetapkan hasil evaluasi RAPBDesa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya RAPBDesa	Walikota telah menetapkan hasil evaluasi RAPBDesa dalam waktu 2 minggu	Sesuai
7	Pasal 21 ayat (3), Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu 20 hari, maka Perdes berlaku dengan sendirinya	Desa Batumerah tetap menunggu hasil evaluasi dari Walikota	Tidak sesuai
8	Pasal 21 Ayat (4), Walikota menyatakan hasil evaluasi RAPBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum	Penjabat Desa sudah melakukan penyempurnaan RAPBDesa yang tidak sesuai dengan kepentingan umum	Sesuai



No	Permendagri No.113 Tahun 2014	Desa Batumerah	Sesuai/ Tidak Sesuai
	dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi	dan peraturan perundang-undangan yang berlaku paling cepat 3 hari	
9	Pasal 22 ayat (1), apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan RAPBDesa menjadi Perdes, Walikota akan membatalkan Perdes dengan Perwali	Penjabat Desa tidak melakukan revisi dan tetap mengesahkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, maka Walikota akan membatalkan Peraturan Desa dengan Peraturan Walikota (Perwali)	Sesuai
10	Pasal 22 ayat (2), apabila terjadi pembatalan Perdes, maka dinyatakan berlakunya pagu anggaran tahun sebelumnya	Pemerintah Desa akan menggunakan pagu anggaran tahun sebelumnya jika terjadi pembatalan Perdes	Sesuai
11	Pasal 22 ayat (3), dalam hal pembatalan Perdes, Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintahan desa	Desa Batumerah tidak pernah terjadi pembatalan, jika terjadi pembatalan terkait dengan Peraturan Desa oleh Walikota, maka Penjabat Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintahan desa	Sesuai
12	Pasal 22 ayat (4), Kepala Desa memberhentikan Perdes paling lama 7 hari setelah terjadi pembatalan	Penjabat Desa bersama BPDesa akan mencabut Perdes tersebut jika terjadi pembatalan	Sesuai
13	Pasal 23 ayat (1), Walikota dapat mendelegasikan evaluasi RAPBDesa kepada Camat	Camat Sirimau telah mengevaluasi RAPBDesa Batumerah	Sesuai
14	Pasal 23 ayat (2), Camat menetapkan hasil evaluasi RAPBDesa paling lama 20 hari sejak diterimanya RAPBDesa	Biasanya camat memberikan hasil evaluasi RAPBDesa dalam kurun waktu 14 hari kerja	Sesuai
15	Pasal 23 ayat (3), dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, Perdes berlaku	Jika Camat Sirimau tidak memberikan hasil evaluasi maka Perdes akan berlaku	Sesuai

No	Permendagri No.113 Tahun 2014	Desa Batumerah	Sesuai/ Tidak Sesuai
	dengan sendirinya		
16	Pasal 23 ayat (4), dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi RAPBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi	Penjabat Desa akan mengevaluasi RAPBDesa yang tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan selama seminggu	Sesuai
17	Pasal 23 ayat (5), apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti dan Kepala Desa tetap menetapkan RAPBDesa menjadi Perdes, maka Camat akan menyampaikan usulan pembatalan kepada Walikota	Selama ini Penjabat Desa Batumerah melakukan evaluasi terhadap RAPBDesa dari Camat. Penjabat Desa tidak mengetahui langkah selanjutnya yang akan di ambil Camat jika tidak ditindaklanjuti	Tidak sesuai
18	Pasal 23 ayat (6), ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian RAPBDesa kepada Camat diatur dalam Perwali	Pendelegasian evaluasi RAPBDesa Batumerah kepada Camat diatur dalam Perwali	Sesuai

**Tabel 7 Perbandingan Proses Pelaksanaan Keuangan Desa dengan Permendagri No.113/2014**

No	Permendagri No.113 Tahun 2014	Desa Batumerah	Sesuai/Tidak Sesuai
1	Pasal 24 ayat (1), semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa	Tidak semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Pendapatan Asli Desa (PAD) langsung disetor kepada Kaur Keuangan Desa	Tidak sesuai
2	Pasal 24 ayat (2), khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kota	Pemerintah Desa Batumerah sudah memiliki rekening sendiri di BNI	Sesuai
3	Pasal 24 ayat (3), semua penerimaan dan	Semua penerimaan dan pengeluaran desa wajib	Sesuai

No	Permendagri No.113 Tahun 2014	Desa Batumerah	Sesuai/Tidak Sesuai
	pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah	dilengkapi dengan bukti yang lengkap dan sah	
4	Pasal 25 ayat (1), pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam Perdes	Pemerintah Desa Batumerah tidak melakukan pungutan selain yang ditetapkan Perdes	Sesuai
5	Pasal 25 ayat (2), bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa	Kaur keuangan menyimpan uang dengan nominal tertentu untuk keperluan operasional desa sebesar Rp255.832.000	Sesuai
6	Pasal 25 ayat (3), pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam Perwali	Pengaturan jumlah uang dalam kas desa akan ditetapkan dalam Perwali	Sesuai
7	Pasal 26 ayat (1), pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum RAPBDesa ditetapkan menjadi Perdes	Pemerintah Desa menunggu Perdes untuk pengeluaran desa	Sesuai
8	Pasal 26 ayat (2), pengeluaran desa tidak termasuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa	Semua pengeluaran operasional desa termasuk urusan Pemerintah Desa Batumerah. Gaji, honor, dan upah kegiatan dibiayai oleh ADD	Tidak sesuai
9	Pasal 26 ayat (3), penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat RAB yang telah disahkan oleh Kepala Desa	Penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat RAB yang telah disahkan oleh Penjabat Desa	Sesuai
10	Pasal 27 ayat (1), pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain RAB	Tim 11 harus mengajukan RAB untuk mendapatkan pendanaan	Sesuai
11	Pasal 27 ayat (2), RAB	Rencana Anggaran Biaya	Sesuai

No	Permendagri No.113 Tahun 2014	Desa Batumerah	Sesuai/Tidak Sesuai
	diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa	telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Penjabat Desa	Sesuai
12	Pasal 27 ayat (3), pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan menggunakan buku kas kegiatan	Tim 11 bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan menggunakan buku kas kegiatan	Sesuai
13	Pasal 28 ayat (1), pelaksana kegiatan mengajukan SPP kepada Kepala Desa	Tim 11 sudah mengajukan SPP kepada Penjabat.	Sesuai
14	Pasal 28 ayat (2), SPP tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima	Ada SPP definitif yang dibayarkan sebelum barang atau jasa, ada juga SPP panjar pembayaran sesudah barang atau jasa	Tidak sesuai
15	Pasal 29, pengajuan SPP terdiri atas SPP, pernyataan tanggungjawab belanja, dan lampiran buku transaksi	SPP hanya RAB dan bukti transaksi	Tidak sesuai
16	Pasal 30 ayat (1), Sekretaris Desa berkewajiban untuk meneliti kelengkapan permintaan pembayaran diajukan oleh pelaksana kegiatan, menguji kebenaran atas beban APBDesa yang tercantum dalam permintaan pembayaran, menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud, dan menolak pengajuan SPP oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan	Sekretaris Desa sudah melakukan tugasnya sesuai dengan regulasi yang ditetapkan kepada Tim 11 sebagai pelaksana kegiatan	Sesuai
17	Pasal 30 ayat (2), SPP yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa, Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan	Kaur Keuangan telah melakukan pembayaran setelah SPP diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Penjabat Desa	Sesuai

No	Permendagri No.113 Tahun 2014	Desa Batumerah	Sesuai/Tidak Sesuai
	pembayaran		
18	Pasal 30 ayat (3), bendahara melakukan pencatatan pengeluaran atas pembayaran yang telah dilakukan	Kaur Keuangan mencatat pengeluaran atas pembiayaan yang disepakati Penjabat Desa	Sesuai
19	Pasal 31, bendahara desa sebagai wajib pungut PPh dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Kaur Keuangan sudah menyetorkan semua yang dipungutnya ke kas Negara	Sesuai
20	Pasal 32, pengadaan barang dan atau jasa di desa diatur dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan	Pengadaan barang dan jasa sudah disesuaikan dengan Perwali	Sesuai
21	Pasal 33 ayat (1), faktor yang mengakibatkan perubahan Perdes pada pagu anggaran	Peraturan Desa terjadi perubahan pada pagu anggaran dikarenakan masalah bencana alam	Sesuai
22	Pasal 33 ayat (2), perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 kali dalam 1 tahun anggaran	Pemerintah Desa sudah melakukan perubahan 1 kali sesuai dengan regulasi	Sesuai
23	Pasal 33 ayat (3), tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara penetapan APBDesa	Pengajuan perubahan APBDesa Batumerah sama dengan penetapan APBDesa sesuai hasil musyawarah	Sesuai
24	Pasal 34 ayat (1), bantuan dari APBD Provinsi dan APBD Kota serta hibah dan bantuan ketiga yang tidak mengikat ke desa disalurkan setelah ditetapkannya RAPBDesa	Bantuan dari APBD Provinsi dan Kota sudah diterima oleh Pemdes setelah ditetapkannya RAPBDesa	Sesuai
25	Pasal 34 ayat (2), perubahan APBDesa diinformasikan kepada BPDesa	Pemdes sudah menginformasikan perubahan APBDesa kepada BPDesa	Sesuai

**Tabel 8 Perbandingan Proses Penatausahaan Keuangan desa dengan Permendagri No.113/2014**

No	Permendagri No.113 Tahun 2014	Desa Batumerah	Sesuai/Tidak Sesuai
1	Pasal 35 ayat (1), penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa	Kegiatan penatausahaan dilakukan Kaur Keuangan selaku Bendahara Desa	Sesuai
2	Pasal 35 ayat (2), bendahara desa melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib	Kaur Keuangan sudah mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan	Sesuai
3	Pasal 35 ayat (3), bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui LPJ	Kaur Keuangan sudah membuat LPJ dibantu oleh Sekdes	Sesuai
4	Pasal 35 ayat (4), LPJ disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya	Kaur Keuangan sudah menyampaikan LPJ kepada Penjabat Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, namun kadang mengalami keterlambatan	Sesuai
5	Pasal 36, penatausahaan penerimaan dan pengeluaran menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank	Proses penatausahaan penerimaan dan pengeluaran desa menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank	Sesuai

**Tabel 9 Perbandingan Tahap Pelaporan Keuangan Menurut Pemendagri No.113/2014**

No	Permendagri No.113 Tahun 2014	Desa Batumerah	Sesuai/Tidak Sesuai
1	Pasal 37 ayat (1), Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun	Penjabat Desa sudah menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun	Sesuai
2	Pasal 37 ayat (2), laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa	Penjabat membuat laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa	Sesuai
3	Pasal 37 ayat (3), laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat pada akhir	Penjabat sudah menyampaikan laporan realisasi APBDesa paling lambat akhir bulan Juli sesuai	Sesuai

	bulan Juli tahun berjalan	regulasi	
4	Pasal 37 ayat (4), laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya	Penjabat sudah menyampaikan laporan semester akhir tahun paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya	Sesuai

**Tabel 10 Perbandingan Tahap Pertanggungjawaban dan Permendagri No.113/2014**

No	Permendagri No.113 Tahun 2014	Desa Batumerah	Sesuai/Tidak Sesuai
1	Pasal 38 ayat (1), Kepala Desa menyampaikan LPJ realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Walikota setiap akhir tahun anggaran	Penjabat Desa Batumerah menyampaikan LPJ realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Walikota setiap akhir tahun anggaran	Sesuai
2	Pasal 38 ayat (2), LPJ realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan	LPJ yang disampaikan Penjabat Desa berupa pendapatan, belanja, dan pembiayaan	Sesuai
3	Pasal 38 ayat (3), LPJ realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Perdes	LPJ yang disampaikan Penjabat Desa ditetapkan dalam Perdes sesuai dengan regulasi	Sesuai
4	Pasal 38 ayat (4), LPJ realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri dengan format LPJ realisasi pelaksanaan APBDesa tahun berkenaan, format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun berkenaan, dan format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk	LPJ yang disampaikan Penjabat Desa dilampiri dengan format LPJ realisasi pelaksanaan APBDesa tahun berkenaan, format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun berkenaan, dan format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk	Sesuai
5	Pasal 39, LPJ merupakan bagian tidak terpisahkan dengan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa	LPJ APBDesa tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa Batumerah	Sesuai
6	Pasal 40 ayat (1) dan (2), LPJ APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah	Pemerintah Desa Batumerah sudah menginformasikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada masyarakat melalui papan pengumuman	Sesuai

No	Permendagri No.113 Tahun 2014	Desa Batumerah	Sesuai/Tidak Sesuai
	diakses oleh masyarakat antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya		
7	Pasal 41 ayat (1), LPJ realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Walikota melalui Camat	LPJ Desa Batumerah sudah disampaikan kepada Camat Sirimau	Sesuai
8	Pasal 41 ayat (2), LPJ realisasi pelaksanaan paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran bekenaan	Penjabat sudah menyampaikan LPJ realisasi pelaksanaan APBDesa paling lambat 1 bulan	Sesuai
9	Pasal 42, format RAPBDesa, buku pembantu kas kegiatan, RAB dan SPP serta pernyataan tanggung jawab belanja, laporan realisasi pelaksanaan APBDesa pada semester pertama dan semester akhir tahun serta LPJ realisasi pelaksanaan APBDesa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Permen	Penjabat Desa membuat LPJ sesuai dengan regulasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Permen	Sesuai
10	Pasal 43, ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan desa diatur dalam Perwali	Ketentuan mengenai pengelolaan keuangan Desa Batumerah diatur dalam Perwali	Sesuai